



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 04 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisiensi dan terarah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,


FERLI YULEDI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,


HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024 NOMOR : 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 04/1531/TB/2024

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.

RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2045 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR :
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I-8
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-10
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Geografi	II-1
2.1.2. Demografi	II-34
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-39
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-61
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar.....	II-61
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	II-106
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	II-144
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-155
2.4.1. Kondisi Umum Aspek Daya Saing Daerah.....	II-155

2.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-161
2.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-162
2.4.4. Fokus Iklim Investasi.....	II-163
2.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-164
2.4.6. Indeks Inovasi Daerah	II-165
2.4.7. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).....	II-165
2.4.8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).....	II-166
2.4.9. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).....	II-166
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 - 2025	II-167
2.5.1. Hasil Capaian Pembangunan	II-167
2.5.2. Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005 - 2025.....	II-168
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-169
2.6.1. Proyeksi Kependudukan	II-169
2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana	II-171
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-178

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....III-1

3.1. Megatren Global.....	III-1
3.2. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional.....	III-3
3.3. Isu Strategis dan Tantangan Provinsi Lampung	III-6
3.4. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang ..	III-8
3.5. Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang	III-51

BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH.....	IV-1
4.1.	Tinjauan Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2025-2045	IV-1
4.2.	Tinjauan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2045	IV-4
4.3.	Visi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang 2025-2045	IV-7
4.4.	Misi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang 2025-2045	IV-10
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	V-1
5.1.	Arah Kebijakan Daerah.....	V-1
5.2.	Sasaran Pokok Daerah.....	V-12
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi, Luas Wilayah dan Jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang	II-3
Tabel 2.2	Panjang Sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang	II-8
Tabel 2.3	Proyeksi Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Tulang Bawang	II-14
Tabel 2.4	Perhitungan Produktivitas Lahan Kabupaten Tulang Bawang	II-16
Tabel 2.5	Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang.....	II-21
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2019-2023	II-40
Tabel 2.7	PDRB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023 (dalam juta rupiah)	II-42
Tabel 2.8	Distribusi Persentase Terhadap Total PDRB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023 (persen) ...	II-43
Tabel 2.9	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-45
Tabel 2.10	Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi di Kabupaten Tulang Bawang	II-51
Tabel 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2019-2023	II-66
Tabel 2.12	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)	

Tahun 2019-2023	II-67
Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
Tahun 2021-2023	II-68
Tabel 2.14 Perkembangan Angka Kelulusan	
Tahun 2021/2022 - 2022/2023.....	II-68
Tabel 2.15 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang (persen), 2021-2023	II-70
Tabel 2.16 Perkembangan Angka Putus Sekolah	
Tahun 2022-2023	II-71
Tabel 2.17 Angka Melanjutkan di Kabupaten Tulang Bawang	
Tahun 2021-2023	II-71
Tabel 2.18 Guru yang memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022	II-72
Tabel 2.19 Guru yang Telah Bersertifikat Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022	II-73
Tabel 2.20 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022	II-73
Tabel 2.21 Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022	II-74
Tabel 2.22 Rombongan Belajar SD/MI tahun 2018-2022 di Kabupaten Tulang Bawang	II-75
Tabel 2.23 Ruang Kelas dengan Kondisi Baik Tahun 2018-2022 di Kabupaten Tulang Bawang	II-76
Tabel 2.24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-78
Tabel 2.25 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-79

Tabel 2.26	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-80
Tabel 2.27	Perkembangan Jumlah Pasien RSUD Menggala Tahun 2019-2023	II-81
Tabel 2.28	Indikator Pelayanan Rawat Inap RSUD Menggala Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2.29	Rasio Dokter per satuan Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-82
Tabel 2.30	Rasio Perawat per Satuan Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-83
Tabel 2.31	Rasio bidan per Satuan Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-84
Tabel 2.32	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-86
Tabel 2.33	Cakupan Kampung/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-87
Tabel 2.34	Cakupan Balita Gizi buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2.35	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-90
Tabel 2.36	Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan di Kabupaten Tulang Bawang	II-91
Tabel 2.37	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-92
Tabel 2.38	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-93
Tabel 2.39	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber	

Penerangan Utama Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-94
Tabel 2.40 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-94
Tabel 2.41 Sebaran Kawasan kumuh Tahun 2022 di Kabupaten Tulang Bawang	II-95
Tabel 2.42 Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan di Kabupaten tulang Bawang tahun 2022	II-96
Tabel 2.43 Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2019-2023.....	II-98
Tabel 2.44 Perkembangan Jumlah LSM dan Ormas Tahun 2019-2023	II-99
Tabel 2.45 Banyaknya Tempat Peribadahan Tahun 2019-2023.....	II-101
Tabel 2.46 Perkembangan Jumlah Jama'ah Haji Asal Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-102
Tabel 2.47 Capaian Indikator Penyelenggaraan Bidang Sosial Tahun 2022-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-103
Tabel 2.48 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Tahun 2019-2023.....	II-108
Tabel 2.49 Penduduk Perumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-109
Tabel 2.50 Banyaknya Tenaga Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023.....	II-110
Tabel 2.51 Jenis Pelatihan Keterampilan dan Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih Tahun 2018-2022	II-110
Tabel 2.52 Perkembangan Jumlah TKI Asal Tulang Bawang Menurut Negara Tujuan Tahun 2019-2023.....	II-111
Tabel 2.53 Perkembangan Ketersediaan Pangan Utama, Energi, dan Protein Tahun 2018-2022	II-117

Tabel 2.54	Perkembangan Perusahaan yang Memiliki AMDAL, IPAL dan UKL/UPL Tahun 2018-2022	II-120
Tabel 2.55	Jumlah layanan kependudukan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2019 – 2023	II-123
Tabel 2.56	Hasil Pembangunan Dana Desa Tahun 2021-2023	II-125
Tabel 2.57	Capaian Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023	II-127
Tabel 2.58	Perkembangan Jumlah Kendaraan Yang Uji Kendaraan Tahun 2019-2023	II-128
Tabel 2.59	Perkembangan Jumlah Sumbangan Pendapatan Dari Pos Uji Kendaraan Tahun 2019–2023	II-129
Tabel 2.60	Perkembangan Surat Kabar Nasional/Lokal, Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Nasional/Lokal di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-130
Tabel 2.61	Perkembangan Jumlah Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-133
Tabel 2.62	Jumlah Penerbitan dan Non Perizinan Tahun 2022 dan Tahun 2023	II-135
Tabel 2.63	Jumlah Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-146
Tabel 2.64	Jumlah Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-148
Tabel 2.65	Populasi Ternak di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-149
Tabel 2.66	Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019-2023 Kabupaten Tulang Bawang	II-150
Tabel 2.67	Perkembangan Sarana Perdagangan Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-152

Tabel 2.68	Jumlah Industri Kecil Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-154
Tabel 2.69	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2018-2021 Kabupaten Tulang Bawang	II-166
Tabel 2.70	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005 - 2022	II-167
Tabel 2.71	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang	II-169
Tabel 2.72	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tulang Bawang	II-170
Tabel 2.73	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Tulang Bawang	II-171
Tabel 2.74	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Tulang Bawang	II-172
Tabel 2.75	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Tulang Bawang	II-173
Tabel 2.76	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Tulang Bawang	II-174
Tabel 2.77	Timbulan Sampah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-175
Tabel 2.78	Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-176
Tabel 2.79	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Tulang Bawang	II-177
Tabel 2.80	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang	II-178
Tabel 2.81	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang	II-179
Tabel 2.82	Arahan Pengembangan Wilayah	II-181
Tabel 3.1	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pendidikan	III-9

Tabel 3.2	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kesehatan	III-11
Tabel 3.3	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	III-13
Tabel 3.4	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..	III-18
Tabel 3.5	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	III-21
Tabel 3.6	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Sosial	III-23
Tabel 3.7	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Tenaga Kerja	III-24
Tabel 3.8	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III-25
Tabel 3.9	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pangan	III-27
Tabel 3.10	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Lingkungan Hidup	III-28
Tabel 3.11	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III-30
Tabel 3.12	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-31
Tabel 3.13	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana ..	III-33
Tabel 3.14	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perhubungan	III-34
Tabel 3.15	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	

	Bidang Komunikasi dan Informatika.....	III-35
Tabel 3.16	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	III-36
Tabel 3.17	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Penanaman Modal	III-38
Tabel 3.18	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	III-39
Tabel 3.19	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Statistik	III-40
Tabel 3.20	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perpustakaan.....	III-40
Tabel 3.21	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kearsipan.....	III-41
Tabel 3.22	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perikanan	III-42
Tabel 3.23	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pariwisata	III-43
Tabel 3.24	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pertanian	III-44
Tabel 3.25	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perdagangan	III-47
Tabel 3.26	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perindustrian	III-49
Tabel 3.27	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan.....	III-50
Tabel 4.1	Penyusunan Penjelasan Visi	IV-8
Tabel 4.2	Sasaran Visi Kabupaten Tulang Bawang.....	IV-10
Tabel 4.3	Tujuh Belas Arah (Tujuan) Pembangunan.....	IV-15
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Misi ke- 1	V-2

Tabel 5.2	Arah Kebijakan Misi ke- 2	V-5
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Misi ke- 3	V-6
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Misi ke- 4	V-7
Tabel 5.5	Arah Kebijakan Misi ke- 5	V-9
Tabel 5.6	Arah Kebijakan Misi ke- 6	V-10
Tabel 5.7	Arah Kebijakan Misi ke- 7	V-11
Tabel 5.8	Arah Kebijakan Misi ke- 8	V-12
Tabel 5.9	Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	V-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya.....	I-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang.....	II-2
Gambar 2.2	Rasio Luas Wilayah Kecamatan Terhadap Total Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang	II-3
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang	II-5
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Tulang Bawang	II-7
Gambar 2.5	Peta DAS Kabupaten Tulang Bawang.....	II-8
Gambar 2.6	Peta Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang	II-10
Gambar 2.7	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tulang Bawang.....	II-11
Gambar 2.8	Peta Daya Dukung Fungsi Lindung.....	II-13
Gambar 2.9	Peta Daya Dukung Air Permukaan.....	II-15
Gambar 2.10	Peta Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang.....	II-18
Gambar 2.11	Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Tulang Bawang.....	II-20
Gambar 2.12	Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Tulang Bawang.....	II-22
Gambar 2.13	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tulang Bawang.....	II-23
Gambar 2.14	Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Tulang Bawang.....	II-24
Gambar 2.15	Grafik Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.....	II-25

Gambar 2.16	Grafik Indeks Risiko Bencana (IRB)	
	Kabupaten Tulang Bawang.....	II-25
Gambar 2.17	Peta Rencana Pola Ruang	
	Kabupaten Tulang Bawang.....	II-34
Gambar 2.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten	
	Tulang Bawang Tahun 2019-2023 (jiwa)	II-35
Gambar 2.19	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan	
	di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023	
	(jiwa/km ²)	II-36
Gambar 2.20	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten	
	Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-37
Gambar 2.21	Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Menurut	
	Struktur Usia/Kelompok Umur Tahun 2023.....	II-37
Gambar 2.22	Piramida Penduduk Kabupaten Tulang Bawang	
	Menurut Kelompok Umur	II-38
Gambar 2.23	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten	
	Tulang Bawang dan Provinsi Lampung	
	Tahun 2019-2023	II-41
Gambar 2.24	PDRB Per Kapita Kabupaten Tulang Bawang	
	Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023	
	(dalam juta rupiah)	II-42
Gambar 2.25	Garis Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang	
	Tahun 2019-2023	II-45
Gambar 2.26	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten	
	Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-46
Gambar 2.27	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten	
	Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-47
Gambar 2.28	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten	
	Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-47
Gambar 2.29	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)	

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023 (tahun).....	II-49
Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2019-2023	II-54
Gambar 2.31 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019-2023	II-55
Gambar 2.32 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-56
Gambar 2.33 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2019-2023	II-63
Gambar 2.34 Angka Rata-Rata Lama sekolah Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-65
Gambar 2.35 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang	II-69
Gambar 2.36 Indkes Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulang Bawang	II-104
Gambar 2.37 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang	II-106
Gambar 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-107
Gambar 2.39 Perkembangan Perusahaan yang memiliki AMDAL, IPAL dan UKL/UPL Tahun 2019-2023	II-120
Gambar 2.40 Grafik Jumlah perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis di Kabupaten Tulang Bawang	II-146
Gambar 2.41 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 (persen)..	II-163
Gambar 2.42 Grafik Timbulan Sampah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023	II-176
Gambar 2.43 Peta Rencana Struktur Ruang	II-180
Gambar 2.44 Peta Rencana Pola Ruang	II-180
Gambar 2.45 Peta Rencana Kawasan Strategis	II-181

Gambar 3.1	Megatren Global.....	III-2
Gambar 4.1	Visi Indonesia Emas 2045.....	IV-1
Gambar 4.2	Transformasi dan Agenda Pembangunan Indonesia Emas 2045	IV-3
Gambar 4.3	Tujuh Belas Arah (Tujuan) Pembangunan Indonesia Emas 2045	IV-3
Gambar 4.4	Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045	IV-4
Gambar 4.5	Kerangka Berfikir Visi dan Misi Lampung 2045	IV-6
Gambar 4.6	Pentahapan Pembangunan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045	IV-7
Gambar 4.7	Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang ..	IV-12
Gambar 5.1	Pentahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang 2025-2045	V-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan juga mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, semangat pembangunan nasional 20 (dua puluh) tahun ke depan disusun dengan paradigma baru yaitu transformasi secara menyeluruh serta kolaborasi seluruh elemen bangsa menuju **“Indonesia Emas 2045”** yang mengusung visi **“Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2045.

Secara prosesnya, perumusan dan penyusunan RPJPD menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas.

- a. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Pendekatan teknokratis pada penyusunan RPJPD ini digunakan untuk evaluasi kinerja pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan pengolahan data dan informasi, gambaran umum kondisi daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang, penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Kabupaten. Forum konsultasi publik merupakan salah satu bentuk pendekatan partisipatif yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan. Perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok merupakan bentuk penjabaran dari pendekatan politik, yang juga diperkuat melalui penyelarasan dalam forum musrenbang RPJPD dengan menggunakan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali tentang Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian

- Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

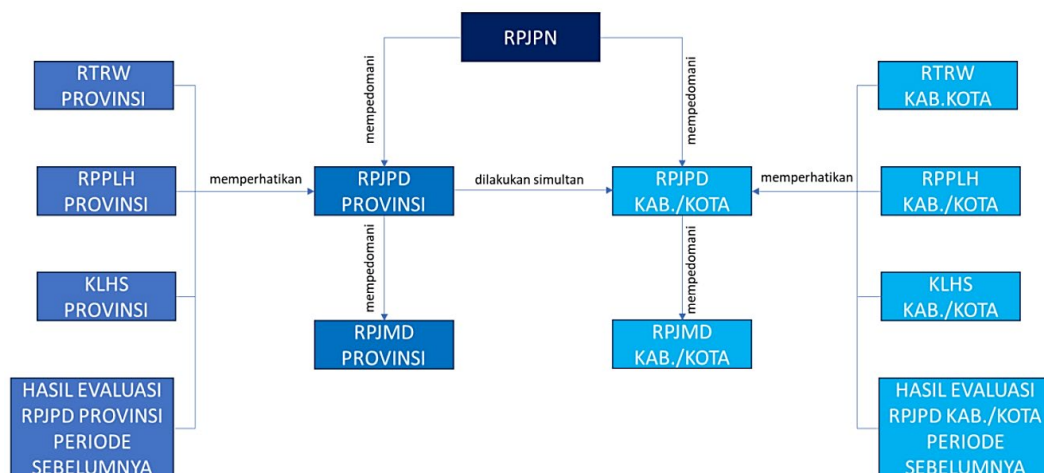
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;
25. Surat Menteri Dalam Negeri 600.11.2/8755/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam Dokumen RPJPD/RPJMD;
26. Surat Edaran Bersama Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah kedalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunan RPJPD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung. RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung dipedomani dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 untuk menyelaraskan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional dan provinsi. Pada penyusunan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 juga harus dengan memperhatikan RTRW Kabupaten, RPLH Kabupaten, KLHS Kabupaten dan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten periode sebelumnya melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah.

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

1.4. Maksud Dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025 – 2045 ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, Masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan visi serta misi Kabupaten Tulang Bawang;
2. Untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045, diantaranya:

1. Menetapkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tulang Bawang;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah;
4. Memberikan arah pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing, Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis

Memuat Isu Strategis dan Permasalahan Daerah.

BAB IV. Visi dan Misi Daerah

Memuat Visi daerah tahun 2025-2045 dan Misi daerah tahun 2025-2045.

BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Memuat Arah kebijakan per-Lima Tahunan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 (17 Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah dan 45 Indikator Utama Pembangunan).

BAB VI. Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan RPJPD 2025-2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu dari 15 (lima belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, dengan Ibu Kota Menggala. Secara yuridis, status Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu daerah kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan Provinsi Lampung ditetapkan pada tanggal 20 Maret 1997 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka terjadi pemekaran 2 (dua) daerah otonomi baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang sebagai Kabupaten Induk.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

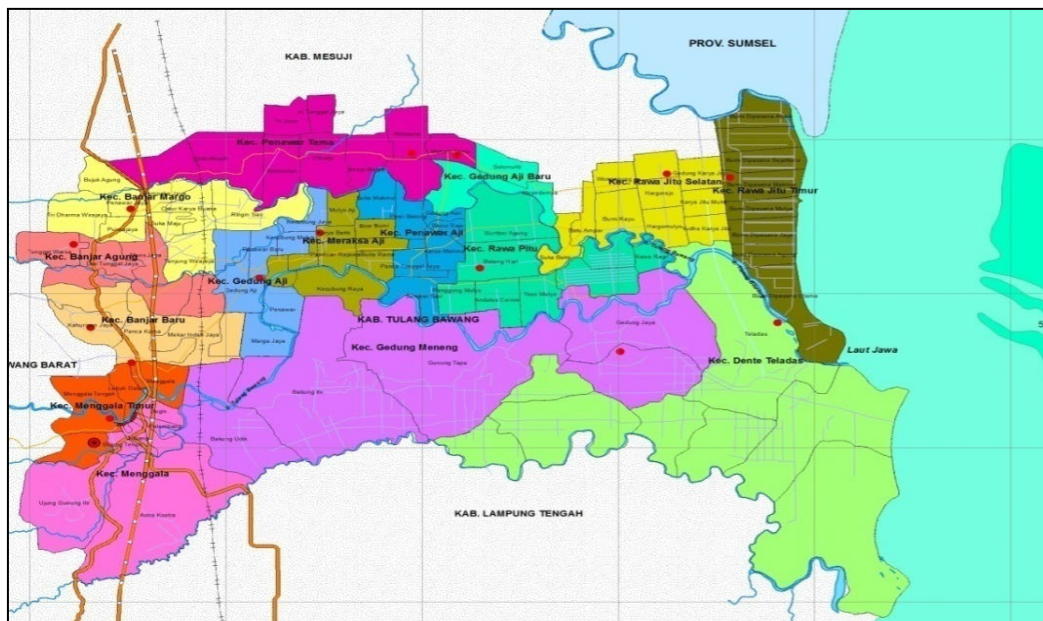
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Batas wilayah administratif Kabupaten Tulang Bawang adalah berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji;
- b. Sebelah Timur dengan Laut Jawa;
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Lampung Tengah, dan;
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan yaitu Kecamatan Banjar Agung, Banjar Margo, Gedung Aji, Penawar Aji, Meraksa Aji, Menggala, Penawartama, Rawajitu Selatan, Gedung Meneng, Rawajitu Timur, Rawa Pitu, Gedung Aji Baru, Dente Teladas, Banjar Baru, dan Menggala Timur.

Gambar 2.1 Peta Admininstrasi Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

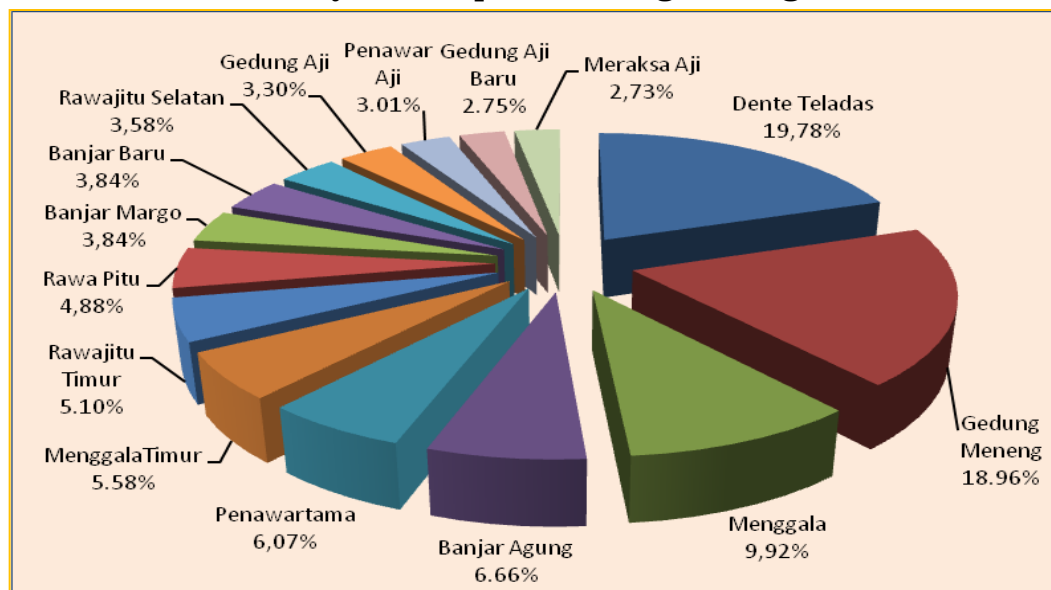
Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang adalah 3.116,062 km². Kecamatan Dente Teladas merupakan kecamatan terluas dengan luas 685,65 Km² atau 19,78 persen dari luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Meraksa Aji dengan luas wilayah 94,71 km² atau 2,73 persen dari luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang secara administratif terdiri dari 15 kecamatan dengan jumlah kampung/kelurahan sebanyak 147 kampung dan 4 kelurahan, 828 Rukun Warga (RW) serta 3.277 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi, Luas Wilayah dan Jumlah Kampung/Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang

NO	KECAMATAN	LUAS KECAMATAN (Km ²)	RASIO TERHADAP LUAS KABUPATEN	JUMLAH KAMPUNG/KELURAHAN	IBUKOTA
1	Banjar Agung	230,88	6,66	11	Banjar Agung
2	Banjar Margo	132,95	3,84	12	Agung Dalem
3	Gedung Aji	114,47	3,30	10	Gedung Aji
4	Penawar Aji	104,45	3,01	9	Gedung Rejo Sakti
5	Meraksa Aji	94,71	2,73	8	Panduan Rajawali
6	Menggala	344,00	9,92	9	Ujung Gunung
7	Penawartama	210,53	6,07	14	Bogatama
8	Rawajitu Selatan	123,94	3,58	9	Medasari
9	Gedung Meneng	657,07	18,96	11	Gedung Meneng
10	Rawajitu Timur	176,65	5,10	8	Bumi Dipasena Mulya
11	Rawa Pitu	169,18	4,88	9	Batanghari
12	Gedung Aji Baru	95,36	2,75	9	Sidomukti
13	Dente Teladas	685,65	19,78	12	Teladas
14	Banjar Baru	132,95	3,84	10	Kahuripan Jaya
15	Menggala Timur	193,53	5,58	10	Lebuh Dalem
Kabupaten Tulang Bawang		3.116,062	100,00	151	Menggala

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

Gambar 2.2 Rasio Luas Wilayah Kecamatan Terhadap Total Luas Wilayah Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang terletak antara posisi 04°08' sampai 04°41' Lintang Selatan dan 105°09' sampai 105° 55' Bujur Timur, yang terletak di bagian hilir dari dua sungai besar yaitu Way Mesuji dan Way Tulang Bawang serta bermuara di Laut Jawa yang berada di bagian timur wilayah Tulang Bawang. Mengingat letaknya yang berada di antara 0 - 10° Lintang Selatan maka Kabupaten Tulang Bawang seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia juga merupakan daerah beriklim tropis.

3. Topografi

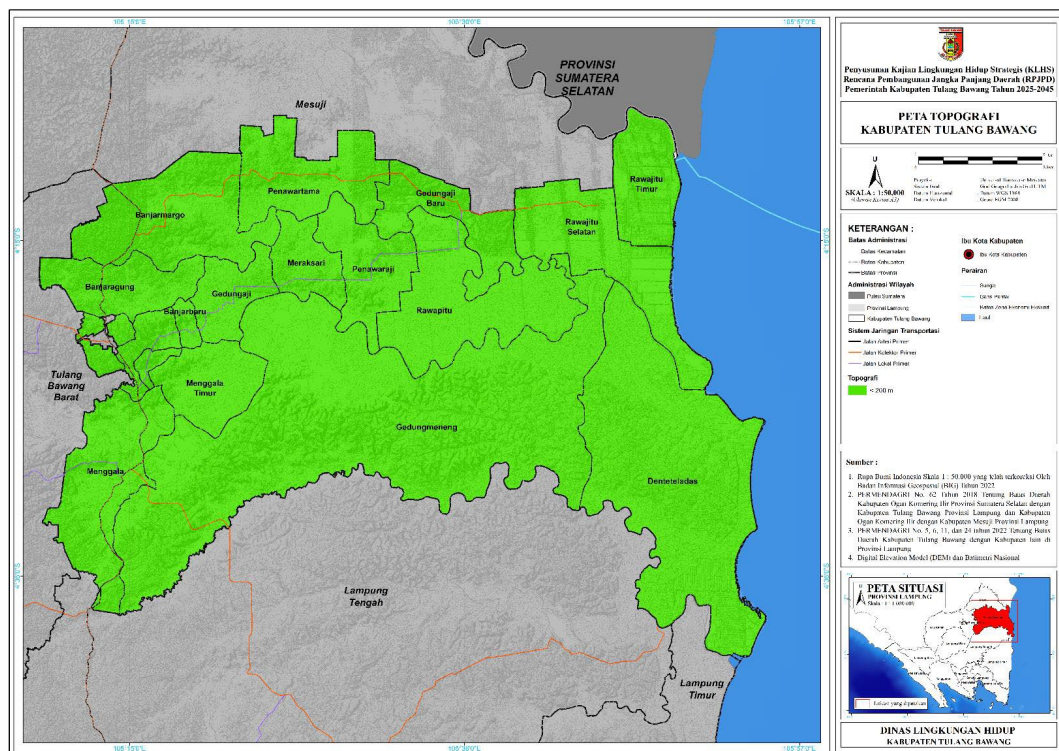
Secara topografi, Kabupaten Tulang Bawang dapat dibagi menjadi 4 (empat) daerah yaitu:

- 1) Daerah dataran (landai), yang merupakan daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang, berada pada kemiringan antar 15%-30% yang dimanfaatkan area pertanian, perkebunan dan cadangan pengembangan transmigrasi.
- 2) Daerah rawa, terdapat di sepanjang Pantai Timur dengan ketinggian 0-1 m yang merupakan muara dari Way Tulang Bawang dan Way Mesuji. Rawa-rawa tersebut terdapat di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan dan Kecamatan Dente Teladas. Daerah-daerah tersebut merupakan areal yang cukup produktif untuk pengembangan budidaya tambak dan perikanan laut.
- 3) Daerah *River Basin*, Terdapat 2 River Basin yang utama yaitu River Basin Tulang Bawang dan River Basin sungai-sungai kecil lainnya. Daerah ini berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air pada musim penghujan membentuk rawa-rawa atau lebung-lebung. Pada areal River Basin Way Tulang Bawang dengan anak-anak sungainya membentuk pola aliran *dendritic*.

Daerah ini memiliki luas 10.150 Km² dengan panjang 753 Km yang digunakan untuk pengembangan tambak udang.

- 4) Daerah *alluvial*, meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (*down steem*) dari sungai-sungai besar yaitu Way Tulang Bawang dan Way Mesuji yang dimanfaatkan untuk pelabuhan dan areal persawahan pasang surut.

Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: KLHS Kab. Tulang Bawang 2025-2045

4. Geologi

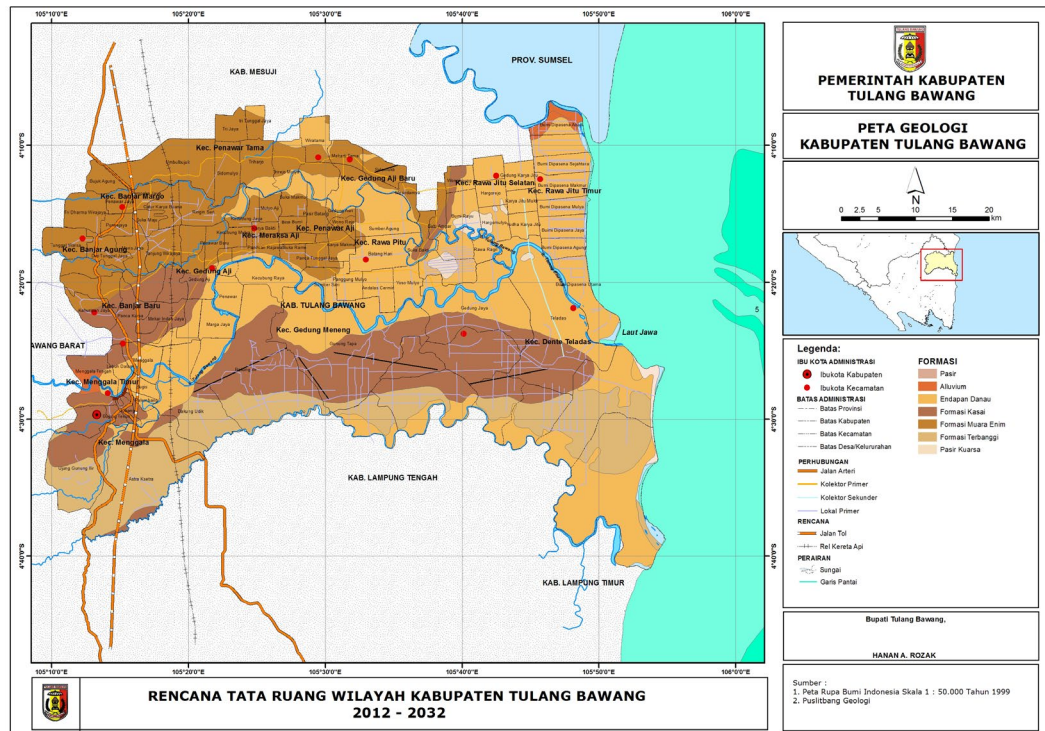
Berdasarkan peta Geologi Lembar Menggala, 1985 (Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, P3G, Bandung), diketahui wilayah Tulang Bawang secara geologis tersusun oleh batu-batuan dari berbagai unsur, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, diantaranya adalah:

1. Endapan Rawa (Qs) : terutama terdiri material lumpur, lanau, dan pasir. Endapan rawa ini dijumpai di sepanjang pantai timur,

kiri kanan daerah aliran Way Tulang Bawang. Secara administrasi termasuk wilayah Kecamatan Rawajitu Timur, Rawajitu Selatan, Gedung Meneng dan sekitar Penawar Tama;

2. Endapan Aluvial (Qa) : terdiri dari material kerakal, kerikil, pasir, lempung dan gambut. Penyebaran endapan aluvial ini terutama terdapat di daerah dataran dan di sekitar aliran sungai;
3. Pasir Kwarsa (Qak) : Pasir kasar kerikil sampai sedang, lepas, penyusun dominan mineral kwarsa. Penyebarannya setempat-setempat yaitu sekitar Gedung Jaya, Rawa Ragil, Hargo Mulyo, Bumiratu wilayah Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas sekitar aliran Way Palembang anak sungai Way Seputih;
4. Formasi Terbanggi (Qpt): terdiri dari batu pasir dengan sisipan batu lempung. Formasi batuan ini diantaranya ditemui di sebagian wilayah Gedung Meneng dan Rawajitu Selatan;
5. Formasi Kasai (Qtk) : terdiri dari tuf, batu lempung tufaan, batu lempung, batu pasir dan konglomerat. Formasi ini ditemui setempat-setempat dengan penyebaran yang luas, disekitar wilayah Gedung Aji, Menggala, Penawar Tama, dan Banjar Agung;
6. Formasi Muara Enim (Tmptm) : terdiri dari perselingan batu lempung pasir dan batu lanau, tufaan dengan sisipan batu pasir tufaan, dan batu lempung hitam. Terutama dijumpai dibagian utara wilayah Kabupaten Tulang Bawang sekitar Penawar Tama, Banjar Margo dan Banjar Agung.

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Tulang Bawang



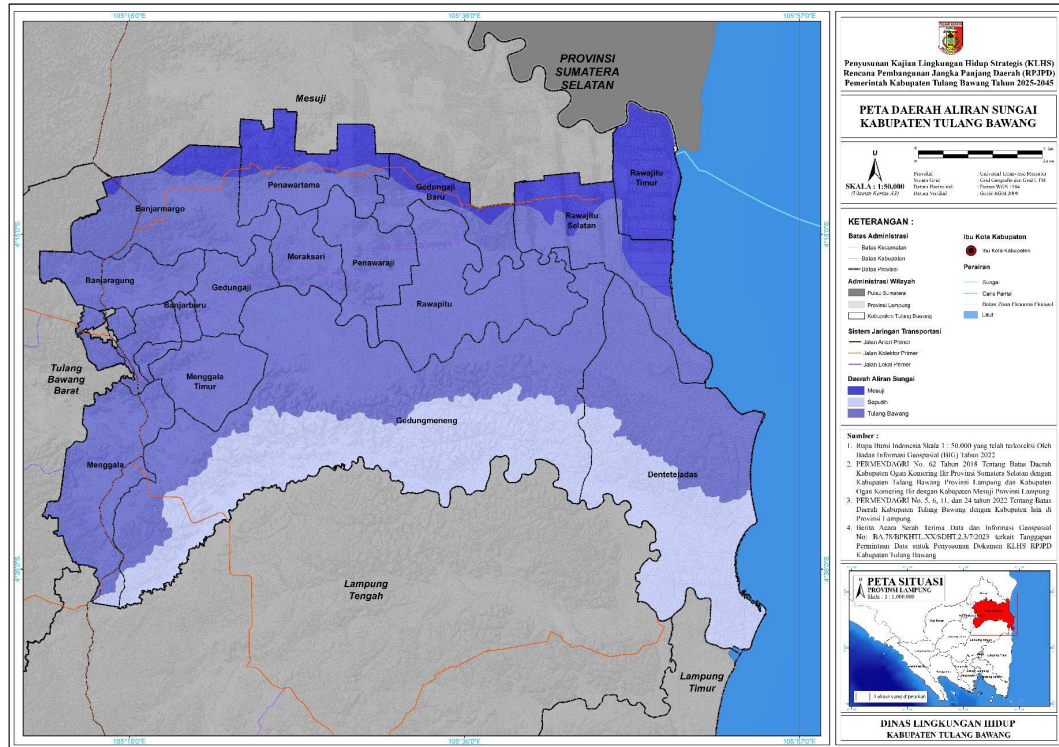
Sumber: RTRW Kab. Tulang Bawang

Secara garis besar tanah di wilayah Tulang Bawang dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) jenis tanah (Masterplan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang, 2008), yaitu : *Dystropepts*, *haplodux*, *hydraquents*, *kanka pludults*, *sulfaquents*, *sulfihemists*, *tropaquents*, *tropaqueps* dan *tropop samment*.

5. Hidrologi

Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi yang tinggi untuk perkembangan sektor pertanian sebab sebagian besar sungai-sungai yang mengalir dari barat ke timur berpotensi untuk pengembangan irigasi, sungai-sungai yang dimaksud adalah Way Tulang Bawang. Way Tulang Bawang merupakan sungai yang membelah dari barat ke timur di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, dengan panjang 136 Km dan daerah alir 1.285 km².

Gambar 2.5 Peta DAS Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: KLHS Kab. Tulang Bawang 2025-2045

Secara umum, kondisi sistem hidrologi di suatu daerah dapat ditinjau dari kajian Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi pegunungan/perbukitan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara kesungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal.

Tabel 2.2 Panjang Sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang

No.	Nama DAS	Panjang (Km)	Luas (Ha)
I.	Way Tulang Bawang	46.00	934.400
1.	Way Kiri	20.00	125.400
2.	Way Rarem	28.00	9.700
3.	Way Abung	22.00	17.800
4.	Way Sabuk	4.00	17.100
5.	Way Kanan	59.00	167.600
6.	Way Besai	89.00	27.200

No.	Nama DAS	Panjang (Km)	Luas (Ha)
7.	Way Umpu	46.00	5.300
8.	Way Pisang	5.00	20.500
9.	Way Giham	18.00	50.400
10.	Way Neki	10.00	21.200
11.	Way Tahmi	24.00	22.700

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

6. Klimatologi

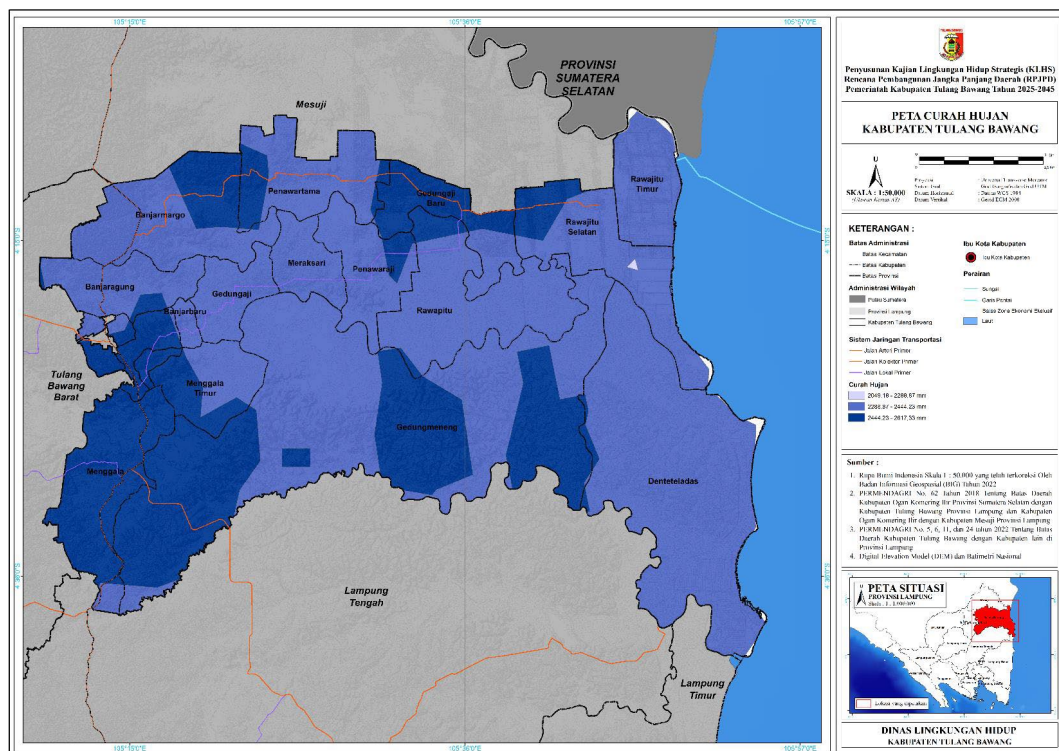
Kabupaten Tulang Bawang beriklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau berganti sepanjang tahun, temperatur rata-rata 31°C. Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah amat basah, dengan perbandingan devisit air 0-1,5 bulan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa budidaya sawah dengan harapan produksi sedang atau kurang optimal, atau apabila diusahakan secara luas memerlukan usaha dan pertimbangan ketat dalam menentukan jadwal tanamannya. Guna mendapatkan keandalan dalam budidaya sawah perlu dikembangkan jenis padi lokal dengan suplai air berasal dari tadah hujan.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah yang mengalami siklus musiman dengan dominasi kondisi basah dimana bulan Desember merupakan bulan terbasah di Kabupaten Tulang Bawang. Daerah basah terdapat di bagian Barat atau hulu sungai, sedangkan daerah yang kering terdapat di bagian Timur mendekati pantai. Kondisi topografi Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya hamparan rawa di daerah sepanjang aliran sungai sebelah hulu yang mengindikasikan adanya sistem drainase alam yang kurang baik secara permanen.

Ketersediaan air yang paling rendah di Kabupaten Tulang Bawang terjadi pada bulan Juli dan Agustus sehingga pada bulan-bulan

tersebut pada umumnya terjadi kekeringan khususnya di wilayah pantai. Kondisi ini mempengaruhi kualitas air setempat terutama pada kualitas air sungai yang ditandai dengan adanya intrusi air laut yang semakin ke hulu. Hal ini akan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi peri kehidupan masyarakat dan tata kehidupan flora dan fauna.

Gambar 2.6 Peta Curah Hujan Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: KLHS Kab. Tulang Bawang 2025-2045

7. Tutupan Lahan

Tutupan lahan yang paling mendominasi di Kabupaten Tulang Bawang adalah tutupan lahan kawasan pertanian. Berdasarkan RPIJM Kabupaten Tulang Bawang bahwa pada sektor pertanian, potensi lahan pertanian yang ada yaitu 149.420 Ha, terdiri dari lahan basah 47.315 Ha dan lahan kering 102.104 Ha. Produktivitas pada sektor pertanian rata-rata setiap tahunnya cukup signifikan dan mengisyaratkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang sampai saat

Gambar 2.7 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tulang Bawang



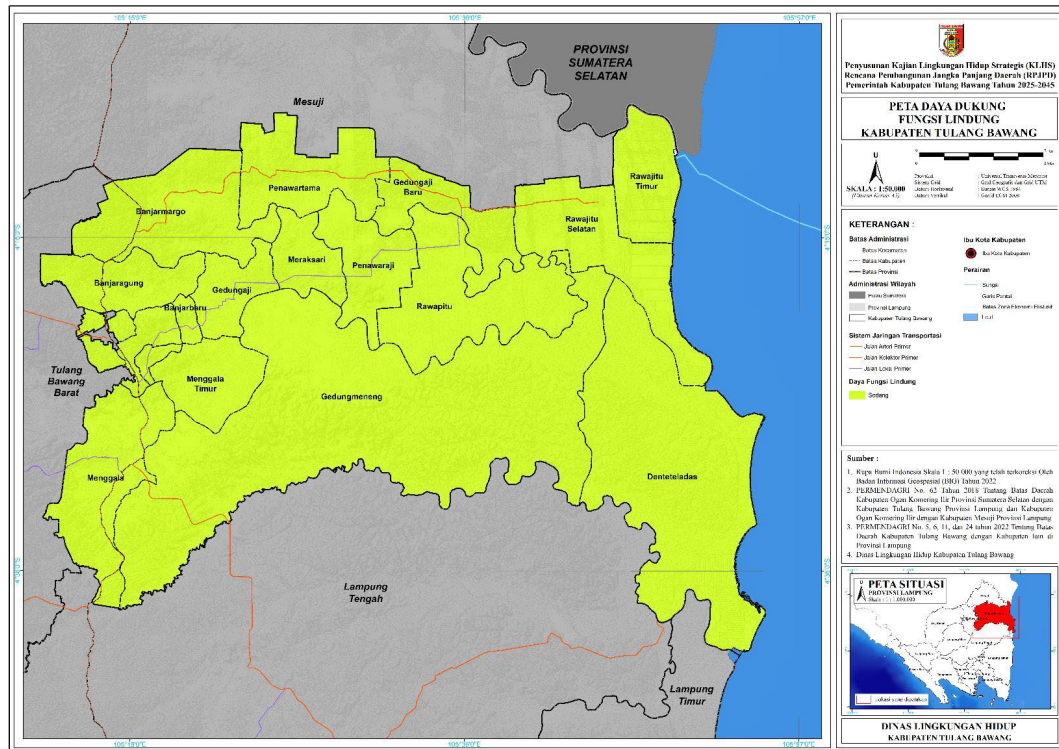
8. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

a) Kondisi Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung Kabupaten Tulang Bawang diketahui berdasarkan tutupan lahan Kabupaten Tulang Bawang untuk mendapatkan analisa terhadap daya dukung fungsi lindung. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung di Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas $\pm$ 13.008 Ha yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya dan badan air.

Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014, daya dukung fungsi lindung mempunyai rentang nilai antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai tersebut maka diketahui bahwa fungsi lindung semakin baik dan begitupun sebaliknya yaitu semakin rendah nilainya maka fungsi lindung semakin buruk. Mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup KLH tahun 2014 dan menggunakan data peruntukan lahan eksisting Kabupaten Tulang Bawang maka didapatkan nilai daya dukung fungsi lindung sebesar 0,41 dimana jika dilihat dari tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung masih berada pada klasifikasi sedang.

Gambar 2.8 Peta Daya Dukung Fungsi Lindung



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

b) Kondisi Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung wilayah untuk permukiman dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. Analisis daya dukung (Carrying Capacity Ratio/CCR) dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh para perencana dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktivitas yang ada di wilayah yang bersangkutan. Mengetahui tingkat dukungan dari suatu area/lahan sangat penting bagi seorang perencana pembangunan, karena ia akan bisa memperkirakan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi atau memperkirakan tingkat kebutuhan penduduk yang disesuaikan dengan kondisi lahan yang ada.

Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah ada sebelumnya maka luas lahan terbangun di Kabupaten Tulang Bawang seluas

22.034,89 ha. Sedangkan luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan maka luas lahan terbangun menjadi seluas 26.441,87 ha. Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perdesaan dan perkotaan), maka dihasilkan daya dukung lahan terbangun sebesar 7,87.

Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Tulang Bawang masih dalam kondisi baik dengan nilai DDLB > 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang masih memiliki daya tampung bangunan yang cukup untuk pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.

c) Kondisi Status Daya Dukung Air Permukaan

Daya dukung air permukaan suatu wilayah merupakan parameter yang yang memperlihatkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Hasil perhitungan kebutuhan air layak bagi penduduk Kabupaten Tulang Bawang menyebutkan bahwa ketersediaan air permukaan di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 6.908.432.776,802 m³/tahun. Berikut hasil perhitungan ketersediaan air yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

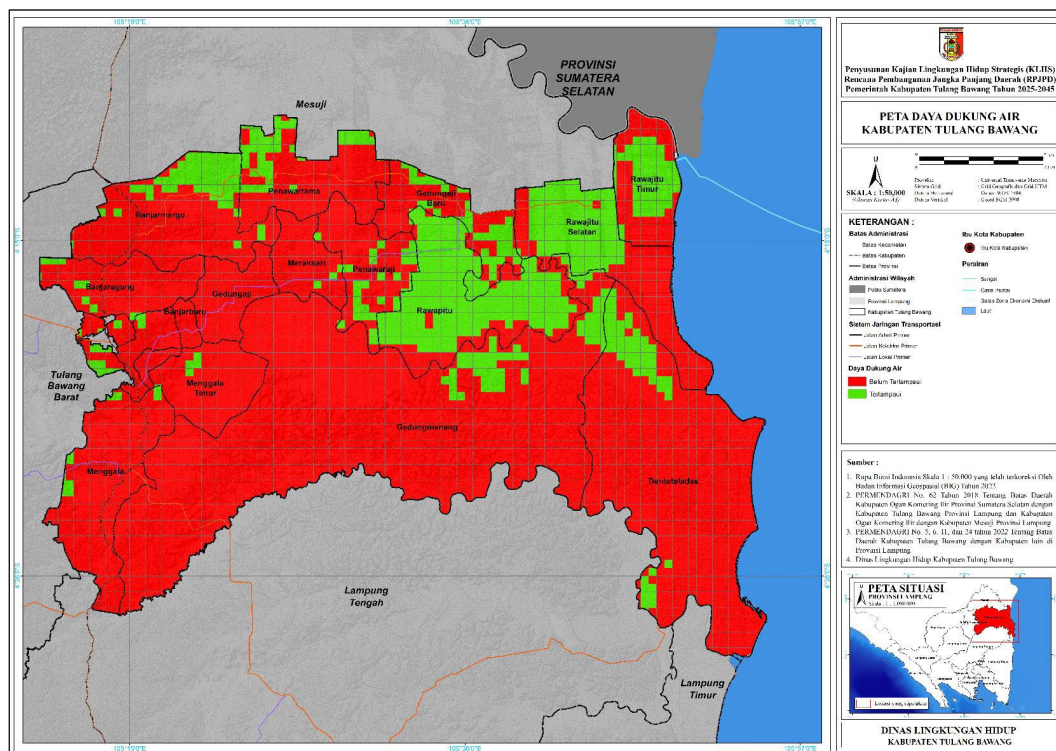
Tabel 2.3 Proyeksi Daya Dukung Daya Tampung Air Kabupaten Tulang Bawang

Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air (m³/tahun)	Ketersediaan Air (m³/tahun)	Rasio	Status
2023	433.106	779.590.800,00	6.908.432.776,80	8,86	Belum Terlampaui
2024	435.004	783.007.200,00		8,82	Belum Terlampaui
2025	436.902	786.423.600,00		8,78	Belum Terlampaui
2026	438.800	789.840.000,00		8,75	Belum Terlampaui
2027	440.699	793.258.200,00		8,71	Belum Terlampaui

Tahun Proyeksi	Proyeksi Penduduk	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Rasio	Status
2028	442.597	796.674.600,00		8,67	Belum Terlampaui

Sumber : Hasil Pengolahan Tim KLHS RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025- 2045

Gambar 2.9 Peta Daya Dukung Air Permukaan



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

d) Kondisi Status Daya Dukung Pangan

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang dapat diartikan sebagai suatu analisis perbandingan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand). Konsep ini mengacu pada keberlanjutan sistem pertanian dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini dan di masa depan. Daya dukung pertanian mencerminkan kapasitas ekosistem setempat untuk memberikan sumber daya yang diperlukan oleh pertanian, seperti tanah yang subur, air, dan iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman. Analisis supply and demand dalam konteks pertanian dapat melibatkan faktor-faktor

seperti luas lahan yang dapat digunakan, teknologi pertanian yang diterapkan, dan keberlanjutan praktik pertanian. Pentingnya perbandingan ini terletak pada pemahaman terhadap keseimbangan antara produksi pangan dan kebutuhan konsumen untuk memastikan bahwa pertanian lokal mampu memenuhi tuntutan pangan seiring dengan pertumbuhan populasi dan perubahan iklim.

Perhitungan daya dukung pertanian tanaman pangan ini pada dasarnya adalah perbandingan antara supply dan demand. Karena daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Daya dukung pangan di Kabupaten Tulang Bawang dilihat dari neraca beras diketahui bahwa ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022 masih cukup melimpah dengan surplus sebesar 136.101,81 ton/tahun.

Tabel 2.4 Perhitungan Produktivitas Lahan Kabupaten Tulang Bawang

No	Atribut	Hasil
1	Luas lahan panen (Ha)	52.602,00
2	Produktivitas lahan (ton/Ha/tahun)	5,33
3	Produktivitas (ton)	280.395,68
4	Produksi beras (konversi GKG ke beras 64,02%)	179.509,31
5	Jumlah penduduk (jiwa)	434.075
6	Angka Konsumsi Beras (ton/orang/tahun)	0,1
7	Jumlah beras dikonsumsi (ton)	43.407,50
8	Daya Dukung Pangan	4,14
9	Surplus beras (ton)	136.101,81

Sumber : Hasil Pengolahan Tim KLHS RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025- 2045

e) Kondisi Daya Dukung Lahan Permukiman

Daya dukung lahan permukiman merupakan parameter esensial dalam pemahaman tentang kemampuan suatu wilayah, seperti Kabupaten Lampung Timur, untuk menampung populasi penduduk secara berkelanjutan. Konsep ini secara teoritis

mencerminkan hubungan antara lahan yang tersedia dan kebutuhan permukiman masyarakat. Klasifikasi daya dukung lahan permukiman, dengan mempertimbangkan nilai DDPm (Daya Dukung Permukiman), dapat memberikan gambaran lebih mendalam:

1. Daya Dukung Lahan Permukiman Tinggi ($DDPm > 1$)

Ketika nilai DDPm melebihi satu, hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas lahan permukiman melebihi kebutuhan populasi saat ini. Wilayah dengan daya dukung tinggi mampu menampung jumlah penduduk yang lebih besar dan memberikan ruang untuk pertumbuhan perkotaan tanpa mengorbankan kualitas hidup atau layanan dasar.

2. Daya Dukung Lahan Permukiman Optimal ($DDPm = 1$)

Nilai DDPm yang sama dengan satu menunjukkan keseimbangan ideal antara luas lahan permukiman dan kebutuhan populasi. Wilayah dengan daya dukung optimal mampu memberikan tempat tinggal yang layak tanpa memberikan tekanan berlebihan pada sumber daya alam atau infrastruktur.

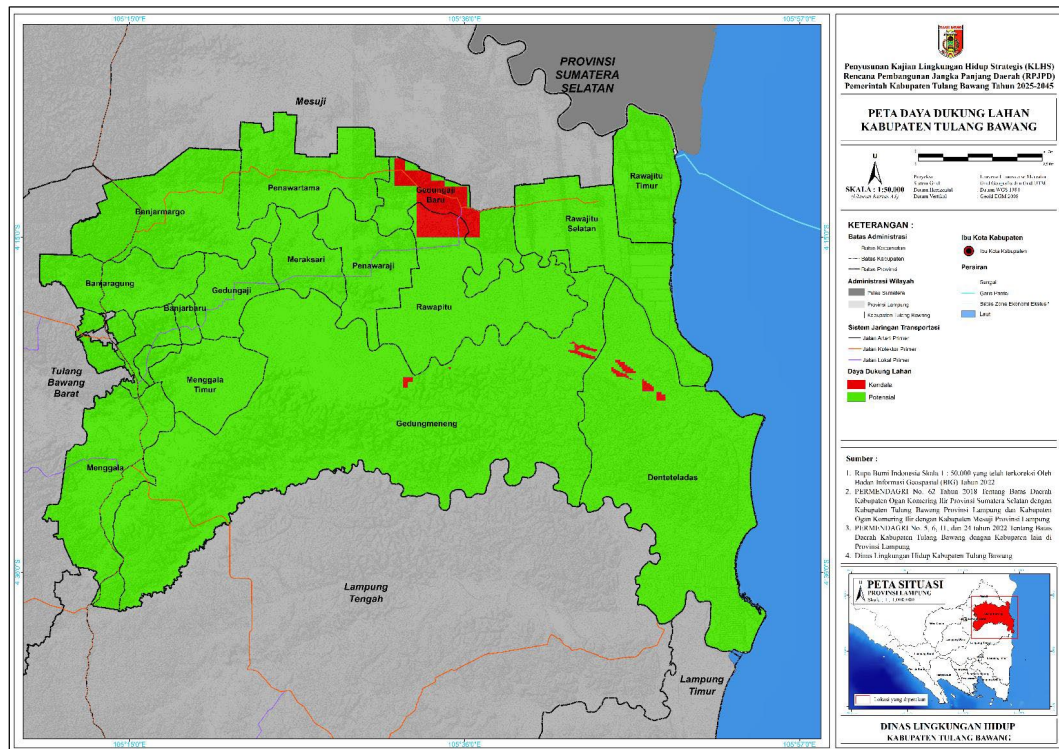
3. Daya Dukung Lahan Permukiman Rendah ($DDPm < 1$)

Apabila nilai DDPm kurang dari satu, hal ini menggambarkan bahwa kapasitas lahan permukiman tidak mencukupi untuk menampung jumlah penduduk yang ada. Wilayah dengan daya dukung rendah mungkin menghadapi tantangan terkait keterbatasan ruang, infrastruktur yang kurang memadai, atau tekanan lingkungan.

Pemahaman terhadap daya dukung lahan permukiman sangat penting dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah. Evaluasi yang cermat terhadap aspek ini dapat membantu mencegah masalah seperti kepadatan penduduk yang berlebihan, kemacetan, atau penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu,

pemantauan dan penilaian secara terus-menerus terhadap daya dukung lahan menjadi esensial untuk mendukung pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan.

Gambar 2.10 Peta Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

f) Kondisi Daya Tampung Lahan

Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau supply of land (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada tahun 2045 sebagai demand atau permintaan dari lahan (DL). Kebutuhan lahan per kecamatan dapat dihitung dari hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2045. Hasil akhir daya tampung lahan di dapat dari rasio SL/DL.

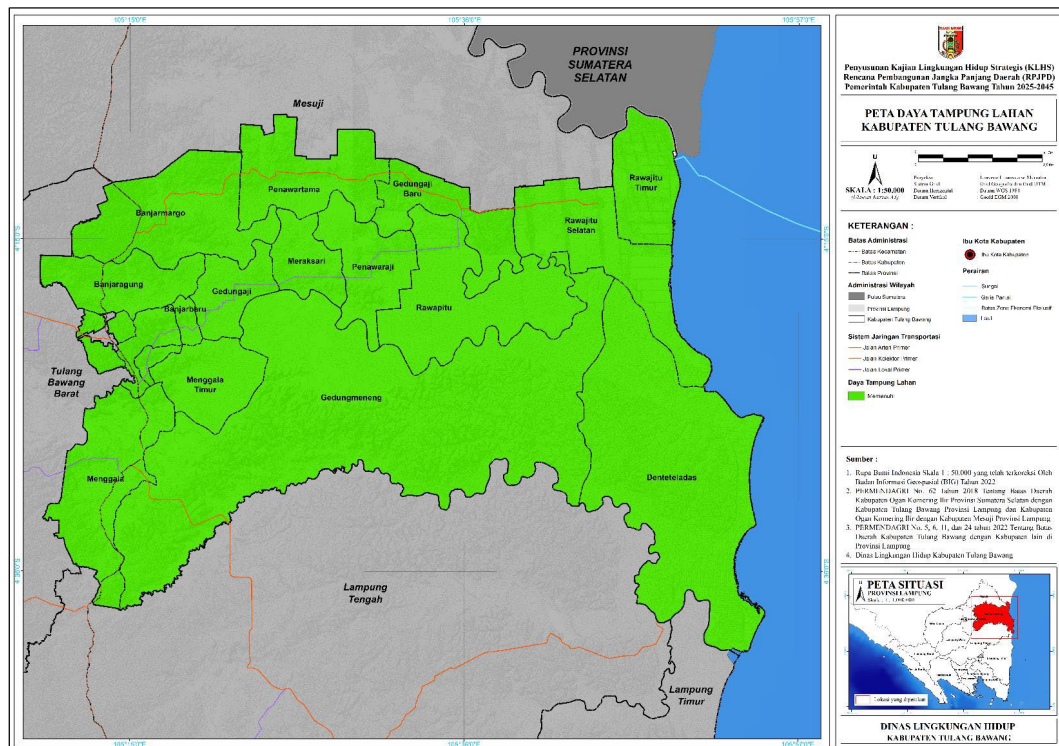
Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Bila $SL > DL$

daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat apa urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Jika $SL/DL > 1$, maka masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.
- Jika $SL/DL = 1$, maka masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun perlu diwaspadai karena jika pertambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung.
- Jika $SL/DL < 1$, maka wilayah ini sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Perlunya mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.

Kondisi daya tampung lahan merupakan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36 m².

Gambar 2.11 Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

g) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Perhitungan IKLH dilakukan jika semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) telah dihitung dan diketahui nilainya. Komponen indeks yang harus dihitung dan diketahui nilainya untuk perhitungan IKLH berdasarkan level wilayah yaitu: KLH kabupaten/kota meliputi IKA, IKU, dan IKL. Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan IKLH:

$$\text{IKLH Kabupaten} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

Tabel 2.5 Capaian IKLH Kabupaten Tulang Bawang

Indikator Kinerja	satuan	Capaian Kinerja		
		2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	56.67	50.00	50.00
Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	90.15	92.74	92.03
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	24.09	24.11	24.79
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	63.09	61.64	61.50

Sumber: IKLH Kabupaten Tulang Bawang

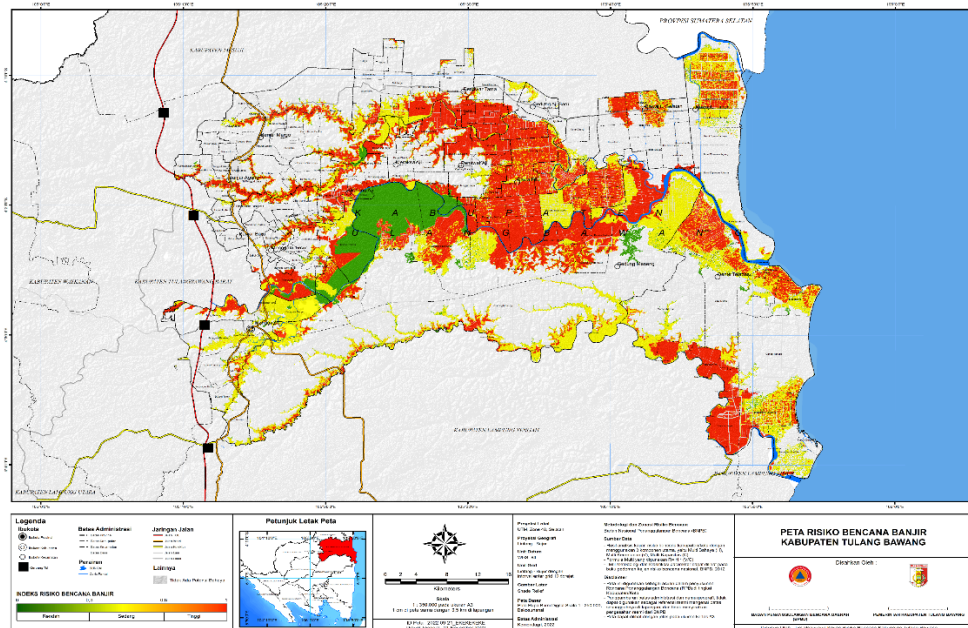
9. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kabupaten Tulang Bawang dengan bentang alam yang bervariasi, dibagi menjadi beberapa kawasan rawan bencana alam, yang meliputi :

a) Kawasan rawan banjir;

Risiko bencana banjir tinggi terdapat di 15 Kecamatan yang tersebar di 87 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Jumlah total desa/kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang adalah 151 desa/kelurahan dengan kelas risiko bencana banjir sedang tersebar di 48 desa/kelurahan dan kelas risiko bencana rendah tersebar di 16 desa/kelurahan. Total luasan wilayah yang mempunyai kelas risiko bencana banjir tinggi seluar 77.149 ha. Bencana banjir sering terjadi di wilayah tengah ke arah utara Kabupaten Tulang Bawang, terutama di Kecamatan Gedung Meneng, Dante Teladas, Rawa Pitu. Rata-rata banjir yang terjadi dikarenakan oleh luapan air sungai dan intensitas curah hujan tinggi yang berlangsung lama.

Gambar 2.12 Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tulang Bawang 2023-2027

b) Kawasan rawan cuaca ekstrem;

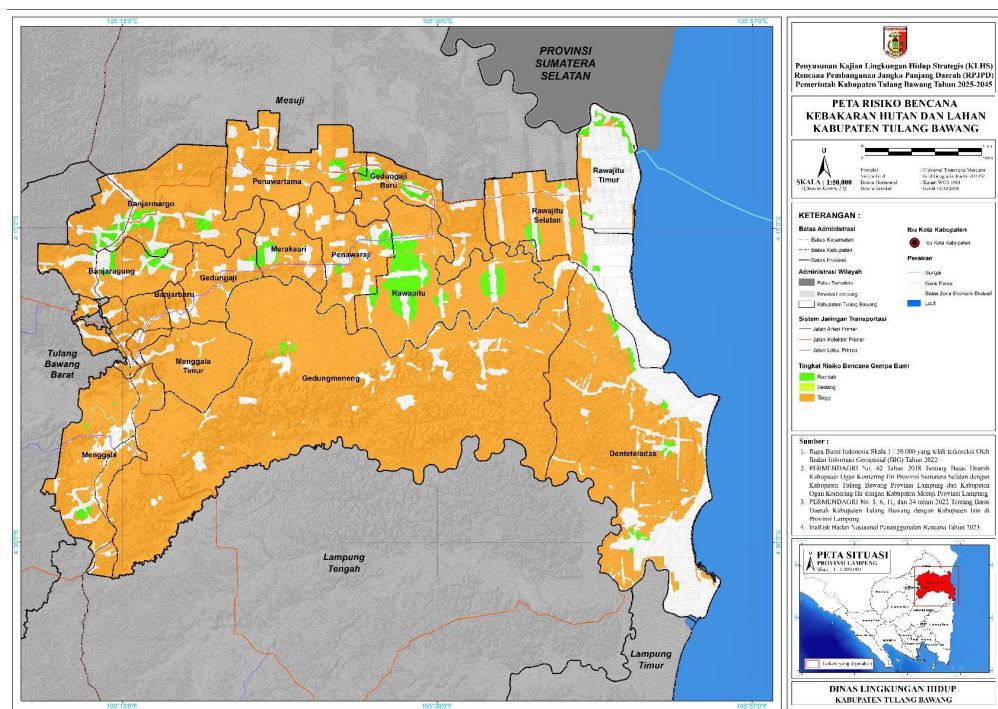
Risiko bencana cuaca ekstrem tersebar diseluruh desa/kelurahan dengan tingkat risiko bencana cuaca ekstrem sedang. Seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang termasuk dalam wilayah terdampak bencana cuaca ekstrem yaitu 151 desa/kelurahan. Cuaca ekstrem yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang berupa angin kencang. Dampak dari bencana ini sampai menyebabkan robohnya atap rumah warga dan merusak Lahan pertanian warga sekitar.

c) Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan;

Risiko bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada level kabupaten/kota, Kabupaten Tulang Bawang berada pada kelas sedang dimana potensi bencana ini tersebar di seluruh wilayah desa/kelurahan Kabupaten Tulang Bawang. Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Kabupaten Tulang Bawang, disebabkan karena musim kemarau yang berkepanjangan yang

membuat keadaan tanaman menjadi cukup kering sehingga sangat mudah terbakar dan sebagian besar kejadian terbakarnya lahan ini di karenakan aktifitas manusia yang sengaja membakar lahan perkebunan tebu agar memudahkan dalam pemanenan hasil dan meningkatkan kualitas hasil panen. Selain itu kebakaran terjadi akibat dari pembakaran rumput untuk menumbuhkan rumput baru sebagai makanan ternaknya.

Gambar 2.13 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Tulang Bawang



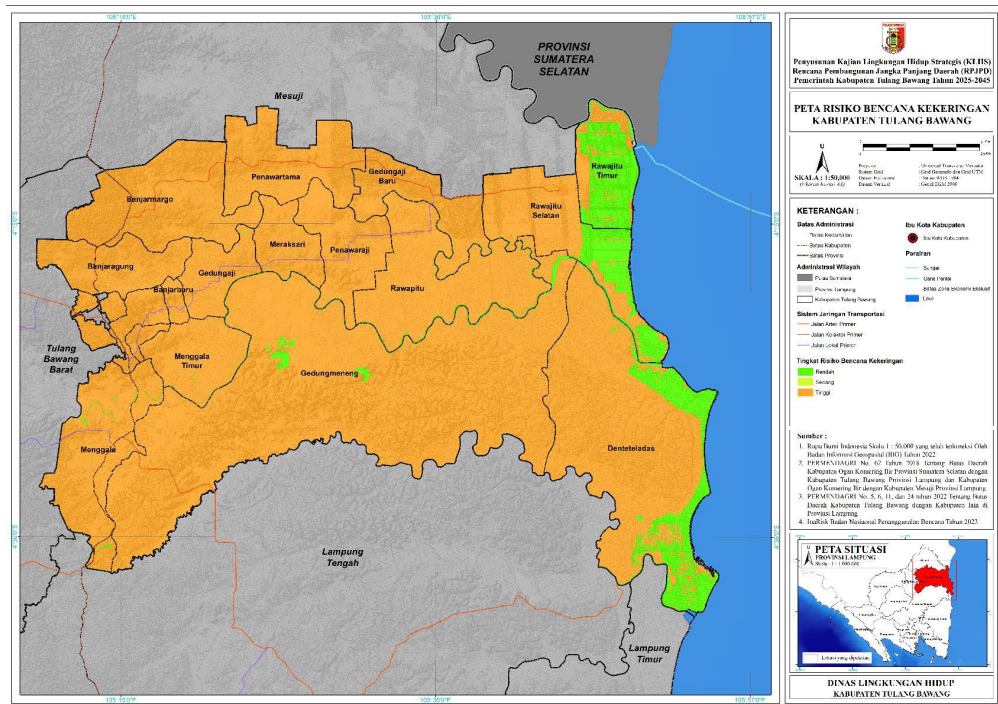
Sumber : KLHS Kabupaten Tulang Bawang 2025-2045

d) Kawasan rawan kekeringan.

Risiko bencana kekeringan pada level kabupaten/kota, Kabupaten Tulang Bawang berada pada kelas sedang dimana potensi bencana ini tersebar di seluruh wilayah desa/kelurahan Kabupaten Tulang Bawang. Risiko bencana kekeringan tinggi terdapat di 49 dari 151 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Total luas risiko tinggi yaitu 74.713,32 ha. Risiko bencana kekeringan sedang

tersebar di 102 desa/kelurahan dengan total luasan 227.019,24 ha.

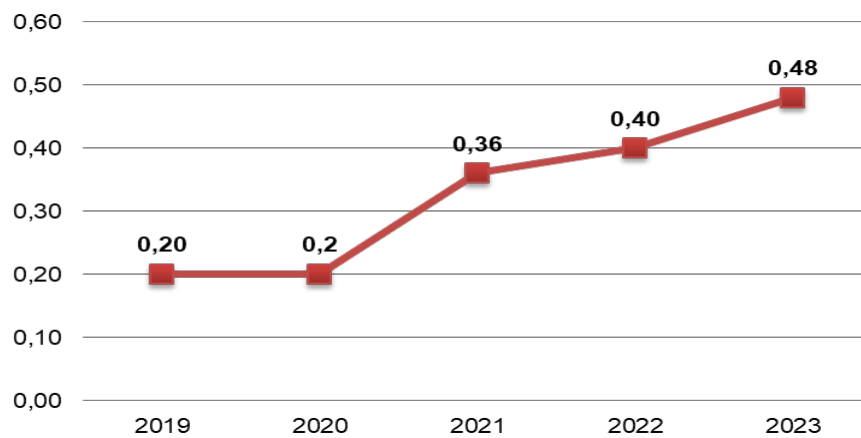
Gambar 2.14 Peta Risiko Bencana Kekeringan Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : KLHS Kabupaten Tulang Bawang 2025-2045

Sebagaimana dijelaskan dalam Perka BNPB Nomor 3 tahun 2012 Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilakukan sebagai bagian dari penghitungan Indeks Risiko Bencana (IRB). IKD merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Komponen penilaian ini digunakan untuk melihat ketahanan (kapasitas) sebuah daerah dalam hal kebencanaan. Hal ini juga berpengaruh pada nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), karena hasil dari IKD menjadi salah satu perhitungan dalam IRB Kabupaten Tulang Bawang.

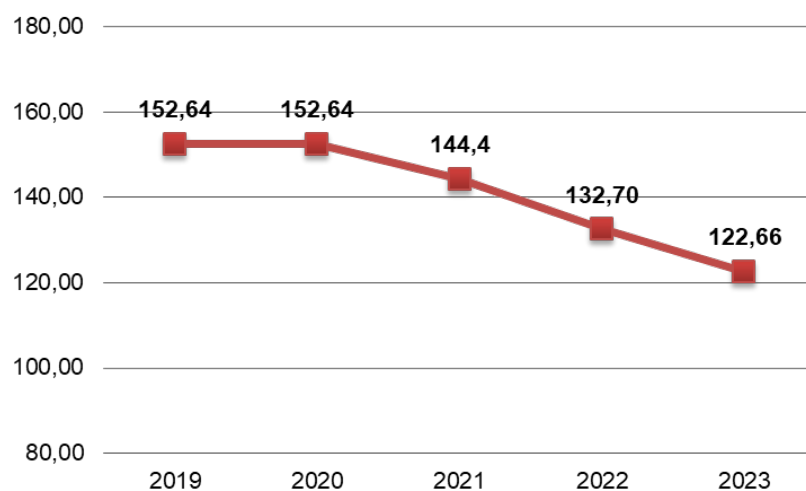
**Gambar 2.15 Grafik Indeks Ketahanan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang**



Sumber : KLHS Kabupaten Tulang Bawang 2025-2045

Untuk mendapatkan nilai indeks risiko bencana dilakukan pada empat kajian risiko bencana, yakni bencana banjir, kebakaran, angin kencang, kekeringan dan cuaca ekstrem. Indeks bernilai sama untuk seluruh kawasan pada suatu kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang merupakan lingkup kawasan terndah kajian ini. Indeks diperoleh dengan melaksanakan diskusi terfokus kepada pelaku penanggulangan bencana melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat.

**Gambar 2.16 Grafik Indeks Risiko Bencana (IRB)
Kabupaten Tulang Bawang**



Sumber : KLHS Kabupaten Tulang Bawang 2025-2045

10. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012-2032, potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang meliputi beberapa Kawasan antara lain:

a). Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Tulang Bawang dengan luas ± 4.000 Ha meliputi Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Menggala Timur.

b). Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

1) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luas ± 41.800 Ha meliputi:

- Tanaman pangan pada lahan basah dengan luas ± 32.889 Ha dengan kawasan sentra meliputi Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Penawar Aji.
- Tanaman pangan pada lahan kering dengan luas ± 8.914 Ha dengan kawasan sentra meliputi: Kecamatan

Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur dan Kecamatan Gedung Meneng.

- Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa lahan basah dan lahan kering seluas ± 25.080 Ha di Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kecamatan Rawa Pitu, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Penawar Aji, yang komoditasnya meliputi padi, kedelai, jagung, ketela pohon dan, dan komoditas singkong dengan kawasan sentra terdapat di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji; Kecamatan Meraksa Aji; Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Baru, dan Kecamatan Menggala Timur.

2) Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura

Kawasan pertanian hortikultura seluas ± 63.520 Ha dengan kawasan sentra di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Baru, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Aji dan Kecamatan Gedung Aji Baru.

3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan dengan luas ± 100.978 Ha meliputi:

- Komoditas kelapa sawit dengan kawasan sentra di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Rawa Pitu Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Baru dan Kecamatan Gedung Meneng;
- Komoditas tebu dengan kawasan sentra di Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas.
- Komoditas karet dengan kawasan sentra terdapat di kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Banjar Baru; dan
- Komoditas singkong dengan kawasan sentra terdapat di Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji; Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala, Kecamatan Dente Teladas, Kecamatan Banjar Baru dan Kecamatan Menggala Timur

4) Kawasan Peruntukan Peternakan meliputi :

- Pengembangan sentra ternak besar berada pada Kecamatan Menggala, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji dan Kecamatan Penawar Tama;

- pengembangan sentra ternak kecil berada pada Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama dan Kecamatan Gedung Aji Baru; dan
- pengembangan sentra peternakan unggas berada pada Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawajitu Selatan, dan Kecamatan Rawa Pitu.

c). Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan perairan dan daratan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

- 1) Kawasan perikanan tangkap meliputi perairan umum daratan diantaranya sungai, rawa dan genangan air lainnya dengan komoditas tangkap yaitu ikan air tawar dan payau;
- 2) Kawasan perikanan budidaya berupa budidaya pembenihan dan budidaya pembesaran dengan luas ± 29.910 Ha berada pada seluruh kecamatan di sepanjang aliran sungai Way Tulang Bawang dan Pesisir Timur Lampung;
- 3) Kawasan pengolahan perikanan dikembangkan di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dente Teladas;
- 4) Kawasan minapolitan berada di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kawasan Dente Teladas dengan komoditas unggulan udang windu dan vanname;

- 5) Prasarana perikanan tangkap berupa Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Maringgai Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
- 6) Tempat Pelelangan Ikan di Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas; dan
- 7) Balai Benih Ikan di Kecamatan Menggala Timur.

d). Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tulang Bawang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) minyak dan gas bumi dan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara.

- 1) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) minyak dan gas bumi berada di wilayah timur Kabupaten Tulang Bawang.
- 2) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral dan batubara meliputi:
 - Pertambangan Pasir di Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dente Teladas dan Kecamatan Rawajitu Selatan dengan luas ± 25.278 Ha; dan termasuk pengelolaan wilayah laut Kabupaten Tulang Bawang 0-4 mil, dan
 - Pertambangan batubara di Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Gedung Aji Baru dan Kecamatan Rawa Jitu Selatan.

e). Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Tulang Bawang meliputi kawasan peruntukan industri besar, kawasan

peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri rumah tangga.

- 1) Kawasan peruntukan industri besar berada di Kecamatan Dente Teladas, Gedung Meneng, dan Menggala Timur.
- 2) Kawasan peruntukan industri sedang meliputi sentra-sentra penghasil gula, tapioca, CPO, latex, tambak udang berada di Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Penawar Tama.
- 3) Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga adalah berupa zona industri non polusi yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang.

f). Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata alam, kawasan wisata budaya, dan kawasan wisata buatan.

- 1) Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
 - Kawasan ekosistem essential perlindungan satwa Rawa Pacing dikembangkan di Kecamatan Menggala Timur dan Kecamatan Gedung Aji; Rawa Rantau Kandis dan Rawa Lambu Purus di Kecamatan Menggala;
 - Pantai Rawajitu Timur di Kecamatan Rawajitu Timur;
 - Pantai Kuala Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
 - Rawa Bujung Tenuk di Kecamatan Menggala;
 - Bawang Latak di Kecamatan Menggala;
 - Rawa Cakat di Kecamatan Menggala;
 - Pulau Daging di Kecamatan Menggala; dan

- Tangga Raja di Kecamatan Menggala dan Gedung Aji.

2) Kawasan wisata budaya meliputi:

- Permukiman adat asli (rumah adat) di Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Menggala dan Kecamatan Menggala Timur;
- Makam leluhur di Kecamatan Menggala; dan
- Kawasan sejarah (Tangga Raja) di Kecamatan Menggala dan Kecamatan Gedung Aji.

3) Kawasan wisata buatan berupa wisata terpadu Cakat Nyenyik dikembangkan di Kecamatan Menggala Timur.

g). Kawasan Peruntukan Pemukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan luas ± 13.731 Ha meliputi kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

1) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi:

- Kawasan permukiman perkotaan Menggala di Kecamatan Menggala;
- Kawasan permukiman Perkotaan Unit II Banjar Agung di Kecamatan Banjar Agung;
- Kawasan permukiman Perkotaan Teladas di Kecamatan Dente Teladas;
- Kawasan permukiman Perkotaan Batang Hari di Kecamatan Rawa Pitu;
- Kawasan permukiman Perkotaan Medasari di Kecamatan Rawajitu Selatan;
- Kawasan permukiman Perkotaan Bumi Dipasena Mulya di Kecamatan Rawajitu Timur;

- Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Aji di Kecamatan Gedung Aji;
- Kawasan permukiman Perkotaan Karya Bhakti di Kecamatan Meraksa Aji;
- Kawasan permukiman Perkotaan Bogatama di Kecamatan Penawar Tama;
- Kawasan permukiman Perkotaan Sidomukti di Kecamatan Gedung Aji Baru;
- Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Meneng di Kecamatan Gedung Meneng;
- Kawasan permukiman Perkotaan Gedung Rejo Sakti di Kecamatan Penawar Aji;
- Kawasan permukiman Perkotaan Agung Dalem di Kecamatan Banjar Margo;
- Kawasan permukiman Perkotaan Kahuripan Jaya di Kecamatan Banjar Baru; dan
- Kawasan permukiman Perkotaan Lebu Dalem di Kecamatan Menggala Timur.

2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan di Kabupaten Tulang Bawang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG

Legenda:

- IBU KOTA ADMINISTRASI**
 - Ibu Kota Kecamatan
- BATAS ADMINISTRASI**
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Provinsi
- PERHUBUNGAN**
 - Jalan Arteri
 - Kolektor Primer
 - Kolektor Sekunder
 - Lokal Primer
- PERAIRAN**
 - Sungai
 - Qem Pantai
- RENCANA**
 - Jalan Tol
 - Rel Kereta Api
- Kawasan Budidaya**
 - Militer
 - Perikanan Budidaya
 - Perkebunan
 - Permukiman
 - Pertambangan
 - Pertanian Lahan Basah
 - Pertanian Lahan Kering
- Kawasan Lindung**
 - Kaw. Resapan Air
 - Rawan Banjir
 - Sempadan Sungai
 - Suaka Alam
 - Kaw. Penyangga Suaka Alam

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG 2012 - 2032

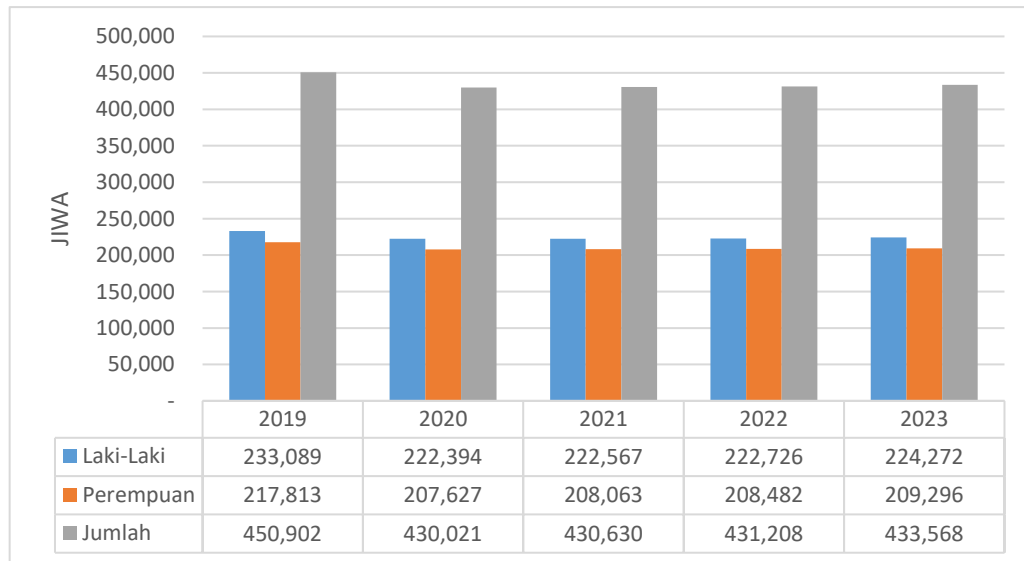
Bupati Tulang Bawang,
HANAN A. ROZAK

Referensi :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Tahun 1999
2. Bappeda Kab. Tulang Bawang Tahun 2010

2.1.2. Demografi

11 - 34

**Gambar 2.18 Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023 (jiwa)**

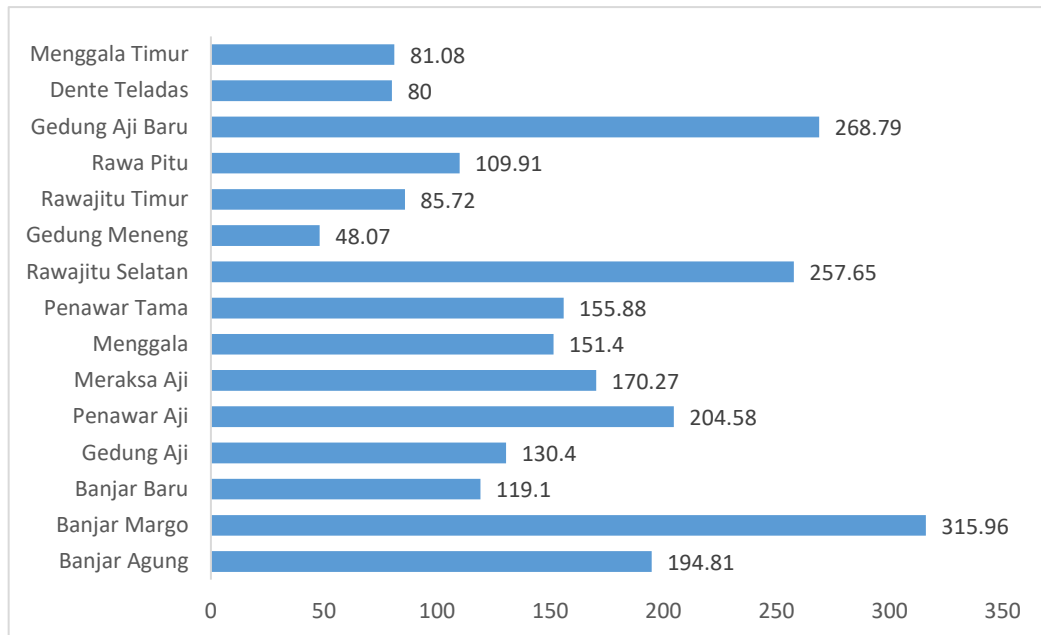


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Masalah kependudukan yang meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah.

Berdasarkan data estimasi Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 sebanyak 433.568 jiwa. Dengan luas wilayah 3.116,062 Km² berarti tingkat kepadatan penduduk mencapai 125,08 jiwa per Km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Banjar Margo mencapai 315,96 jiwa per Km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Gedung Meneng hanya 48,07 jiwa per Km². Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Tulang Bawang terlihat dalam Tabel di bawah ini.

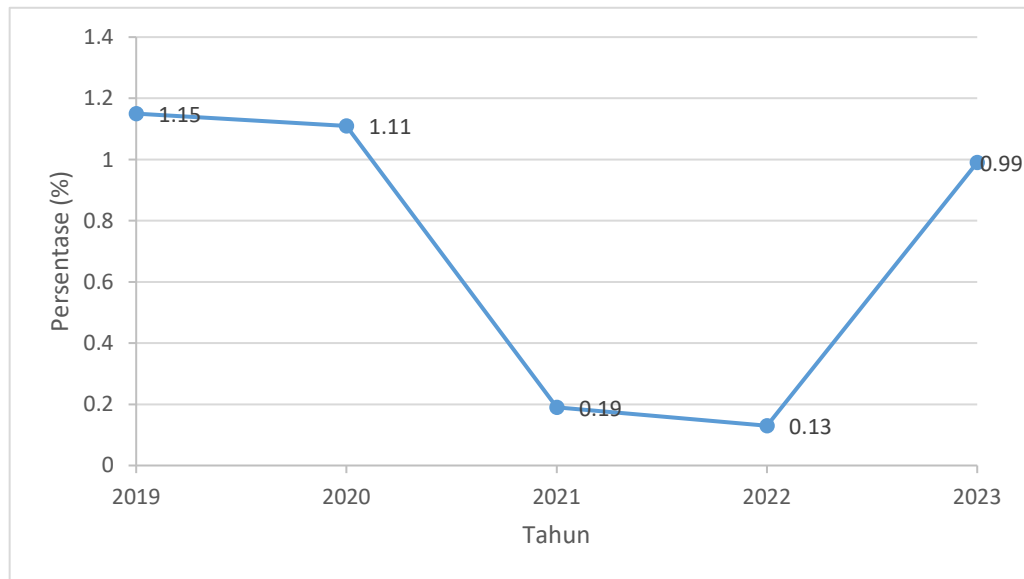
Gambar 2.19 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 (Jiwa/km²)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,15%, tahun 2020 menjadi 1,11%, 2021 menjadi 0,19%, tahun 2022 turun kembali menjadi 0,13% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,99%. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

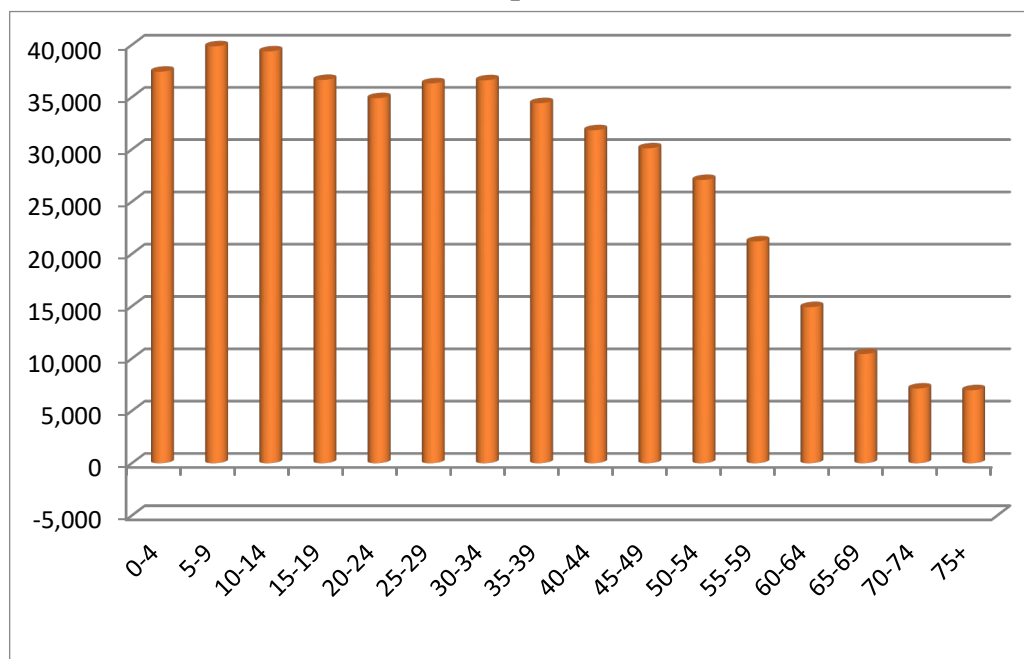
**Gambar 2.20 Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 menurut struktur umur atau kelompok usia sebagaimana gambar berikut:

**Gambar 2.21 Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang menurut
Struktur Usia/Kelompok Umur Tahun 2023**

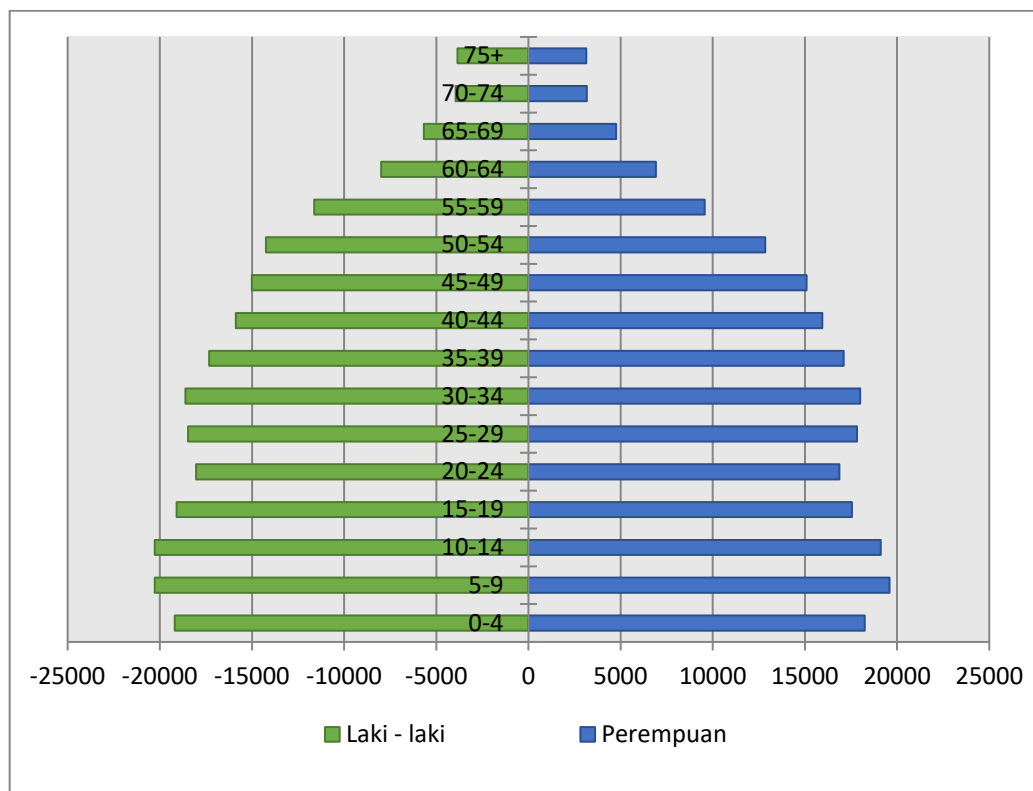


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Komposisi penduduk Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 menurut struktur usia atau kelompok umur didominasi oleh kelompok umur 0 - 14 tahun (Usia sekolah) dan kelompok umur 15 - 64 tahun (Usia Produktif) sedangkan di kelompok umur 65 tahun ke atas (Usia Non Produktif) lebih kecil jumlahnya. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk terbanyak ada di kelompok usia produktif yaitu usia 15 - 64 tahun yang juga menggambarkan rasio beban tanggungan yang cukup rendah.

Komposisi penduduk Kabupaten Tulang Bawang menurut struktur usia atau kelompok umur dan jenis kelamin, dapat tergambar pada piramida penduduk berikut ini:

Gambar 2.22 Piramida Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Menurut Kelompok Umur



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Gambaran kondisi perekonomian dapat dicerminkan oleh beberapa indikator makro ekonomi suatu daerah. Salah satu indikator ekonomi makro tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dengan membandingkan nilai PDRB yang berhasil dicapai dari tahun ke tahun, maka akan terlihat perkembangan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode.

Laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun dapat dilihat pada laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan (riil). Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2019-2023**

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,16	0,56	0,01	0,51	2,00
2	Pertambangan dan Penggalian	2,18	3,04	0,13	2,26	3,45
3	Industri Pengolahan	12,93	-2,89	6,82	4,73	1,65
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,80	3,67	2,20	3,12	2,38
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,90	5,62	9,41	2,90	0,16
6	Konstruksi	2,61	-4,47	2,51	5,33	5,67
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,22	-6,85	4,68	9,09	11,23
8	Transportasi dan Pergudangan	3,47	-3,57	4,54	10,67	16,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,11	-2,78	0,94	7,28	9,13
10	Informasi dan Komunikasi	9,97	8,82	4,10	6,04	7,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,56	8,45	0,66	-0,72	1,32
12	Real Estat	3,67	-3,10	1,87	5,19	0,08
13	Jasa Perusahaan	3,97	-1,39	1,02	9,29	2,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,78	3,48	2,94	-0,78	1,96
15	Jasa Pendidikan	8,22	0,45	2,55	3,69	2,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,95	7,29	4,03	0,78	2,67
17	Jasa Lainnya	6,45	-4,63	-2,38	31,08	12,96
PDRB		5,41	-1,34	2,88	3,85	4,27

Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang

Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2023 sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 16,78% diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 12,96% serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,23%.

Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung, Tahun 2019-2023 (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Tulang Bawang dan Provinsi Lampung

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan trend positif, dimana terjadi peningkatan di tiap tahunnya. Pada tahun 2022 dan 2023 angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,85% dan 4,27%.

Gambaran perkembangan ekonomi makro Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan akumulasi dari nilai tambah (*value added*) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah. PDRB tersebut menggambarkan potensi sekaligus kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi.

Berikut disajikan data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 sampai dengan perkiraan sementara tahun 2023.

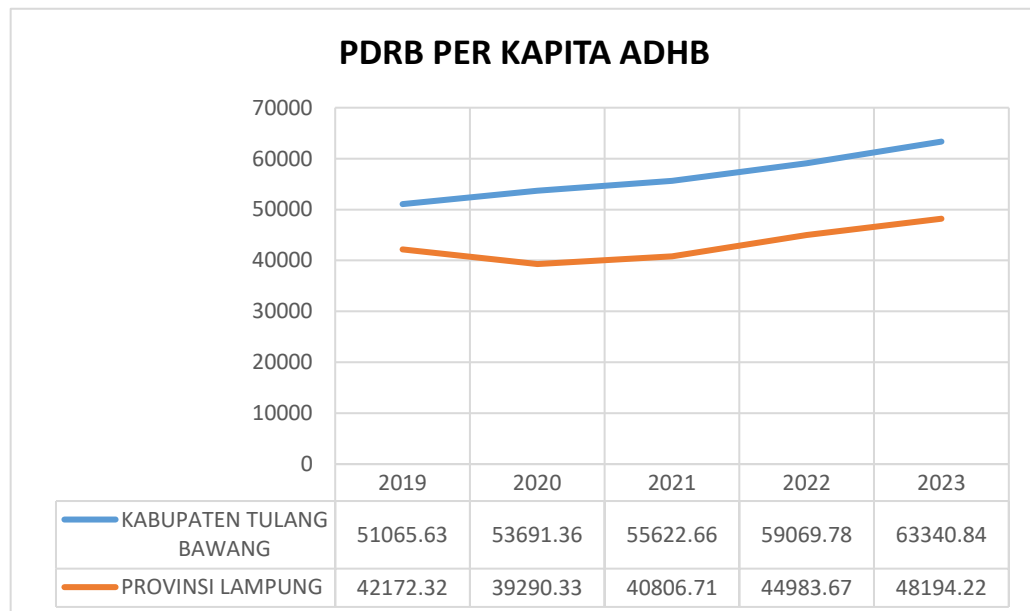
Tabel 2.7 PDRB Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023
(Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PDRB ADHB	23.063.585,89	23.082.157,34	24.166.264,55	25.983.084,09	28.197.252,51
2.	PDRB ADHK	15.826.209,47	15.614.891,94	16.064.500,85	16.683.480,63	17.395.148,54

Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang

Nilai PDRB Kabupaten Tulang Bawang menurut lapangan usaha selama tahun 2019-2023 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 menjadi 25.983.084,09 juta rupiah dan pada 2023 menjadi 28.197.252,51 juta rupiah.

Gambar 2.24 PDRB Per Kapita Kabupaten Tulang Bawang Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023 (dalam Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB Per kapita Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2019-2023 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.8 Distribusi Persentase Terhadap Total PDRB Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2019-2023 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37.48	38.30	37.19	35.67	35.25
2	Pertambangan dan Penggalian	1.07	1.12	1.08	1.08	1.07
3	Industri Pengolahan	24.57	24.23	25.13	25.22	24.41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
6	Konstruksi	9.05	8.60	8.71	8.96	8.83
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.49	10.00	10.23	10.82	11.73
8	Transportasi dan Pergudangan	3.75	3.68	3.87	4.35	5.10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.41	1.37	1.33	1.38	1.40
10	Informasi dan Komunikasi	3.34	3.61	3.47	3.54	3.57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.15	1.24	1.25	1.23	1.17
12	Real Estate	2.04	2.03	1.98	1.98	1.86
13	Jasa Perusahaan	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.76	2.88	2.83	2.70	2.57
15	Jasa Pendidikan	1.88	1.91	1.91	1.96	1.91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.41	0.44	0.45	0.44	0.42
17	Jasa Lainnya	0.40	0.38	0.36	0.47	0.51
PDRB ADHK		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang

Struktur PDRB Kabupaten Tulang Bawang selama tahun 2019-2023 cenderung sama. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektoral yang tidak banyak berubah. Tiga sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih mendominasi dalam pembentukan PDRB. Hal ini terlihat dari

kontribusi sektor-sektor tersebut dalam pembentukan PDRB yang relatif lebih tinggi dibanding sektor-sektor lainnya.

2) Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan non makanan. Sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

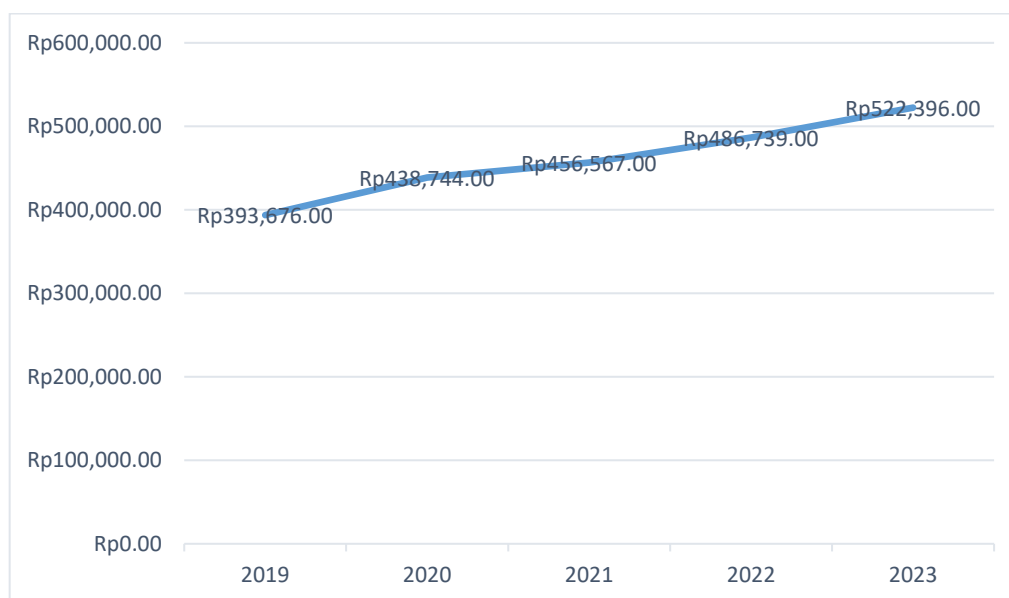
Tabel 2.9 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)
		Jumlah	Persen		
2019	Rp.393.676,00	42.060	9,35	1,43	0,35
2020	Rp.438.744,00	42.430	9,33	1,24	0,26
2021	Rp.456.567,00	44.530	9,67	1,15	0,20
2022	Rp.486.739,00	39.190	8,42	1,17	0,26
2023	Rp.522.396,00	37.830	8,04	1,09	0,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

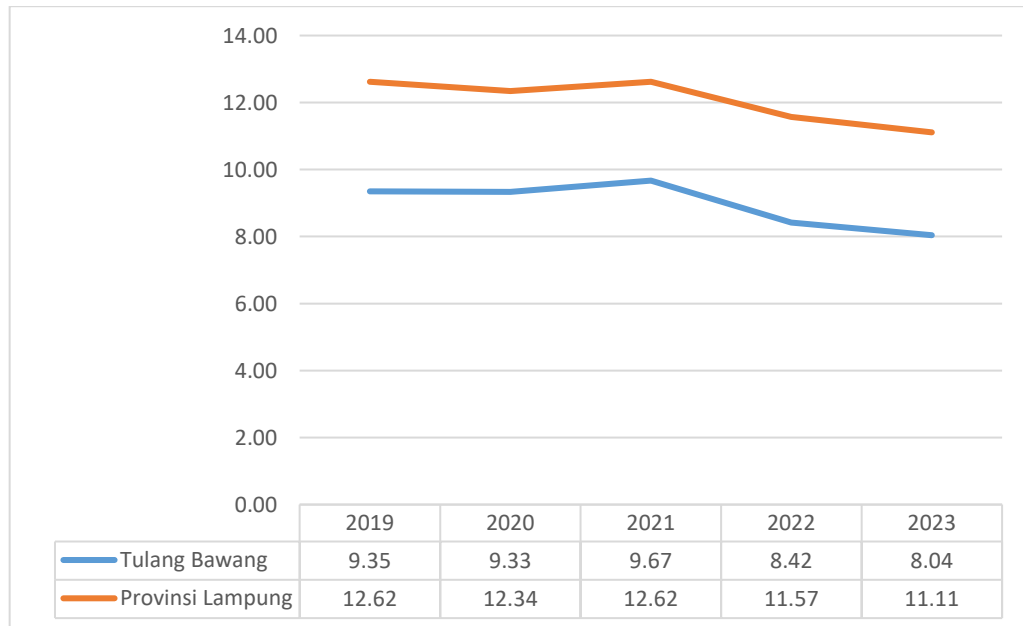
Dari tabel di atas dapat dilihat garis kemiskinan tahun 2019 sebesar Rp.393.676,00/kapita/bulan artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai pengeluaran di bawah Rp.393.676,00 selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin. Selanjutnya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2023 di Kabupaten Tulang Bawang menjadi Rp.522.396,00/kapita/bulan artinya setiap penduduk Kabupaten Tulang Bawang dengan nilai pengeluaran di bawah Rp.522.396,00 selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin.

Gambar 2.25 Garis Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

**Gambar 2.26 Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023**



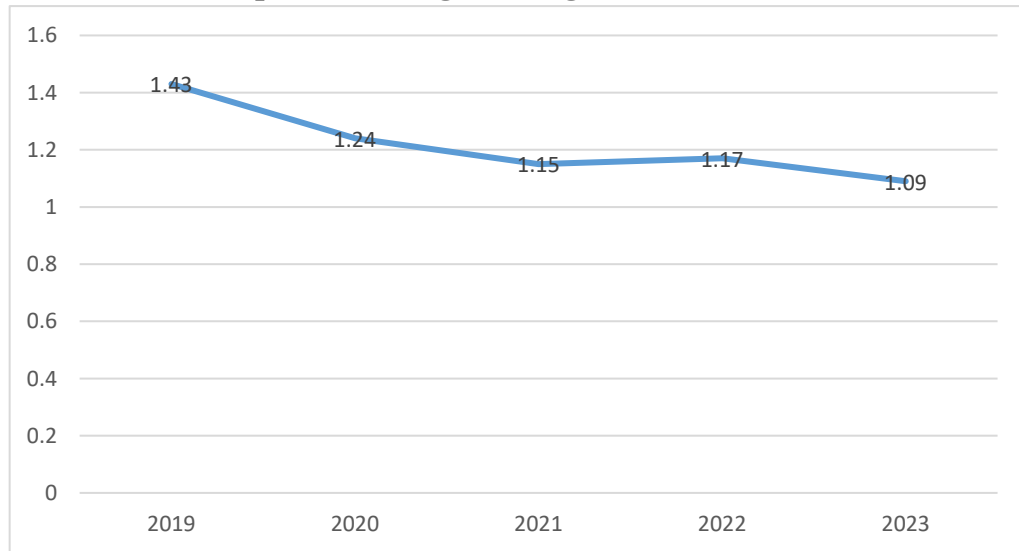
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 8,04.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang 2019-2023 selalu berada di bawah Provinsi Lampung, akan tetapi tetap harus ada evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan untuk melihat seberapa efektif program yang ada selama ini sudah tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran justru akan memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2).

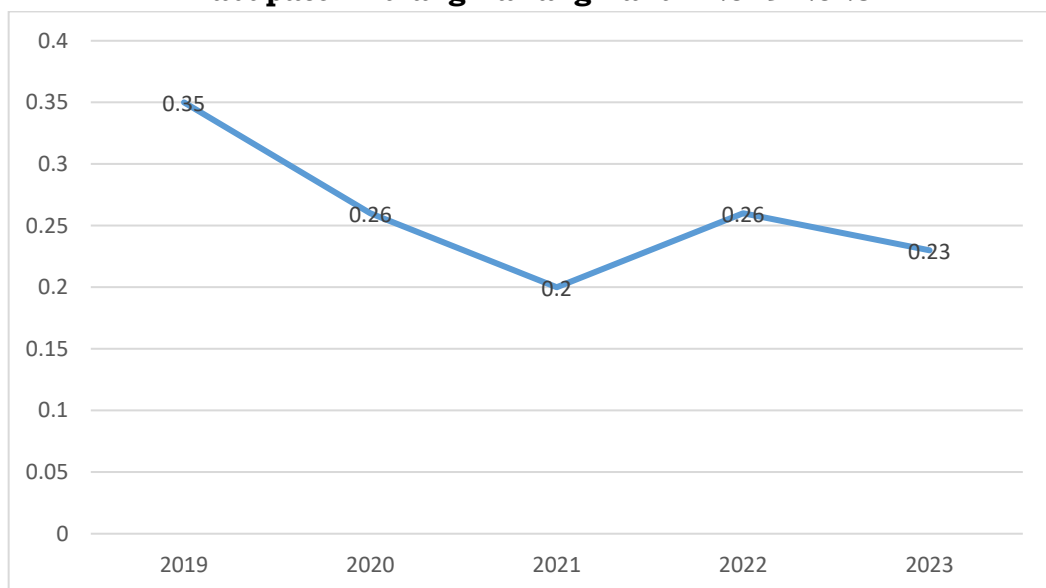
**Gambar 2.27 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

Tren P1 di Kabupaten Tulang Bawang secara umum terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata jarak kedalaman/kesenjangan kemampuan konsumsi penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Hanya saja di tahun 2022 P1 mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 P1 kembali mengalami penurunan.

**Gambar 2.28 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

Tren P2 di Tulang Bawang secara umum juga terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin semakin tidak merata dengan perubahan yang cukup besar. Hanya saja di tahun 2022 P2 mengalami peningkatan akan tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Indeks gini (Rasio Gini) adalah indikator ekonomi yang mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di sebuah daerah. Ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) Kabupaten Tulang Bawang termasuk dalam kategori rendah dengan angka indeks pada Tahun 2023 sebesar 0,284 berada di bawah indeks gini Provinsi Lampung sebesar 0,324.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut:

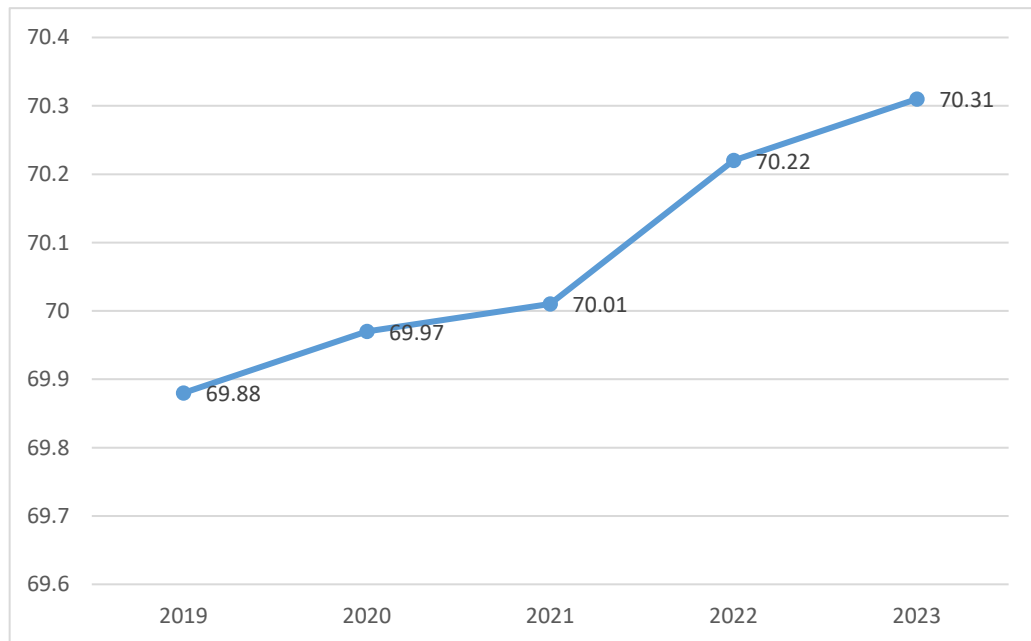
1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Tujuan dari pembangunan manusia di bidang urusan kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang dan sehat. Beberapa faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah faktor lingkungan yang berpengaruh sebesar 45 persen, perilaku kesehatan sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan keturunan sebesar 5 persen.

Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup menunjung umur rata-rata yang akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Dalam analisis demografi angka harapan hidup merupakan salah satu ukuran mortalitas yang penting, karena merupakan satu bagian yang saling mendukung secara berbanding

terbalik dengan angka kematian bayi yang merupakan probabilitas seorang bayi meninggal sebelum mencapai tepat umur satu tahun.

Gambar 2.29 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara/wilayah. Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan meningkatnya kemampuan ekonomi akan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, selanjutnya mampu memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. AHL di Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan, pada 2019 AHL penduduk Tulang Bawang mencapai 69,88 tahun dan pada tahun 2023

menjadi 70,31 tahun. Hal ini menggambarkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun. Kualitas kehidupan bayi sangat tergantung dari kondisi sosial ekonomi orang tua atau orang yang mengasuh, dengan kecenderungan bahwa semakin baik ekonomi orang tua, makin besar pula peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup lebih baik serta berumur panjang.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. AKB merupakan indikator penting yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Bayi baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. AKB merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Angka Kematian Bayi pada tahun 2023 sebesar 3 kasus 0,34 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini mengalami penurunan sebesar 3 kasus dibandingkan Angka Kematian Bayi pada tahun 2022.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 3 kasus kematian bayi. Angka Kematian Bayi tersebut berhubungan erat

dengan kenaikan Ibu Hamil dengan usia lebih dari 40 tahun, kehamilan lebih dari 5 kali, dan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Salah satu upaya pencegahan terjangkunya penyakit tertentu yaitu Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) adalah melalui program imunisasi. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap, cakupan imunisasi dasar pada bayi di Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Cakupan Imunisasi Dasar Pada Bayi
di Kabupaten Tulang Bawang**

No	Jenis Imunisasi Yang Diberikan	Cakupan Imunisasi (%)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Hepatitis B < 7 hari	76	92	82
2.	BCG	81	81	91
3.	DPT3 + HB3	82	79	92
4.	Polio	82	88	93
5.	Campak	81	97	97

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang

Selain itu cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization), juga mengalami peningkatan dari sebesar 85% pada tahun 2022 menjadi sebesar 89,4% pada tahun 2023. UCI adalah gambaran suatu kampung/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di kampung/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas.

Angka Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Tulang Bawang dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan pada tahun 2023 angka kematian ibu di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 0 kasus atau 0 per 100.000 kelahiran hidup dari 8.685 kelahiran hidup, jika dibandingkan tahun 2022 angka kematian ibu di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 69,17 per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 6 kasus dari 8.674 kelahiran hidup. Capaian AKI Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 sangat baik, hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Tulang Bawang berhasil dalam penanganan AKI melalui program-program yang telah dilaksanakan dalam upaya penurunan AKI. Pada Tahun 2023 juga telah dilakukan penguatan posyandu melalui pemberian insentif kepada kader posyandu untuk meningkatkan pelayanan kepada ibu, bayi dan balita.

Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan ibu diantaranya adalah angka kematian ibu melahirkan, proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih dan angka pemakaian kontrasepsi.

Penurunan AKI merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan perawatan pasca persalinan, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, serta akses terhadap keluarga berencana.

4) Persentase Balita Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting bisa terjadi

mulai dari dalam kandungan, bayi baru lahir (dengan panjang badan < 48 cm) sampai dengan anak usia 2 tahun.

Stunting merupakan salah satu program nasional. Kondisi balita stunting di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan data Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2023 sebesar 9,8% atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 10,2%. Capaian keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk menanggulangi masalah gizi (stunting dan gizi buruk).

Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang tiga tahun terakhir, terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 10,2 pada tahun 2022 menjadi sebesar 9,8 pada tahun 2023. Atas capaian tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memperoleh penghargaan sebagai daerah dengan keberhasilan penurunan angka stunting terendah di Provinsi Lampung.

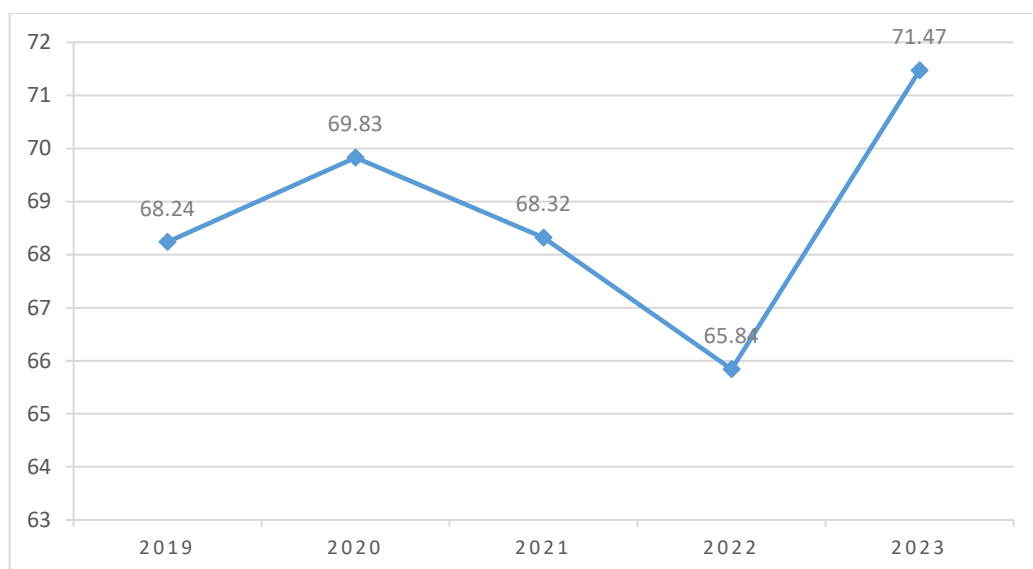
Selain itu kemajuan pada bidang kesehatan ditunjukkan pula oleh capaian cakupan pelayanan kesehatan pada tahun 2023 seperti cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan yang mencapai 100%, cakupan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan adalah sebesar 100%, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) mencapai 100% serta cakupan kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 96%.

5) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang berkerja. Pembangunan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

merupakan rasio antara banyaknya Angkatan Kerja dengan banyaknya Penduduk Usia Kerja. TPAK di Kabupaten Tulang Bawang selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan angka yang dinamis. Data pada tahun 2019 menunjukkan TPAK sebesar 68,24%. Pada tahun 2020 TPAK naik menjadi 69,83%, tahun 2021 turun menjadi 68,32%, tahun 2022 turun menjadi sebesar 65,84% dan pada tahun 2023 TPAK di Kabupaten Tulang Bawang naik menjadi 71,47%.

**Gambar 2.30 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tahun 2019-2023**



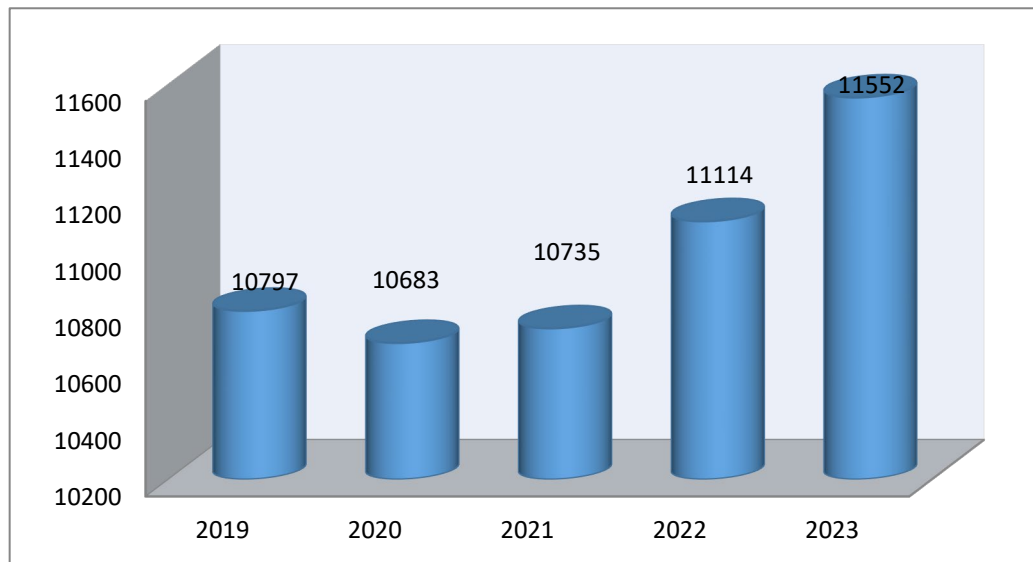
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

6) Pengeluaran Per Kapita

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan

paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Perkembangan pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2019-2023 sebagaimana dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.31 Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

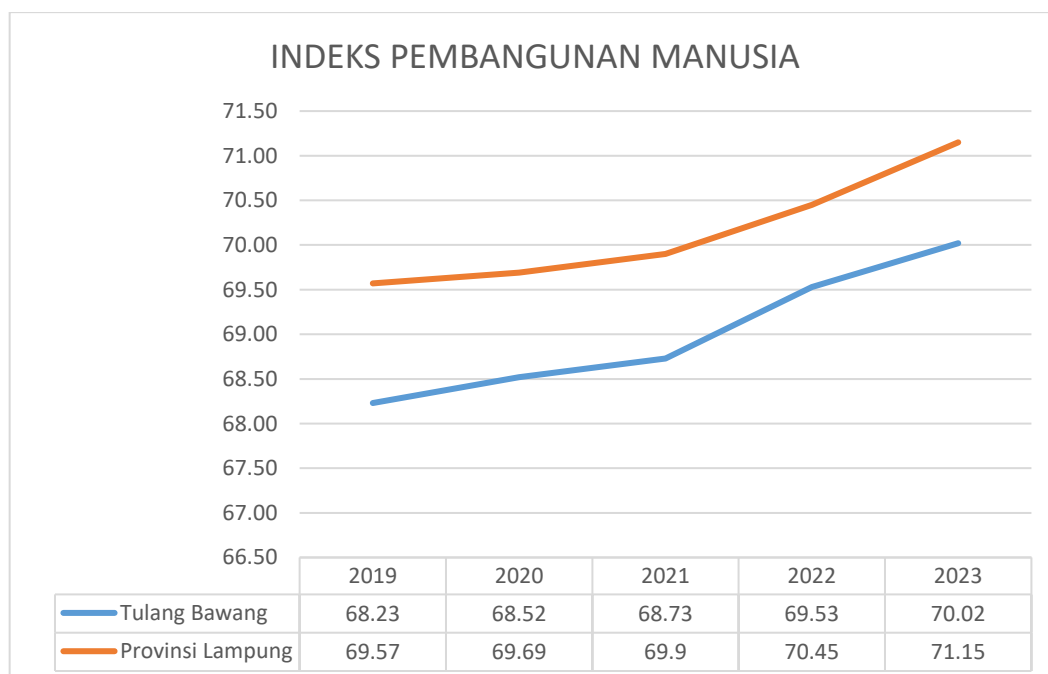
7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Permasalahan pembangunan tidak bisa terlepas dari manusia atau penduduk, karena penduduk itu adalah sebuah kekayaan yang nyata bagi suatu daerah. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumberdaya guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan agar dapat meningkatkan panjang usia hidup dan sehat meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan ketrampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Trend IPM Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Tulang Bawang semakin membaik dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu juga menggambarkan peningkatan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Perkembangan pembangunan manusia Kabupaten Tulang Bawang tahun 2019-2023 dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berikut ini:

Gambar 2.32 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang

8) Jaminan Kesehatan (JKN)

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka Pemerintah secara bertahap mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat miskin, Pemerintah memberikan bantuan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pemberian bantuan ini didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta menggunakan sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang terdaftar JKN sebesar 78,3% sedangkan pada tahun 2023 jumlah penduduk yang terdaftar JKN meningkat menjadi sebesar 95,6%. Dengan adanya dukungan pembiayaan JKN oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, maka masyarakat miskin yang menjadi PBI bertambah, sehingga pembiayaan JKN masyarakat miskin di Kabupaten Tulang Bawang dibiayai melalui APBN (Pemerintah Pusat) dan melalui APBD (Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota). Hal ini mengakibatkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang melalui APBD meningkat hingga mencapai 22,9% pada tahun 2023, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 9,8%. Sedangkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang melalui APBN meningkat hingga mencapai 44,8% pada tahun 2023, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 43,5%.

Dalam rangka mendukung kebijakan jaminan kesehatan sosial secara nasional, capaian Universal Health Coverage (UHC) yang

diimplementasikan melalui kepesertaan masyarakat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Capaian UHC pada tahun 2023 sebesar 95,60%, hal ini disebabkan adanya peningkatan penerimaan bantuan iuran yang berasal dari APBN, APBD, Pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Keberhasilan tersebut tidak terlepas partisipasi mandiri dari masyarakat dan dukungan Belanja Pemerintah Daerah kepada masyarakat kurang mampu.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan untuk mencapai standar tertentu namun, juga untuk memanfaatkan budaya yang merupakan salah satu kekayaan Kabupaten Tulang Bawang dalam bidang ekonomi. Kekayaan budaya Kabupaten Tulang Bawang merupakan potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Gelombang ekonomi keempat (*fourth wave economic*) yang kini tengah memasuki peradaban dunia dimana kesejahteraan manusia tidak lagi hanya ditopang oleh sektor pertanian ataupun manufaktur, tetapi lebih ditopang dari karya kreativitas, keahlian dan bakat individu yang berakar dari karya budaya. Keunggulan kompetitif Tulang Bawang dalam bidang kebudayaan menjadi salah satu komponen unggulan bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang.

1) Kebudayaan

Meningkatnya apresiasi masyarakat pada pemerintah daerah terhadap seni budaya daerah dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan acara yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik dalam acara

peringatan hari-hari besar maupun acara-acara adat. Kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang sangat banyak ragamnya, hal ini disebabkan penduduk Kabupaten Tulang Bawang berasal dari berbagai suku dan daerah yang masing-masing tetap mempertahankan dan melestarikan kesenian dan kebudayaan dari daerah asal seperti wayang kulit dari daerah Jawa Tengah, Jaipong dari daerah Sunda, Reog dari Daerah Ponorogo, dan lainnya sesuai daerah asal. Meskipun demikian banyak masyarakat pendatang yang mempelajari kesenian dan kebudayaan asli lampung, seperti tari-tarian khas lampung maupun gamelan/musik khas lampung. Demikian juga sebaliknya banyak penduduk asli lampung yang mempelajari kesenian dan kebudayaan dari daerah lain. Hal ini dapat dilihat pada saat pawai/karnaval seni dan budaya daerah yang diselenggarakan pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ataupun Hari Jadi Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang.

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari 15 Kecamatan, 147 kampung dan 4 kelurahan memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

2) Olahraga

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertaqwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis,

bertanggungjawab, berdaya saing, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan yang dimaksud adalah pelayanan kepemudaan yang berfungsi sebagai sarana penyadaran kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa Keolahragaan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sangat konsen untuk meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan sekaligus mendukung keolahragaan nasional yang bertujuan untuk memelihara kesehatan, kebugaran dan meningkatkan prestasi, sportivitas, disiplin, mempererat serta membina persatuan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, kehormatan bangsa, dan *nation character building*.

Secara umum keberhasilan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga, jumlah klub olahraga, jumlah lapangan olahraga, jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, dan jumlah kegiatan keolahragaan. Pembangunan kepemudaan di Kabupaten Tulang Bawang berupa pelayanan kepemudaan yang berfungsi sebagai sarana penyadaran kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Program kepemudaan sudah terealisasi dalam bentuk

pelatihan, kepeloporan melalui kegiatan-kegiatan yang mendorong untuk merangsang tumbuh gerak daya saing pemuda. Pada tahun 2022 jumlah organisasi pemuda sebanyak 153 organisasi, jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 3 kegiatan, capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, dimana jumlah organisasi pemuda sebanyak 151 organisasi, jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 1 kegiatan, jumlah kegiatan keolahragaan sebanyak 2 kegiatan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang secara keseluruhan. Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa public yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan

penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun).

Upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyebaran sarana pendidikan secara merata pada semua wilayah. Sebaran pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar telah mencapai pada tingkat desa di Kabupaten Tulang Bawang. Akan tetapi untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan baik yang berstatus negeri maupun swasta lebih terkonsentrasi di ibukota Kecamatan, sedangkan pendidikan tinggi terpusat pada Ibukota Kabupaten.

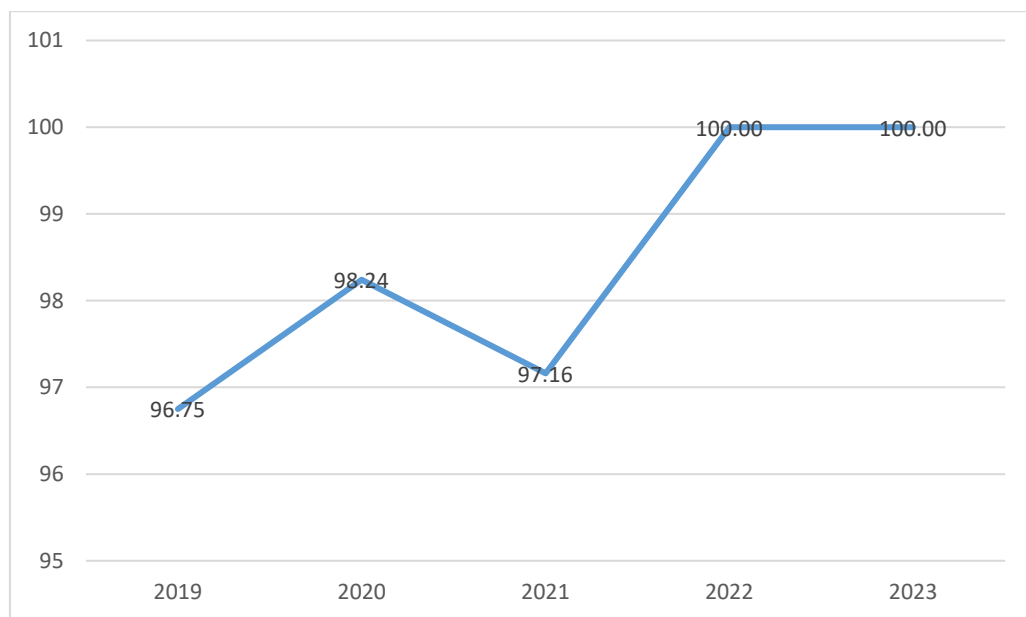
1) Angka Melek Huruf (AMH)

Kemampuan membaca dan menulis merupakan ketrampilan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan sehingga tercipta masyarakat yang bermartabat dan hidup yang lebih sejahtera. Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah kemampuan baca-tulis. Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan baca tulis penduduk adalah angka melek huruf. Indikator ini merepresentasikan kemampuan dasar penduduk dalam memahami sebuah kalimat sederhana. Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan

huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) terus meningkat dari tahun ke tahun, dari 98,24% pada tahun 2021 naik menjadi 100% pada tahun 2023. Penanganan pemberantasan buta huruf selama ini dilakukan secara sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan perguruan tinggi bahkan juga atas peran serta masyarakat dan stekholder lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2019–2023 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.33 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

Menurunnya angka melek huruf penduduk tidak berarti bahwa proses pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilakukan tidak mengalami kemajuan. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan sebuah proses yang panjang dan hasilnya pun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara instan. Sebagian besar penduduk yang buta huruf merupakan penduduk yang termasuk dalam kelompok penduduk usia tua (55 tahun ke atas) yang

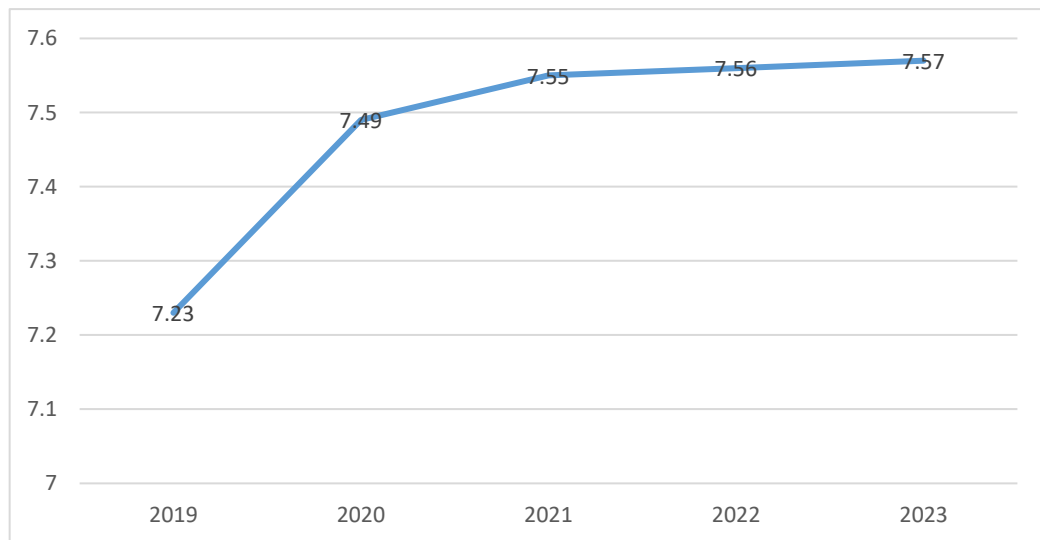
memang banyak yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Secara alamiah jumlahnya akan semakin berkurang sedikit demi sedikit akibat proses kematian.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan angka melek huruf penduduk diutamakan dengan meningkatkan angka partisipasi anak usia sekolah. Program wajib belajar Dua Belas tahun yang didukung melalui mekanisme bantuan pemerintah seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) diharapkan mampu menaikkan angka partisipasi tersebut. Di samping itu, program pemberantasan buta huruf bagi mereka yang tidak tergolong usia sekolah masih perlu dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi terutama untuk mengakses media umum cetak. Namun demikian, kendala yang dihadapi sangat besar. Minat penduduk berusia tua yang berstatus buta huruf untuk mengikuti kegiatan pelatihan baca tulis masih rendah.

2) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir.

Gambar 2.34 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Tulang Bawang meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 7,57. Angka 7,57 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata belum lulus SMP/MTs atau sederajat (7,00 dalam tahun). Kecenderungan penduduk di atas antara lain yang tidak sedang menjalankan pendidikan di sekolah formal yakni di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. Penduduk tersebut lebih cenderung bekerja dengan ijazah terendahnya (misalnya SD), tidak melanjutkan pendidikan formal pada usianya dan tidak melanjutkan pendidikan melalui pendidikan non formal (Paket B atau C).

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan tingkatan sekolah yaitu Tingkat SD pada Tahun 2019 sebesar 113,14 menurun pada Tahun

2023 menjadi 110,05. Tingkat SMP/MTS pada Tahun 2019 sebesar 97,19 menurun pada Tahun 2023 menjadi 93,47. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Tahun 2019-2023**

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PAUD/TK/KB	-	-	70.02	75.00	55.03
Sekolah Dasar (SD)	113.14	111.66	109.71	109.98	110.05
SMP/MTS	97.19	95.44	97.1	96.65	93.47

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2023, peningkatan di semua jenjang pendidikan yaitu SD pada Tahun 2019 sebesar 99,58% menjadi sebesar 99,78% pada Tahun 2023 dan SMP/MTs pada Tahun 2019 sebesar 78,53% menjadi sebesar 81,39% pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan pada usia sekolah dan banyaknya bantuan dari pemerintah dibidang pendidikan, sehingga meningkatkan APM pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang.

Salah satu indikator perluasan akses dan pemerataan pendidikan adalah Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM). Adapun perkembangan APM selama 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.12 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2019-2023**

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sekolah Dasar (SD)	99.58	99.36	99.38	99.89	99.78
SMP/MTS	78.53	79.12	81.07	81.17	81.39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

5) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) selama kurun waktu 2021-2023 mengalami angka yang fluktuatif. APS kelompok umur 3-6 tahun pada tahun 2021 sebesar 72,24% meningkat pada tahun 2023 menjadi 72,42%. APS pada kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2021 sebesar 99,59% meningkat pada tahun 2023 menjadi 99,78%. Sementara itu pada kelompok umur 13-15 tahun, angka APS pada tahun 2021 sebesar 95,52% meningkat pada tahun 2023 menjadi 96,56%. Hal ini disebabkan disamping meningkatnya sarana dan

prasarana pendidikan juga karena semakin sadarnya orang tua akan pentingnya pendidikan.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2021 – 2023**

Kelompok Umur	Tahun		
	2021	2022	2023
3 – 6	72.24	74.45	72.42
7 - 12	99.59	99.89	99.78
13 - 15	95.52	96.92	96.56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

6) Angka Kelulusan

Selain indikator diatas capaian kemajuan pembangunan pendidikan dari segi kualitas dan daya saing pendidikan dapat dilihat dari Angka Kelulusan. Perkembangan angka kelulusan siswa Tahun 2021/2022 – 2022/2023 di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.14 Perkembangan Angka Kelulusan
Tahun 2021/2022 – 2022/2023**

No	Tingkatan Sekolah	2021/2022	2022/2023
1.	SD/MI	100	100
2.	SMP/MTs	100	100

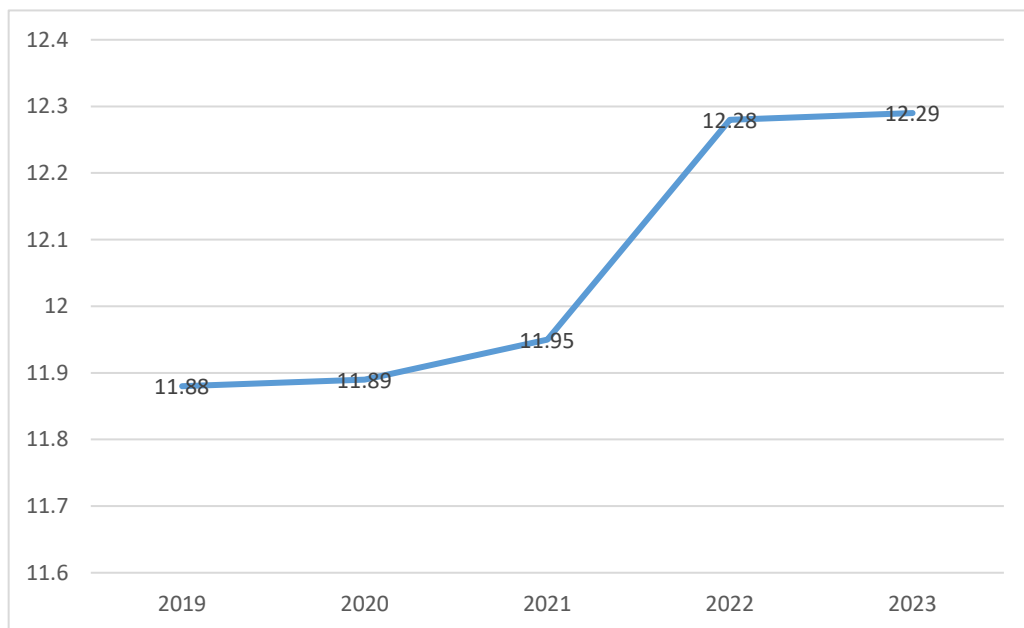
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang

Angka kelulusan semua jenjang sekolah selama tahun 2021/2022 – 2022/2023 menunjukkan angka yang tinggi dengan capaian pada tahun 2021/2022 jenjang SD sebesar 100% dan SMP 100%. Sementara itu pada tahun 2022/2023 jenjang SD dan SMP/MTS sebesar 100%. Hal ini menunjukkan baiknya mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang.

7) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.35 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

8) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul atfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Persentase penduduk berumur 0-6 tahun yang pernah/masih mengikuti Pendidikan pra sekolah di Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah di Kabupaten Tulang Bawang (Persen), 2021-2023

Tingkat Pendidikan - Pra Sekolah	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun (persen)		
	2021	2022	2023
Taman Kanak-Kanak	83.62	92.61	79,36
Bustanul Athfal/Raudatul Athfal	1.05	3.44	3,12
AUD/ PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dll	15.34	3.95	17,52
Kelompok Bermain	-	-	-
Taman Penitipan Anak	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

9) Angka Putus Sekolah

Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka Putus

Sekolah pada Tahun 2023 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,2% atau sama dengan tahun 2022 yang sebesar 0,2%. Tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan dari sebesar 0,5% pada tahun 2022 menjadi 0,75% pada tahun 2023. Secara rinci perkembangan angka putus sekolah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16 Perkembangan Angka Putus Sekolah Tahun 2022-2023

No	Tingkatan Sekolah	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	SD/MI	0,30	0,20	0,2
2.	SMP/MTs	0,60	0,50	0,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang

10) Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Data angka melanjutkan di Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.17 Angka Melanjutkan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021-2023

No	Jenjang Pendidikan	2021	2022	2023
1.	PAUD/TK ke SD/MI	90,69	92,00	100
2.	SD/MI ke SMP/MTs	99,94	99,95	77,26
3.	SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	98,97	99,00	71,03

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang

Berdasarkan Tabel diatas Angka Melanjutkan pada tahun 2022 berdasarkan tingkat sekolah yaitu tingkat PAUD/TK ke SD/MI mencapai 100%, tingkat SD/MI ke SMP/MTs menurun menjadi

sebesar 77,26% dan tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA menurun menjadi sebesar 71,03%.

11) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Guru Berijazah S1/D-IV	Orang	3419	4285	4180	3208	1327
2	Jumlah Seluruh Guru (SD/MI, SMP/MTs)	Orang	3840	4122	4392	4317	4528
3	Persentase Guru Berijazah S1/D-IV	Persen	88.26	87.11	73.93	74.32	29.3

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang (diolah)

Rata-rata persentase guru berijazah S1/D-IV dengan persentase paling tinggi sebesar 88,26% pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2022 memiliki persentase sebesar 29,3%. Sedangkan persentase guru yang telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2018 sebesar 34,48% dan pada tahun 2022 sebesar 29,48%.

**Tabel 2.19 Guru yang telah Bersertifikat Pendidikan
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022**

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Seluruh Guru (SD/MI, SMP/MTs)	orang	3840	4122	4392	4317	4528
2	Jumlah Guru Bersertifikasi	orang	1324	2761	2427	1234	1335
3	Persentase Guru Bersertifikasi	persen	34.48	66.98	55.26	28.58	29.48

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang (diolah)

12) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yang digunakan adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tulang Bawang selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit	331	338	339	346	348
2	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	orang	64426	69458	59208	59053	60828
Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs			51	49	57	59	57

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tulang Bawang dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami angka yang fluktuatif. Pada tahun 2022 rasio ketersediaan sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 57 sekolah, kurangnya murid di beberapa sekolah disebabkan karena tingginya persaingan kualitas sekolah yang mengakibatkan orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap paling baik dan terjangkau. Jumlah sekolah mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 menjadi 348 unit.

13) Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Rasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar mutu pengajaran tercapai. Jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SMP/MTs yang dihitung adalah baik guru PNS maupun swasta (non-PNS). Berikut data rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2.21 Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI	Murid/1 guru	18.34	34.82	21.7	18.2	12.05
2	SMP/MTs	Murid/1 guru	14.64	13.91	13.2	15.22	14.9

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru/murid SD/MI di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022 mencapai 12,05 yang berarti bahwa satu orang guru mengajar 12 sampai 13 murid. Sedangkan

rasio guru/murid SMP/MTs pada tahun 2022 mencapai 14,9 yang berarti satu guru mengajar 14 sampai 15 murid. Hal tersebut dikarenakan guru yang diperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya seperti guru SD/MI yang cenderung merupakan guru kelas, tetapi merupakan guru mata pelajaran, sehingga membutuhkan lebih banyak guru dalam satu kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda. Semakin rendahnya rasio guru terhadap murid, akan berpengaruh pada semakin besarnya perhatian guru terhadap murid yang diasuhnya. Oleh karena itu, diharapkan kualitas murid akan semakin lebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif.

14) Rombongan Belajar SD/MI dan SMP/MTs

Indikator rombongan belajar SD/MI di Kabupaten Tulang Bawang digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kelas yang ada. Idealnya, dalam satu kelas terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombongan belajar menempati satu ruang kelas. Data rasio jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI di Kabupaten Tulang Bawang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22 Rombongan Belajar SD/MI Tahun 2018-2022 di Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kelas	unit	1702	1707	1688	2518	2862
2	Jumlah Rombongan Belajar	kelompok	1720	1685	1708	2570	2578
3	Rasio Jumlah Kelas per Rombongan Belajar	unit/ kelompok	0.99	1.01	0.99	1.05	1.03

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kelas per rombongan belajar SD/MI di Kabupaten Tulang Bawang dalam kurun waktu 2018–

2022 terus mengalami peningkatan menjadi 2578 kelompok pada tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbangi dengan peningkatan jumlah kelas. Semakin mendekati angka 1 maka akan semakin ideal (efektif) karena terdapat kesesuaian antara jumlah kelas dan jumlah rombongan belajar. Pada tahun 2022 rasio jumlah kelas per rombongan belajar sudah mengalami peningkatan menjadi sama dengan atau lebih dari 1, yang menunjukkan seluruh rombongan belajar sudah mempunyai kelas masing-masing atau kebutuhan kelas sudah tercukupi.

15) Sekolah Dalam Kondisi Bangunan Baik

Sekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak didapatkan. Data pada indikator ini diganti dengan data kelas dalam kondisi baik. Data jumlah kelas dalam kondisi baik di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Ruang Kelas dengan Kondisi Baik Tahun 2018-2022 di Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kelas Kondisi Baik							
1	SD/MI	Unit	1551	1475		1582	1762
2	SMP/MTs	Unit	612	644		519	625
Jumlah Seluruh Kelas							
1	SD/MI	Unit	1786	1645	1726	1843	2081
2	SMP/MTs	Unit	699	713	641	675	781
Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik							
1	SD/MI	Unit	86.84	89.66		85.84	84.67
2	SMP/MTs	Unit	87.55	90.32		76.89	80.03

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan ruang kelas pada semua jenjang pendidikan sudah berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase ruang kelas dengan kondisi baik yang semuanya menunjukkan peningkatan. Hasil dari indikator ini menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hanya saja perlu ditingkatkan hingga mencapai angka 100 persen agar para pelajar di Kabupaten Tulang Bawang dapat terfasilitasi dengan baik, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar.

B. Kesehatan

Kualitas hidup masyarakat tidak saja ditentukan oleh tingkat pendapatan dan pendidikan yang dicapai oleh masyarakat, tetapi juga kualitas kesehatan masyarakat turut menentukan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan fasilitas kesehatan merupakan salah satu program pembangunan pemerintah daerah. Pembangunan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang meningkat yaitu dengan adanya puskesmas dan posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan. Hal tersebut tentunya mendukung bagi terciptanya kesehatan di masyarakat luas. Namun hal ini juga harus didukung dengan kesadaran masyarakat sendiri untuk selalu berpola hidup sehat.

1) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Posyandu di Kabupaten Tulang

Bawang dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal tersebut ditujukan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Tulang Bawang.

Tabel 2.24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu	Unit	292	292	264	162	314
2	Jumlah Balita	Anak	46827	45476	45758	34270	42293
3	Rasio Posyandu per satuan balita	Per 1.000 balita	6.02	6.42	5.76	0.7	0.8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang

Berdasarkan Tabel di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Tulang Bawang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2022 sebesar 0,7 menjadi sebesar 0,8 pada tahun 2023. Selain itu, pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah posyandu dan peningkatan jumlah balita dibandingkan tahun sebelumnya.

2) Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Puskesmas merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Rasio puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.25 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Puskesmas						
	·Rawat Inap	unit	6	6	7	7	7
	·Non Rawat Inap	unit	12	12	13	13	13
Total			18	18	20	20	20
2	Jumlah Penduduk	jiwa	450902	430021	430630	431203	471654
3	Rasio Puskesmas, per Satuan Penduduk	Per 100.000 jiwa	25.05	23.89	21.53	21.53	21.53

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang

Berdasarkan tabel di atas, rasio puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang dalam periode 2019–2023 mengalami angka rasio yang fluktuatif. Pada tahun 2023, rasio puskesmas, memiliki angka rasio yang sama pada tahun 2022 yaitu sebesar 21,53. Stabilitasnya jumlah puskesmas di Kabupaten Tulang Bawang adalah hal yang sangat baik. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Harapannya pada tahun yang akan datang rasio ini dapat semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

3) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.26 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	unit	3	3	3	3	4
2	Jumlah Penduduk	jiwa	450902	430021	430630	431203	471654
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk			0.00001	0.00001	0.00001	0.00001	0.00001

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang

Data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu. Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang dalam periode tahun 2019–2023 tidak mengalami perubahan. Rasio

rumah sakit per satuan penduduk dari tahun 2019-2023 sebesar 0,00001, yang berarti bahwa untuk setiap 100.000 penduduk dilayani 1 rumah sakit.

RSUD Menggala telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Tipe B dan menjadi Rujukan Regional III yang meliputi 6 (enam) kabupaten di Lampung yaitu Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Hal ini menuntut agar RSUD Menggala dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau masyarakat, sehingga dapat mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dan sekitarnya yaitu dengan meminimalkan rujukan ke Rumah Sakit provinsi.

Sepanjang tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Menggala telah memberikan pelayanan kesehatan dengan perincian kunjungan pasien rawat inap sebanyak 7.898 pasien dan kunjungan pasien rawat jalan sebanyak 47.857 pasien. Secara rinci perkembangan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Menggala sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.27 Perkembangan Jumlah Pasien RSUD Menggala
Tahun 2019 – 2023**

No	Uraian	Satuan	Jumlah Pasien				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasien Rawat Inap	orang	6089	5994	5254	9212	7898
2	Pasien Rawat Jalan	orang	17600	26233	40166	274601	47857

Sumber : Rumah Sakit Umum Daerah Menggala

Salah satu bagian dari statistik rumah sakit adalah indikator pelayanan rawat inap rumah sakit. Indikator ini merupakan gambaran untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi pelayanan rawat inap di rumah sakit. Perkembangan

indikator pelayanan rawat inap RSUD Menggala selama tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.28 Indikator Pelayanan Rawat Inap RSUD Menggala Tahun 2019-2023

No.	Tahun	BOR	LOS	TOI	BTO	NDR	GDR
		(%)	(Hari)	(Hari)	(Hari)	(/1000)	(/1000)
1	2019	23,31	2,54	8,96	31,23	18,39	35,5
2	2020	36,31	2,59	4,85	47,94	18,02	39,55
3	2021	35,97	2,61	4,92	47,54	18,42	41,22
4	2022	31,76	2,82	8,15	30,57	17,24	33,19
5	2023	31,76	2,32	7,18	28,6	17,64	41,22

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah Menggala

BOR (Bed Occupancy Ratio), LOS (Lengt Of Stay), TOI (Turn Over Interval),
BTO (Bed Turn Over), NDR (Net Death Rate), GDR (Gross Death Rate)

4) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang, baik berstatus PNS maupun bukan. Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kabupaten Tulang Bawang. Rasio praktek dokter per satuan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.29 Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter	Orang	51	87	59	108	108
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	450902	430021	430630	431203	471654
3	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	Per 1.000 jiwa	0.11	0.2	0.13	2.5	2.2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang

Berdasarkan tabel di atas, rasio praktik dokter (baik dokter umum maupun spesialis) per satuan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2023 rasio dokter mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 2,5 menjadi 2,2. Jumlah dokter umum dan dokter spesialis di Kabupaten Tulang Bawang belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu distribusi dokter umum dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

5) Rasio Perawat dan Bidan per Satuan Penduduk

Rasio perawat, dan bidan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat dan bidan terhadap jumlah penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Perawat dan bidan merupakan tenaga medis non dokter yang juga dapat memberikan pelayanan dengan kapasitas dan spesialisasi yang berbeda. Semakin besar rasio perawat dan bidan maka dapat merepresentasikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan lebih efektif. Berikut merupakan rasio perawat di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023.

Tabel 2.30 Rasio Perawat per Satuan Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perawat	Orang	348	329	127	496	368
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	450902	430021	430630	431203	471654
Rasio Perawat per Satuan Penduduk		Per 100.000 jiwa	77.33	76.51	29.49	115	102

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang

Rasio perawat di Kabupaten Tulang Bawang cenderung mengalami sedikit penurunan. Jumlah perawat pada tahun 2023 sebanyak 368

orang menurun dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 496 orang. Rasio perawat per satuan penduduk idealnya adalah 117 per 100.000 penduduk, sementara itu di Kabupaten Tulang Bawang rasio perawat per satuan penduduk pada tahun 2023 sebesar 102 orang perawat per 100.000 penduduk.

Di samping perawat, tenaga medis berupa bidan juga diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, khususnya untuk ibu dan anak. Definisi bidan menurut Ikatan Bidan Indonesia (2006) merupakan seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang telah berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik (membantu proses persalinan/melahirkan). Rasio bidan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah bidan dan jumlah penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Jumlah dan rasio bidan di Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.31 Rasio Bidan per Satuan Penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Bidan	Orang	428	371	33	543	471
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	450902	430021	430630	431203	471654
Rasio Bidan per Satuan Penduduk		Per 100.000 jiwa	95.11	86.27	6.96	125	113

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang

Jumlah bidan di Kabupaten Tulang Bawang pada periode 2019–2023, dengan kecenderungan fluktuatif. Jumlah bidan pada tahun 2023 sebesar 471 orang. Rasio bidan mengalami kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2023 rasio bidan per 100.000 penduduk sebesar 113. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya 100 orang bidan melayani 100.000

penduduk, jumlah bidan di Kabupaten Tulang Bawang telah memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang.

6) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada bumil, bulin, dan bufas dengan komplikasi. Perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam berikut.

Tabel 2.32 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat Penanganan	Orang	1061	1103	1243	1369	381
2	Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan	Orang	1614	1794	1243	1569	381
3	Cakupan Komplikasi Kebidanan	persen	65.75	61.49	100	91.71	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang

Berdasarkan tabel di atas, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Tulang Bawang dalam periode tahun 2019–2023 menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Cakupan komplikasi kebidanan paling tinggi yaitu pada tahun 2023 sebesar 100% meningkat dibandingkan pada tahun 2022. Semakin besar persentase menunjukkan bahwa semakin besar penanganan yang diberikan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan. Jumlah penanganan komplikasi kebidanan paling banyak yaitu pada tahun 2022 sebesar 1.369 orang, sedangkan paling sedikit pada tahun 2023 sebesar 381 orang. Dengan demikian, semakin besar terselesaikannya (penanganan) komplikasi kebidanan menunjukkan semakin baik kualitas dan kuantitas bidan dalam menangani masalah kebidanan.

7) Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0–11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur, dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar

lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index terkait dengan angka harapan hidup. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Semakin besar persentase maka semakin besar pula cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization. Perkembangan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Tulang Bawang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.33 Cakupan Kampung/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kampung/Kelurahan UCI	Kampung/kelurahan	142	134	132	128	135
2	Jumlah Kampung/Kelurahan	Kampung/kelurahan	151	151	151	151	151
3	Cakupan Kampung/Kelurahan UCI	Persen	94.04	88.7	87.4	84.8	89.4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang

Berdasarkan tabel di atas, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Tulang Bawang dalam periode tahun 2019–2023 mengalami peningkatan, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmas, maupun rumah sakit sudah baik akan tetapi perlu ditingkatkan lebih baik lagi. Kondisi ini harus ditingkatkan untuk mendapatkan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) secara menyeluruh (100 persen) setiap tahunnya.

8) Cakupan Balita Gizi Buruk dan Stunting Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang ditemukan. Semakin besar persentase cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan menunjukkan semakin baik pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, baik prasarana maupun sarana kesehatan. Perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.34 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	anak	2	3	0	0	4
2	Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	anak	2	3	0	0	4
3	Cakupan Balita Gizi Buruk	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tulang Bawang

Berdasarkan tabel di atas, kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Tulang Bawang dalam kurun waktu 2019–2023 seluruhnya telah mendapatkan perawatan (100%). Beberapa upaya untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat telah dilakukan antara lain melalui Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), Pemulihan Ibu Hamil KEK (Kekurangan

Energi Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk dan Kurang, serta Peningkatan Pembinaan terhadap Posyandu.

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting bisa terjadi mulai dari dalam kandungan, bayi baru lahir (dengan panjang <48 cm) sampai dengan anak usia dua tahun.

Stunting merupakan salah satu program nasional. Kondisi balita stunting di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan data Survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2023 sebesar 9,8% atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 10,2%. Capaian keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk menanggulangi masalah gizi (stunting dan gizi buruk).

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan dalam segala bidang tidak akan berjalan dengan signifikan tanpa adanya dukungan infrastruktur. Pilar infrastruktur yang dimaksud meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur teknis, infrastruktur sains, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pendidikan.

1) Infrastruktur Jalan

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak

mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebutkan bahwa persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan didapatkan dari perbandingan antara kondisi jalan baik dengan panjang jalan penghubung pusat kota. Kondisi jalan baik diartikan sebagai kondisi jalan dengan kondisi baik dan sedang. Kondisi jalan yang baik diasumsikan mampu untuk mendukung pengembangan wilayah dari segi kegiatan ekonomi maupun pengembangan infrastruktur.

Tabel 2.35 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Kondisi Jalan	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	Km	403	285	30	46,15	64,21
2	Sedang	Km	110	211	512	170,41	170,41
3	Rusak Ringan	Km	104	342	394	75,42	75,42
4	Rusak Berat	Km	425	203	105	494,12	476,02
Jalan Mantap		Km	513	496	542	216,56	234,62
Total Panjang Jalan Kabupaten		Km	1042	1042	1042	786,08	786,08

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tulang Bawang cenderung mengalami peningkatan, yang berarti jalan di Kabupaten Tulang Bawang tiap tahun sudah berada pada tingkatan yang hampir memadai guna mendukung pergerakan orang dan barang. Akan tetapi sejak pasca Pandemi Covid-19, salah satu dampak yang terjadi adalah tidak terlaksananya program pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pasca pandemi COVID-19.

Sehingga persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan.

2) Pengairan/Irigasi

Ketersediaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian. Adapun data prasarana irigasi/pengairan sebagai berikut :

Tabel 2.36 Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan di Kabupaten Tulang Bawang

No	Jenis	2019 (m)	2020 (m)	2021 (m)	2022 (m)	2023 (m)
1	Saluran Primer	119.163	119.163	119.163	119.163	132.535
2	Saluran Sekunder	388.324	393.794	393.794	393.794	414.628
3	Saluran Kolektor	17.474	17.474	17.474	17.474	17.474
Panjang Saluran Irigasi		524.961	530.431	530.431	530.431	564.637

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang

Keberadaan sarana dan prasarana irigasi terkait langsung dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Kabupaten Tulang Bawang, terutama untuk menunjang peningkatan produksi pertanian.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Terdapat 5 (lima) indikator yang dirinci dalam urusan perumahan, diantaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, penyediaan sanitasi, lingkungan permukiman kumuh, serta indikator rumah layak huni.

1) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini. Oleh karena itu pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia. Salah satu faktor penting penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk kebutuhan air minum. Air minum yang layak sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, kualitas air minum yang layak ditetapkan harus memenuhi persyaratan fisik, persyaratan kimiawi, persyaratan mikrobiologis. Berdasarkan data akses air minum layak di Kabupaten Tulang Bawang, persentase air minum layak mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 81,47% menjadi 84,62% pada tahun 2023. Hal ini berarti, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang masih memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas air minum bagi rumah tangga yang belum bisa mengakses air minum layak. Permasalahan penyediaan air bersih di Kabupaten Tulang Bawang saat ini tidak saja hanya mencakup kuantitas tetapi juga kualitas dan kontinuitas.

Tabel 2.37 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

Tahun	Sumber Air Minum	Sumber Air Minum
	Bersih *)	Layak **)
2019	67,65	73,04
2020	78,23	78,30
2021	75,60	80,65
2022	75,46	81,47
2023	77,94	84,62

Sumber: BPS Kab. Tulang Bawang

*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, sumur bor/pompa, sumur/mata air terlindung,

**) Terdiri dari air sungai, danau, waduk, kolam, irigasi, air hujan, sumur/mata air tidak terlindung

Persentase rumah tangga menurut sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum dijelaskan secara rinci pada table dibawah ini:

Tabel 2.38 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Utama Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Sumber Air Utama	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Air kemasan bermerk, air isi ulang, Ledeng meteran	26,37	32,93	36,45	29,12	28,59
2	Ledeng Meteran, Leding Eceran	0,38	-	0,23	-	-
3	Sumur Bor/Pompa	12,95	15,10	11,84	16,31	20,08
4	Sumur Terlindungi	41,28	39,9	41,66	40,54	48,6
5	Sumur Tak Terlindungi	17,87	11,31	8,06	9,89	-
6	Mata Air Terlindung, Tak Terlindung	0,73	0,76	0,18	3,38	1,01
7	Air Permukaan	-	-	-	0,3	1,73
8	Air Hujan	0,42	-	1,58	0,46	-

Sumber: BPS Tulang Bawang

2) Rumah Tangga Pengguna Listrik

Pelayanan jaringan listrik oleh PLN di wilayah Kabupaten Tulang Bawang saat ini sudah terpenuhi. Pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN sebesar 88,53%, Non-PLN sebesar 10,51%, kemudian pada tahun 2023 persentase rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN meningkat menjadi sebesar 100%. Selengkapnya persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang

Tahun	Listrik			
	PLN	Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
2019	88,53	10,51	0,96	100
2020	93,34	6,14	0,51	100
2021	99,43	0,57	-	100
2022	98,36	1,64	-	100
2023	100	-	-	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

3) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Salah satu yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah rumah berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih; 2) pembuangan air besar/tinja; 3) pembuangan air limbah air bekas; dan 4) pembuangan sampah. Persentase rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang

No	Tahun	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
1	2019	72,22
2	2020	79,81
3	2021	84,83
4	2022	85,60
5	2023	88,73

Sumber : BPS Lampung

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah,

air hujan atau drainase, dan sampah. Dari definisi tersebut didapatkan bahwa penyediaan sanitasi terbagi menjadi lima indikator, yakni persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, persentase pengurangan sampah di perkotaan, persentase pengangkutan sampah, persentase pengoperasian tempat pembuangan akhir (TPA), persentase penduduk yang terlayani sistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun.

Sedangkan sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.41 Sebaran Kawasan Kumuh Tahun 2022 di Kabupaten Tulang Bawang

No	Kelurahan/Kampung	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Menggala Kota	Menggala	18.63
2	Dwi Warga Tunggal Jaya	Banjar Agung	33.46
3	Tri Tunggal Jaya	Banjar Agung	2.84
4	Tunggal Warga	Banjar Agung	6.49
5	Meda Sari	Rawa Jitu Selatan	10.04
6	Gedung Karya Jitu	Rawa Jitu Selatan	11.29
7	Sungai Nibung	Dente Teladas	23.94
8	Kekitung	Dente Teladas	5.15
Total Luas Kawasan Kumuh			111.84

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dari total keseluruhan kawasan kumuh Kabupaten Tulang Bawang seluas 111,84 Ha, sebagian besar kawasan kumuh terletak di Kecamatan Banjar Agung yaitu seluas 42,79 Ha. Kondisi sebaran kawasan kumuh tersebut dapat menggambarkan adanya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus terus berusaha untuk semakin mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu program unggulan di Kabupaten Tulang Bawang adalah melalui Bedah Rumah.

Tabel 2.42 Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023

No	Kecamatan	Total
1	Banjar Agung	104
2	Banjar Margo	310
3	Gedung Aji	169
4	Penawar Aji	243
5	Meraksa Aji	97
6	Menggala	222
7	Penawar Tama	193
8	Rawajitu Selatan	0
9	Gedung Meneng	0
10	Rawajitu Timur	0
11	Rawapitu	232
12	Gedung Aji Baru	0
13	Dente Teladas	1
14	Banjar Baru	106
15	Menggala Timur	91
Jumlah		1768

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tulang Bawang

Kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah tempat tinggal yang memenuhi kriteria indikator sebagai berikut: 1) jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah, 2) jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas (60% lebih) terbuat dari bambu/kayu kualitas rendah.

Dalam rangka peningkatan kualitas tempat hunian bagi masyarakat kurang mampu (MBR), maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengadakan bedah rumah melalui program “Bedah

Rumah”. Program bedah rumah merupakan program sosial dan pemberdayaan masyarakat dimana sumber dana yang digunakan sama sekali bukan berasal dari APBD tetapi merupakan sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai pihak dan juga yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

Permasalahan yang dihadapi dalam hal perumahan masih tingginya angka defisit rumah (*backlog*), kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum teratasi tuntas, dari sisi kemitraan peran serta dan keswadayaan masyarakat masih rendah, terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya kunci termasuk didalamnya informasi mengenai pembiayaan perumahan.

Selain hal tersebut juga disebabkan daya beli masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) masih lemah. Sedangkan permasalahan di lingkungan perumahan umum yaitu: genangan air atau banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, rumah sudah terbangun namun prasarana pendukung lingkungannya belum optimal, sehingga PSU tidak terpadu antar sistem.

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada maka kedepan harus meningkatkan kualitas pelayanan perumahan, mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan rumah layak huni, penguatan peran kelembagaan perumahan, penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan air bersih dan sanitasi dan peningkatan koordinasi dengan provinsi maupun pemerintah pusat dalam penyelesaian perumahan.

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dilakukan dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat.

Penegakan Perda dan Perbup dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbup untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat, sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan. Adapun kondisi pelanggaran Perda, Linmas dan patrol dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.43 Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelanggaran yang Ditegakkan	pelanggaran	42	42	71	56	32
2	Jumlah Pelanggaran	pelanggaran	53	48	68	56	32
3	Jumlah Patroli	Kali	100	100	100	95	84

Sumber: Satuan Pol PP Kab. Tulang Bawang

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pelanggaran yang ditegakkan terhadap terjadinya pelanggaran telah dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun Kasus yang ditangani antara lain penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), kenakalan remaja, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), bangunan liar dan penyakit masyarakat (Pekat).

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mantap di wilayah/daerah-daerah, dalam arti suatu kondisi dimana Pemerintah dan Rakyat dapat melakukan kegiatan Pembangunan secara aman, tertib dan teratur.

Keberadaan Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, LSM dan Partai Politik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan. Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dapat dilihat dari perkembangan jumlah LSM, Adapun perkembangan jumlah LSM dan Organisasi Masyarakat yang terdaftar selengkapnya dalam tabel berikut:

**Tabel 2.44 Perkembangan Jumlah LSM dan Ormas
Tahun 2019-2023**

No.	Jenis Lembaga	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Lembaga Swadaya Masyarakat	7	10	13	4	3
2.	Organisasi Masyarakat	5	2	3	9	19
3.	Organisasi Kepemudaan	3	2	2	5	-
4.	Lembaga Adat	1	2	1	1	-
5.	Organisasi Profesi	3	7	1	4	1
6.	Lembaga Yayasan	1	-	1	1	-
7.	Partai Politik	10	8	8	8	8

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Tulang Bawang

Keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan dan kedewasaan demokrasi di Kabupaten Tulang Bawang, dimana masing-masing organisasi tersebut memiliki pendapat dan pemahaman yang berbeda dalam mensikapi perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat maupun dalam mensikapi atas kebijakan pemerintah daerah. Namun demikian semuanya mempunyai maksud dan tujuan dan keinginan yang sama yaitu memberikan andil dalam pembangunan baik dalam skala daerah maupun nasional.

Indikator-indikator tersebut di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Tulang Bawang semakin meningkat kehidupan dan ketaatan beragamanya, serta senantiasa menjunjung tinggi rasa toleransi sehingga situasi dan kondisi yang kondusif tetap terjaga. Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat pemerintah daerah senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan jajaran kepolisian dan pihak-pihak terkait, dalam menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, baik melalui patroli keliling ataupun operasi rutin.

Meningkatnya kehidupan beragama, kerukunan hidup antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat juga didukung oleh perkembangan jumlah rumah ibadah yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 jumlah rumah ibadah di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1.634 unit dan pada tahun 2023 jumlah rumah ibadah di Kabupaten Tulang Bawang meningkat menjadi 1.810 unit. Secara rinci jumlah rumah ibadah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.45 Banyaknya Tempat Peribadahan Tahun 2019–2023

No	Jenis Rumah Ibadah	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Masjid	Unit	412	412	483	447	518
2.	Musholla	Unit	1.055	1.419	1.073	1.100	1.175
3.	Gereja	Unit	85	129	129	66	46
4.	Pura	Unit	81	80	80	77	63
5.	Vihara	Unit	6	1	1	5	8
TOTAL			1.634	2.041	1.766	1.695	1.810

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang

Meningkatnya kehidupan beragama, kerukunan hidup antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat dapat didukung pula oleh Jumlah Kegiatan Pembinaan Keagamaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga selalu dilakukan komunikasi antar tokoh agama melalui forum komunikasi umat beragama yang membahas tentang kondisi dan situasi yang berkembang dimasyarakat, memberikan andil yang cukup besar dalam menciptakan kerukunan umat beragama.

Selain itu meningkatnya kehidupan beragama dapat dilihat dari perkembangan jumlah masyarakat yang menunaikan ibadah haji pada setiap tahunnya. Pada tahun 2023 masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang menunaikan ibadah haji meningkat dari tahun 2022 menjadi 188 orang yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Secara rinci perkembangan Jumlah Jamaah haji asal Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.46 Perkembangan Jumlah Jama'ah Haji Asal
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019–2023**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA)	Orang	17	12	27	30	14
Banyaknya Jama'ah Haji	Orang	252	0	0	121	188

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tulang Bawang

Selain itu Kabupaten Tulang Bawang juga didaulat sebagai salah satu kabupaten yang mampu menangani konflik sosial dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

F. Sosial

Sasaran utama penanganan permasalahan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Kesulitan, hambatan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial, keterbelakangan atau kondisi perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS), perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, Karang Taruna, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti

asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Menurut Kementerian Sosial RI, PMKS tercatat ada 26 jenis. Jenis PMKS komunitas adat terpencil tidak ada di Kabupaten Tulang Bawang, namun menambahkan jenis PMKS anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan (KTK) atau diperlakukan salah dan keluarga bermasalah sosial psikologis.

Tabel 2.47 Capaian Indikator Penyelenggaraan Bidang Sosial Tahun 2022-2023 di Kabupaten Tulang Bawang

No	Tahun	Satuan	Tahun	
			2022	2023
1	Cakupan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat) yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial	%	87,23	16,21
2	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan bantuan	%	59,36	77,19

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tulang Bawang

Dalam upaya mengurangi angka PPKS dan angka PMKS tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melakukan intervensi yang terarah diantaranya:

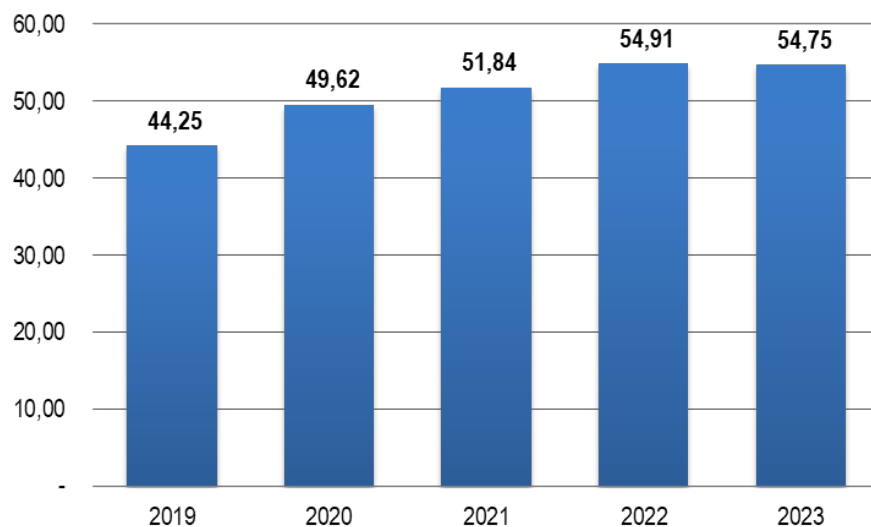
- Mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan arah kebijakan pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
- Peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin;
- Pemberdayaan masyarakat miskin;

Membangun sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta (CSR/TJSP) dalam program pengentasan kemiskinan.

G. Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Sebagai wujud komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, telah disusun road map reformasi birokrasi tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023.

Gambar 2.36 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang, 2024

Reformasi birokrasi Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang dicerminkan melalui nilai dan peringkat indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan gambar di bawah, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2019

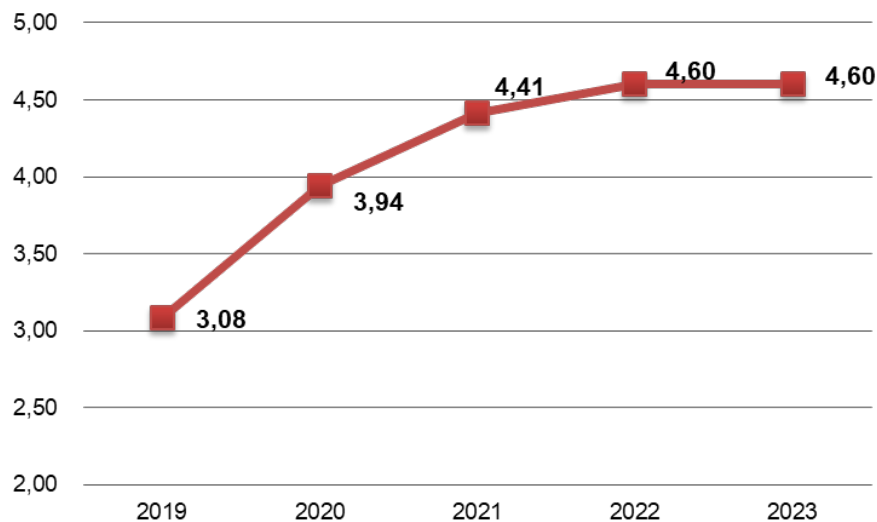
hanya sebesar 44,25 dan selama dua tahun yaitu tahun 2019 hingga 2020 predikat indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tulang Bawang adalah C. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2022, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tulang Bawang meningkat dengan predikat CC dan pada tahun 2023, indeks reformasi birokrasi turun menjadi 54,75 dengan predikat C. Indeks reformasi birokrasi yang semakin meningkat untuk Kabupaten Tulang Bawang mengindikasikan bahwa masyarakat telah secara langsung merasakan adanya manfaat dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang diharapkan dapat terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital agar dapat mempertahankan capaian indeks reformasi birokrasi.

Selain itu, pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sdm, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi.

Capaian IPP Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 IPP Kabupaten Tulang Bawang memperoleh nilai 3,08 (B-) dengan kategori Baik Dengan Catatan, tahun 2020 nilai IPP meningkat menjadi 3,94 (B) dengan kategori Baik, tahun 2021 nilai IPP kembali meningkat menjadi 4,41 (A-) dengan kategori Sangat Baik, pada tahun 2022

hingga tahun 2023 nilai IPP Kabupaten Tulang Bawang meningkat dengan nilai 4,6 (A) dengan kategori Pelayanan Prima.

Gambar 2.37 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: Bagian Organisasi Setdakab. Tulang Bawang, 2024

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

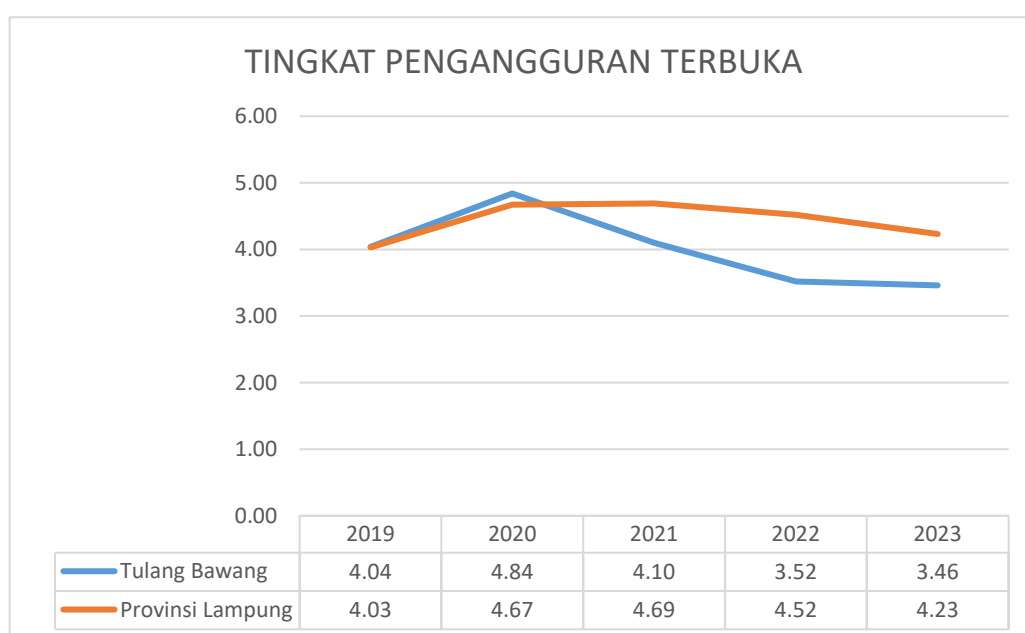
A. Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam upaya pemerintah daerah mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mengingat jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang didominasi oleh penduduk usia produktif, maka ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator yang penting, di samping mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat usia produktif.

**Gambar 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Tulang Bawang

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,46%. Beberapa faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran di Kabupaten Tulang Bawang antara lain, yaitu:

1. Pasca Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia, membuat perekonomian melemah bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran termasuk di Kabupaten Tulang Bawang.

2. Faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi yang tidak diimbangi dengan luasnya lapangan kerja yang tersedia.
3. Tren pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum diiringi oleh penurunan angka pengangguran. Hal tersebut terjadi karena kontribusi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang terbesar ditopang oleh sektor *non tradable* (sektor yang tidak menyerap tenaga kerja banyak) dan elastisitas pertumbuhan ekonomi dalam menyerap tenaga kerja semakin rendah.
4. Masih besarnya proporsi tenaga kerja *unskill* dengan tingkat pendidikan rendah di Kabupaten Tulang Bawang mendorong masih tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Tulang Bawang serta akan meningkatkan keberadaan sektor informal.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2019 sebanyak 223.992 orang, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebanyak 235.345 orang.

Tabel 2.48 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Tahun 2019–2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angkatan Kerja	223.992	232.474	230.773	225.601	235.345
2.	Bukan Angkatan Kerja	104.029	100.451	107.030	117.027	93.939
	1. Sekolah	18.361	21.837	15.281	24.198	18.763
	2. Mengurus Rumah Tangga	77.160	70.040	79.263	87.479	64.272
	3. Lainnya	8.508	8.574	12.486	5.350	10.904
	Jumlah	328.021	332.925	337.803	342.628	329.248

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Tulang Bawang

Untuk mengatasi masalah meningkatnya jumlah angkatan kerja telah dilakukan beberapa upaya untuk menstimulasi munculnya lapangan pekerjaan baru maupun penyiapan bagi pencari kerja agar siap pakai, diantaranya menempatkan tenaga kerja melalui

program antar kerja lokal, program antar kerja antar daerah dan program antar kerja antar negara. Disamping itu dilakukan pula upaya-upaya pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.

Lapangan usaha yang menjadi sumber penyerapan tenaga kerja dan perkembangan ekonomi daerah tumbuh variatif, sehingga daya serap tenaga kerja dan kontribusinya pada PDRB berbeda. Kemampuan lapangan usaha sektor utama dalam penyerapan tenaga kerja pada periode 2019-2023 cukup fluktuatif. Berikut ini disampaikan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2019-2023.

Tabel 2.49 Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang

No	Jenis Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian	107.298	115.541	114.457	110.330	120.948
2	Manufaktur	25.936	28.294	26.148	23.088	20.168
3	Jasa	81.782	77.395	80.702	84.242	86.081
Jumlah		215.016	221.230	221.307	217.660	227.197

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulang Bawang

Tingginya angka pencari kerja serta semakin tingginya tingkat kompetensi pencari kerja semakin mempersempit kesempatan tenaga kerja lokal untuk bersaing dengan para pendatang. Banyaknya tenaga pencari kerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50 Banyaknya Tenaga Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2023

No	Tingkat Pendidikan	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/Sederajat	Orang	4	2	26	15	270
2	SLTP/Sederajat	Orang	143	159	23	23	289
3	SLTA/Sederajat	Orang	5769	6181	372	376	-
4	Diploma/Akademi/Universitas	Orang	1670	1842	43	159	27
Jumlah			7983	8640	420	573	586

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulang Bawang

Pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan pencari kerja dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, terciptanya tenaga kerja yang terampil, berpengetahuan yang mengacu kepada kompetensi kerja. Jenis pelatihan keterampilan dan jumlah pencari kerja yang dilatih pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51 Jenis Pelatihan Keterampilan dan Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih Tahun 2018-2022

No	Jenis Pelatihan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Pelatihan Perhotelan	orang	20	-	-	20	-
2	Pelatihan Mekanik Roda 2	orang	20	20	20	20	-
3	Pelatihan Teknisi Handphone	orang	20	20	20		-
4	Pelatihan Teknisi Komputer	orang	20	20	20	20	-
5	Pelatihan Pengelasan	orang	20	20	20		-
6	Pelatihan Salon Kecantikan	orang	-	20	20	20	-
7	Pelatihan Mengemudikan Mobil	orang	20	20	20		-
8	Pelatihan Tata Boga	orang	-	20	20	20	-
9	Pelatihan Souvenir	orang	20	20	20	20	-
Jumlah			140	140	160	120	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulang Bawang

Kontribusi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah TKI asal Tulang Bawang menurut negara tujuan selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.52 Perkembangan Jumlah TKI Asal Tulang Bawang Menurut Negara Tujuan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Malaysia	orang	28	28	23	81	83
2	Saudi Arabia	orang	4	4	-	2	4
3	Hongkong	orang	5	5	-	58	72
4	Taiwan	orang	2	2	-	303	271
5	Singapura	orang	1	1	1	49	67
6	United Emirate Arab (UEA)	orang	-	-	-	-	-
7	Kuwait	orang	-	-	-	-	1
8	Polandia	orang	-	-	-	3	-
9	Romania	orang	-	-	-	1	-
10	United Kingdom	orang	-	-	-	1	-
Jumlah			40	40	24	498	498

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tulang Bawang

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan komitmen nasional sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia yang dimaksudkan untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan, juga masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Data IPG dihitung dan dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. IPG yang digunakan saat ini merupakan IPG Tahun 2022 yang dirilis Maret 2023. Capaian IPG 2023 dirilis oleh BPS sekitar bulan Maret sampai pertengahan 2024. Jika dibandingkan dengan capaian 2021, IPG Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan sebesar 0,62 poin dari Indeks sebesar 89,56 pada tahun 2021 menjadi 90,18 pada tahun 2022. Kenaikan ini menjadi salah satu aspek yang menunjukkan semakin baiknya kesetaraan gender di Kabupaten Tulang Bawang.

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tertangani terealisasi 100%, yang diperoleh dari 5 kasus perempuan korban kekerasan yang melapor seluruhnya dapat tertangani, serta 2 kasus perempuan korban TPPO. Selanjutnya, persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait pada tahun 2023 terealisasi 100%, yang mana sejumlah 24 anak korban kekerasan tersebut seluruhnya dapat tertangani.

Sebagai bentuk komitmen Kabupaten Tulang Bawang dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 kategori “Nindya”. Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan Kementrian PPPA untuk kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai bentuk pengakuan, komitmen dan peran para kepala daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada bidang pembangunan.

Selain itu *outcome* serta manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut :

- 1) Pembangunan dapat dinikmati secara seimbang dan bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki dari berbagai segmen dan kelompok usia. Hal ini juga tergambar dari meningkatnya jumlah program dan kegiatan pembangunan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsive gender.
- 2) Pembinaan dan Apresiasi peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera (P3KSS), bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan persiapan lomba P3KSS tingkat Provinsi Lampung.
- 3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kelompok berbasis perempuan dan perlindungan anak, eksistensi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebagai *agent of transfer* mengakomodasi peran perempuan lintas lembaga yang terdiri dari 13 organisasi wanita di Kabupaten Tulang Bawang.
- 4) Meningkatnya peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. Peran serta perempuan dalam proses

pembangunan di segala bidang ditandai dengan kesempatan bagi perempuan berperan di lembaga pemerintah dan non pemerintah dan sektor informal.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2023 dilakukan melalui:

- a). berbagai bentuk pola pemberdayaan perempuan untuk mendorong pembentukan embrio usaha pada kelompok perempuan pengembangan ekonomi produktif;
- b). perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan melalui upaya peningkatan layanan pengaduan, pendampingan dan rehabilitasi bagi korban, selain itu juga melaksanakan kegiatan sosialisasi upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak;
- c). penguatan kader Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- d). pemenuhan hak-hak anak yang meliputi pencatatan kelahiran, layanan kesehatan dan pendidikan, kesejahteraan sosial. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya pemberian bantuan Mobil perlindungan dan Motor Perlindungan yang sangat berguna dalam mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain itu Kabupaten Tulang Bawang juga mempunyai komitmen untuk menjadi kabupaten layak anak;

Selain itu Kabupaten Tulang Bawang juga mempunyai komitmen untuk menjadi kabupaten layak anak. Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana. Kabupaten dapat dikatakan KLA apabila seluruh Kecamatan di kabupaten tersebut layak anak, dan Kecamatan dapat dikatakan layak anak apabila seluruh kampung/kelurahannya layak anak, begitu pula

kampung/kelurahan dikatakan layak anak jika semua RW/RT dan keluarga layak anak. Kondisi capaian kinerja KLA pada tahun 2023 tercapai dengan kategori “Nidya” dengan nilai 729,5. Dengan ditetapkannnya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, diharapkan komitmen semua pihak yang terlibat dan harus berkontribusi dalam penyelenggaraan KLA di Kabupaten Tulang Bawang semakin kuat, dimulai dari perencanaan, penetapan, serta pelaksanaan seluruh program pembangunan yang berorientasi pengarusutamaan hak anak (PUHA) dan perlindungan anak. Sebagai wujud dari pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tulang Bawang, bahwa setiap kesenjangan gender telah diakomodir melalui penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kampung/Kelurahan. Dalam mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dengan lokus pada Desa Banjar Dewa dan Desa Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung, penyusunan Raperda tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang serta pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dan Gerakan Sayang Ibu (GSI).

C. Pangan

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,

pengolahan dan/atau pembuatan makanan/minuman. Termasuk di dalam pengertian pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Pengertian pangan di atas merupakan definisi pangan yang dikeluarkan oleh badan dunia untuk urusan pangan, yaitu Food and Agricultural Organization (FAO).

Pembangunan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan.

Secara umum keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan ketahanan pangan dapat dilihat dari skor Pola Pangan harapan (PPH), Ketersediaan Pangan Utama (beras) per kapita per tahun, dan ketersediaan energi, lemak dan protein.

Pada tahun 2023 Skor PPH Kabupaten Tulang Bawang mencapai 88,06% atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 83,5%. Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat yang mulai berimbang antar kelompok pangan sumber zat gizi dimana konsumsi padi-padian terutama beras mulai diimbangi dengan konsumsi pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah.

Ketersediaan pangan sampai dengan tahun 2023 ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 76.933 ton/tahun. Sedangkan apabila dilihat dari ketersediaan energi dan protein pada tahun 2023, ketersediaan energi perhari 3.271,74 kalori, serta ketersediaan protein perhari 96,20 gram. Adapun

secara rinci perkembangan ketersediaan pangan utama, energi dan protein selama tahun 2019-2023 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.53 Perkembangan ketersediaan pangan utama, energi dan protein Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Skor Pola Pangan Harapan/PPH	77	95,1	83,2	83,5	88,06
Ketersediaan pangan utama (ton/tahun)	59.093	60.587	74.463	74.992	76.933
Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (ton)	10	10	10	15	15
Ketersediaan energi per kapita (kalori/hari)	2.583,12	2.784,97	3.176,3	3.258,93	3.271,74
Ketersediaan protein per kapita (gram/hari)	79,91	82,54	83,2	90,44	96,20

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kab. Tulang Bawang

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama (beras) pada tahun 2023 antara lain :

1. Pembangunan 5 unit lumbung pangan masyarakat (LPM) dan sarana pendukung berupa 5 unit lantai jemur, 5 unit rumah rice milling unit (RMU) dan bed dryer serta penyediaan sarana pendukung berupa 5 unit RMU dan 5 unit bed dryer yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2023 untuk 5 Gapoktan yang berlokasi di Kampung Suka Makmur dan Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji, Kampung Kecubung Jaya Kecamatan Gedung Aji, Kampung Kecubung Raya Kecamatan Meraksa Aji dan Kampung Batu Ampar Kecamatan Gedung Aji Baru.
2. Meningkatkan distribusi pangan melalui peningkatan 8 (delapan) kelompok/LUPM (Lembaga Usaha Pangan Masyarakat) untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan maupun lembaga distribusi pangan (LDP) Kabupaten Tulang Bawang;

3. Meningkatkan kinerja 20 (dua puluh) kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat) melalui pembinaan dalam rangka pengelolaan dan peningkatan volume Cadangan Pangan Masyarakat (CPM);
4. Melaksanakan Pemantauan Harga ditingkat Pengecer (pasar) Secara Berkala, Baik Harian Maupun Mingguan;
5. Menghitung Ketersediaan Beras, Energi/Kapita, Protein dan Lemak Kabupaten Tulang Bawang melalui Aplikasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Setiap Tahun; dan
6. Menyusun Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security Vulnerability And Atlas (FSVA) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023.

Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan/Food Security Vulnerability And Atlas (FSVA) merupakan salah satu mekanisme untuk mengembangkan system informasi pangan dan gizi yang terintegrasi dalam hal menentukan daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan dan penyebabnya.

FSVA sebagai bahan kebijakan untuk menentukan program strategis yang dapat dilakukan dalam hal Pemenuhan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Upaya yang dilakukan dalam Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan antara lain :

- Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Putri Agung Menggala dan Pasar Unit 2 Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- Terlaksananya 3 (tiga) Peregistrasian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Komoditi Beras.
-

D. Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan, melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan.

Secara prioritas nasional, pembangunan urusan lingkungan hidup dititikberatkan pada lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

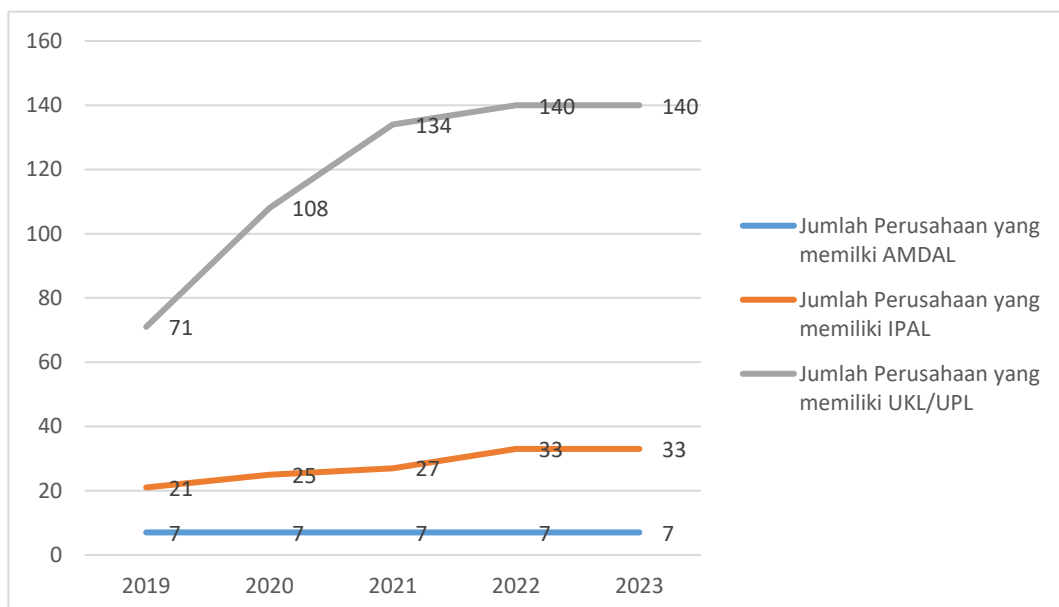
Keberhasilan pencapaian indikator kesadaran perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dari jumlah perusahaan/industri yang memiliki Dokumen AMDAL bagi industri yang wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Dokumen UKL/UPL bagi industri yang wajib UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) - UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) bagi industri yang menghasilkan limbah berupa limbah cair. Secara rinci perkembangan perusahaan yang memiliki AMDAL, IPAL dan UKL/UPL sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.54 Perkembangan Perusahaan yang memiliki AMDAL, IPAL dan UKL/UPL Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Perusahaan yang memiliki AMDAL	7	7	7	7	7
2.	Jumlah Perusahaan yang memiliki IPAL	21	25	27	33	33
3.	Jumlah Perusahaan yang memiliki UKL/UPL	71	108	134	140	140

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Gambar 2.39 Perkembangan Perusahaan yang memiliki AMDAL, IPAL dan UKL/UPL Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama perubahan undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas

pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Pasal 1 pada poin 1 menyatakan bahwa urusan kependudukan dan catatan sipil terfokus pada administrasi kependudukan yang meliputi rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen serta data kependudukan, yang mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang di mana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti otentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, dan pengangkatan anak yang merupakan bagian regulasi publik.

Capaian indikator pelayanan kependudukan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 menunjukkan hampir seluruhnya mencapai 100,00%. Capaian indikator dibawah 100,00% terjadi pada cakupan penerbitan KTP-el (95%) dan cakupan penerbitan KIA (35%). Cakupan penerbitan KTP-el selama 2023 naik dibandingkan

tahun 2022 sebesar 5% sedangkan untuk cakupan penerbitan KTP-el mengalami kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, salah satunya melalui kegiatan pelayanan jemput bola/ keliling ke kampung-kampung di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Pelayanan jemput bola tersebut, dimaksudkan sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dokumen kependudukan, antara lain perekaman KTP elektronik, pelayanan akta kelahiran, dan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). Mengingat armada e-mobile KTP baru sebanyak 1 unit, kegiatan pelayanan jemput bola pada tahun 2022 telah melayani 53 kampung di 15 kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang, dimana pelayanan keliling dipusatkan di kampung-kampung yang memiliki kualitas jaringan internet baik.

Selain itu juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 telah menerapkan tandatangan elektronik, dimana dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak harus ditandatangani secara manual tapi secara elektronik dengan mencantumkan QR Code pada dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak terhambat hanya dikarenakan menunggu tandatangan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Hal ini berdampak pada kecepatan proses pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lebih efektif dan efisien dalam peningkatan pelayanan.

Untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah membuat inovasi

pelayanan secara online (dalam jaringan) dan layanan dengan aplikasi Whatsapp (WA), kedua layanan itu dapat diakses warga Tulang Bawang dimana saja dan akan segera dilayani secara optimal oleh petugas. Apabila dokumen kependudukan sudah disetujui, selanjutnya akan diinformasikan melalui layanan pesan singkat (SMS). Pemohon dapat mengambil dengan membawa persyaratan yang telah diunggah sebelumnya.

Selengkapnya jumlah layanan kependudukan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.55 Jumlah layanan kependudukan Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	301.479	300.765	274.903	284.891	34.817
2	Kartu Keluarga	136.116	140.154	138.479	140.724	28.649
3	Akte Kelahiran	51.828	53.390	5.083	11.598	11.222
4	KIA	910	26.378	6.526	28.433	29.558
5	Layanan Pindah Datang	2.113	934	717	1.483	1.014
6	Layanan Pindah Keluar	5.412	2.783	1.721	4.248	1.856

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

F. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang memungkinkan masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat mencakup inklusi dan partisipasi; akses pada informasi; kapasitas organisasi lokal; dan profesionalitas pelaku pemberdayaan. Di Kabupaten Tulang Bawang kebijakan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Capaian keberhasilan penyelenggaraan bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan melalui inisiasi, pembinaan dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BumDES), yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan Asli Desa. Sampai dengan tahun 2023 seluruh kampung di Kabupaten Tulang Bawang telah membentuk BumDES dan Badan Usaha Milik Antar Kampung (BumaKAM) di 147 Kampung. Selain itu Pada tahun 2022, Kabupaten Tulang Bawang memiliki 2 Kampung Mandiri dan pada tahun 2023 jumlah kampung Mandiri mengalami kenaikan sebesar 1% atau terdapat 4 Kampung Mandiri. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.

Keberadaan dan kiprah Tim Penggerak PKK telah diakui kebermanfaatannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. TP PKK juga memberikan harapan besar bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Jumlah kelompok PKK di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 147 kelompok yang tersebar di seluruh kampung se-Kabupaten Tulang Bawang. Adapun kegiatan yang direncanakan meliputi dasa wisma, posyadu, pembinaan tanaman obat keluarga, pemanfaatan pekarangan untuk tanaman sayuran, pembinaan usaha ekonomi keluarga, serta pembinaan KB, dengan kegiatan – kegiatan tersebut diharapkan tujuan organisasi PKK yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera dapat terwujud.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2023 juga dipengaruhi adanya pemberian bantuan Alokasi Dana Kampung dengan pagu total sebesar Rp. 63.672.072.240,- dengan rata-rata perkampung sebesar $\pm$ Rp. 433.143349,- sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi di kampung. Adapun capaian hasil pembangunan kampung dari Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.56 Hasil Pembangunan Dana Desa Tahun 2021-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun		2023
			2021	2022	
1	Jalan Onderlagh	meter	71.971	2.347	131.524
2	Jalan Aspal / Lapen	meter	11.155	-	6.605
3	Rabat Beton	meter	31.404	-	3.000
4	Pembukaan Badan Jalan / Jalan Tanah	meter	105.288	3.663	15.476
5	Jembatan	unit	95	-	18
6	Drainase	meter	42.417	-	10.389
7	Irigasi	meter	5.950	4.710	11.545
8	Gorong-gorong	unit	352	6	-
9	Tembok Penahan Tanah	meter	1.701	-	467
10	Tambatan Perahu	meter	23	-	-
11	Sumur	unit	183	1	26
12	Perpipaan	unit	86	-	15
13	MCK	unit	85	-	6
14	Jamban Keluarga	unit	5.847	-	-
15	PAUD	unit	31	-	5
16	Polindes	unit	11	-	1
17	Posyandu	unit	35	-	19
18	Sarana olah raga	unit	33	-	-
19	Taman bermain / Ruang terbuka Hijau	unit	121	1	-
20	Pasar	unit	20	-	3

No	Uraian	Satuan	Tahun		2023
			2021	2022	
21	Sarana Pariwisata	unit	24	-	-
22	Gedung Bumdes	unit	4	-	-
23	Balai Kampung	unit	46	-	-
24	Jaringan Internet	unit	31	-	2
25	Penerangan Jalan Umum	unit	14.289	-	-
26	Sarana Pendukung Embung	unit	11	-	1
27	Pengembangan Tanaman Ubi Kayu / Singkong	hektar	-	31	-
28	Penanaman Sayuran	paket	-	2	-
29	Pengadaan Bibit Tanaman	unit	-	2	-
30	Perbaikan dan Pembuatan Kandang	paket	-	3	-
31	Pengadaan Hewan Ternak	ekor	-	107	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Tulang Bawang

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Indonesia Yang Maha Esa dengan Tujuan meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas dan Sejahtera.

Pemerintah meyakini bahwa Program KB sebagai salah satu Upaya Jitu dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk yang terkendali akan berkontribusi besar dalam menciptakan penduduk berkualitas. Selain mempunyai tujuan pengendalian jumlah penduduk, Program KB sekaligus juga berdampak pada Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) Pendewasaan Usia

Perkawinan, Peningkatan Perekonomian Keluarga serta Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Program KB di Kabupaten Tulang Bawang masih sangat dibutuhkan dalam rangka menekan Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi dan menciptakan Generasi Berencana yang Berkualitas.

Upaya pengaturan kelahiran melalui program Keluarga Berencana dari tahun ke tahun semakin dipermudah dalam mendapatkan pelayanan. Kemudahan berupa layanan antar jemput calon akseptor KB, perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana bersama mitra kerja melalui kegiatan Bakti Sosial dan ketersediaan alat dan obat di fasilitas kesehatan (faskes) terdekat selalu terjaga. Kepesertaan KB Aktif ditunjukkan dengan nilai prevalensi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sampai dengan Tahun 2023 jumlah peserta KB aktif sebanyak 48.852 dari jumlah PUS sebanyak 68.515 atau sebesar 71,30%.

Tabel 2.57 Capaian Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,68	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Rasio Akseptor KB	78,66	79,57	80,14	63,69	71,30
3	Cakupan PUS peserta KB aktif	91.568	95.060	98.433	41.253	48.852
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	15,93	13,31	16,54	14,13	11,29
5	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,52	2,52	2,26	2,26	2,30
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,15	1,11	0,19	0,16	0,16

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina

Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) serta Klinik Ketahanan Keluarga. Dalam rangka penguatan program Bangga Kencana, sejak tahun 2019 Kabupaten Tulang Bawang telah mengembangkan Kampung KB sebagai basis kegiatan program Bangga Kencana secara lengkap mulai dari PIK Remaja (PIK-R), BKB, BKR, BKL, UPPKS dan sektor pembangunan lainnya di tingkat kampung. Hingga tahun 2023, di Kabupaten Tulang Bawang telah terbentuk 108 Kampung KB, dari 147 kampung KB dan baru terealisasi di Tahun 2023 sebanyak 108 Kampung KB, dan sisanya ditargetkan harus selesai pada tahun 2024 ini sebanyak 39 Kampung KB lagi, sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2022.

H. Perhubungan

Selama kurun waktu tahun 2019-2023 jumlah kendaraan yang telah diuji KIR mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 1.722 kendaraan. Perkembangan jumlah kendaraan yang uji KIR pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.58 Perkembangan Jumlah Kendaraan Yang Uji Kendaraan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kendaraan Yang Uji KIR (unit)	3.722	2.068	2.440	1.636	1.722

Sumber: Dinas Perhubungan

Sumbangan pendapatan dari pos uji kendaraan yang melakukan uji kendaraan di Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023 sebesar Rp. 126.620.000,- menjadi sebesar Rp. 132.740.000,-. Perkembangan jumlah sumbangan pendapatan dari pos uji kendaraan tahun 2019-2023 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.59 Perkembangan Jumlah Sumbangan Pendapatan
Dari Pos Uji Kendaraan Tahun 2019–2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Jumlah Sumbangan Pendapatan	98.357.000	91.087.673	193.965.000	126.620.000	132.740.000

Sumber: Dinas Perhubungan

Meningkatnya disiplin dan ketertiban berlalu lintas dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat, Operasi dan Pembinaan Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum serta terpasangnya sarana keselamatan transportasi darat.

I. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus memfasilitasi penyebaran informasi hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Keberhasilan ini dicapai melalui upaya peningkatan SDM kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas informasi dengan menyajikan informasi yang akurat dan terbaru serta berpartisipasi dalam pameran/expo.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi, telah menjadikannya salah satu kebutuhan pokok dan komoditas penting bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga informasi yang akurat, cepat, tepat dan terpercaya menjadi tuntutan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini, merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat dan pemerintah ini terbukti dengan semakin luasnya penggunaan teknologi informasi di berbagai bidang serta transaksi lainnya disamping untuk kepentingan riset dalam pengembangan teknologi. Sehingga pemanfaatan teknologi yang efisien mempunyai peranan yang strategis dan penting dalam

pertumbuhan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government dengan menselaraskan dan mengintegrasikan seluruh website OPD di Kabupaten Tulang Bawang menjadi satu portal dalam *tulangbawangkab.go.id*.. Selain itu pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga telah mendapat capaian keberhasilan urusan komunikasi dan informatika juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya media cetak harian/mingguan/online dan media elektronik yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sampai dengan tahun 2023 jumlah media elektronik yang bekerja sama sebanyak 5 (lima) yaitu ANTV Lampung, Lampung TV, INews TV, Jendela Lampung News TV, Saburai TV, dan untuk media cetak harian sebanyak 53 (lima puluh tiga), media cetak mingguan sebanyak 81 (delapan puluh satu) dan 145 (seratus empat puluh lima) media online.

Tabel 2.60 Perkembangan Surat Kabar Nasional/Lokal, Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi Nasional/Lokal di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Surat Kabar	77	77	66	101	134
2	Stasiun Televisi	14	14	7	8	5
3	Stasiun Radio	7	7	7	7	-

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Keberadaan koperasi sangat diperlukan dalam kerangka membangun institusi yang menjadi mitra Negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan koperasi bertujuan menciptakan kesejahteraan anggota koperasi dan koperasi mampu mandiri.

Pemerintah berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi serta memberikan bimbingan dan perlindungan kepada koperasi sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan.

Koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Tulang Bawang memiliki peran dalam pemantapan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan utama menciptakan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan investasi daerah. Dari segi pertumbuhan UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami peningkatan yang cukup tajam. Sementara itu, dari aspek penguatan dan perluasan lembaga-lembaga ekonomi mikro, kecil, menengah dan koperasi, dapat disampaikan bahwa upaya-upaya penguatan dan perluasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian utama untuk dikembangkan terutama pada sektor basis, karena sektor ini terbukti cukup signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun pendapatan per kapita yang digulirkan terus mengalami peningkatan.

Untuk mendukung peran tersebut dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, Dinas Koperasi dan UKM menyusun arah Kebijakan program pada urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil menengah melalui:

- 1) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM);
- 2) Fasilitasi akses permodalan KUMKM;
- 3) Fasilitasi akses pemasaran Produk Koperasi.

Sasaran pembangunan koperasi dan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang diarahkan pada pengembangan koperasi dan UMKM menjadi unit usaha yang kuat, maju dan mandiri. Adapun sasarannya adalah peningkatan kinerja dan produktifitas usaha dan menumbuhkan wirausaha baru. Secara umum perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan hal yang positif bagi peningkatan aktivitas perekonomian, pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Sampai dengan tahun 2023 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 204 koperasi, dari sebanyak 204 koperasi yang aktif 77 koperasi dan telah berbadan hukum sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10/PER/KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan. Pada pasal 32 dijelaskan tentang Pembubaran Koperasi, bahwa Menteri Koperasi dan UKM RI dapat membubarkan koperasi apabila tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut turut dan Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha bersama selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan dan pendirian koperasi. Secara rinci jumlah koperasi di Kabupaten Tulang Bawang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.61 Perkembangan Jumlah Koperasi dan UMKM
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Koperasi Aktif	53	58	58	61	77
2.	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	40	42	45	30	22
3.	Jumlah Koperasi	194	198	202	202	204
4.	Jumlah UMKM	1.098	4.713	28.692	36.305	38.292

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Tulang Bawang direncanakan akan dilaksanakan secara online di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang, hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan secara seragam, mudah, cepat dan transparan. Selain itu melalui pengurusan IUMK akan diperoleh database UMKM secara akurat. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil dan SK Bupati Tulang Bawang Nomor 22 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat. Berdasarkan ketentuan tersebut seluruh pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tulang Bawang diwajibkan untuk mengurus perijinan IUMK sebagai tanda legal formal usaha mereka. Sampai dengan tahun 2023, jumlah Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang telah diterbitkan sebanyak 38.292 ijin.

Selain itu pada tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga bersinergi dengan Lembaga Keuangan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable, melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan

dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif. Penyaluran KUR pada Tahun 2023 di Kabupaten Tulang Bawang tercatat sebanyak 14.413 Debitur dengan total Nilai Akad 553,2 Miliar.

K. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah faktor produksi yang sangat penting dalam usaha meningkatkan aktivitas ekonomi, selain faktor produksi lainnya seperti sumber daya manusia, teknologi, lahan dan lain sebagainya. Pembentukan investasi yang tinggi pada umumnya mengindikasikan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Secara umum keberhasilan urusan penanaman modal dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), jumlah tenaga kerja yang terserap oleh PMA dan PMDN serta nilai investasi PMA dan PMDN.

Perkembangan investasi di Tulang Bawang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan data dari National Single Window for Investment (NSWI) pada tahun 2023 capaian Realisasi Investasi Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 283.326.947.566,-. Dengan rincian bersumber dari Investasi PMDN sebesar Rp. 236.196.400.000,- dan sebesar Rp. 47.130.547.566 yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA).

Iklim usaha di Kabupaten Tulang Bawang menunjukan pertumbuhan positif. Pada tahun 2023 mencapai 15.194 perizinan pengurusan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 7.817 perizinan. Secara Rinci Jumlah

Penerbitan Perizinan dan Non Perincian di Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :

Tabel 2.62 Jumlah Penerbitan dan Non Perizinan Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1.	Dalam Aplikasi OSS RBA	7.076	14.527
2.	Dalam APLIKASI sicantik Coud	734	642
3.	Dalam Aplikasi SIMBG	7	25
Total Izin		7.817	15.194

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

L. Kepemudaan dan Olahraga

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, agar mampu bersaing secara global dengan berwawasan kebangsaan, berjiwa kepemimpinan yang memiliki watak dan akhlak mulia, mempunyai prestasi dalam berbagai bidang, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, cerdas, terampil dengan dilandasi iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka pembinaan bagi pemuda serta pembinaan olahraga merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Jumlah organisasi pemuda tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari 42 pada tahun 2019 dan 42 pada tahun 2023, Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 ke Tahun 2023 mengalami peningkatan dari 18 pada tahun

2019 menjadi 35 pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan ada peningkatan minat masyarakat pada olahraga. Terwujudnya peningkatan prestasi olahraga selain melalui pembinaan klub dan atlet olahraga juga harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang baik. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai dan memenuhi kebutuhan masyarakat namun perlu peningkatan dari segi kualitasnya.

M. Statistik

Data yang lengkap, obyektif dan terpercaya diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan. Untuk memperoleh data yang maksimal, metode statistik perlu digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Asas yang perlu menjadi pedoman penyelenggaraan statistik adalah asas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran terhadap penyediaan data statistik yang handal dan terpercaya.

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang

dihasilkan pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah terdiri dari data statistik serta data dan informasi geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Urusan Statistik merupakan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas komunikasi dan Informatika yang memiliki tugas pokok fungsi menyiapkan data statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan. Setiap tahunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang menyajikan Dokumen Statistik yang berisi data statistik Kabupaten Tulang Bawang yang bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan sesuai masa waktunya. Selain itu juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan. Terpublikasikannya dokumen statistik Kabupaten Tulang Bawang yang akurat dan transparan, merupakan sasaran dari salah satu urusan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tulang Bawang. Publikasi data statistik sebagai wujud terselenggaranya pembangunan yang lebih terencana, oleh karenanya ketersediaan data statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Realisasi jumlah dokumen statistik Kabupaten Tulang Bawang yang dipublikasikan tepat waktu dalam bentuk buku Tulang Bawang Dalam Angka (TBDA) dilaksanakan Tahun 2022. Namun Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Kampung dalam Angka Tidak dicetak karena kurangnya anggaran penggandaan. Namun kegiatan penyusunan dokumen tetap dilakukan dalam bentuk softcopy dan dipublikasikan lewat website. Penyusunan jenis dokumen tersebut dapat diselesaikan 100% dengan adanya kerjasama dengan Badan

Statistik Daerah untuk mendapatkan data-data statistik yang andal, akurat dan transparan.

Permasalahan utama dalam pembangunan statistik adalah bahwa pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah belum optimal. Hal tersebut disebabkan data untuk pengambilan kebijakan di bidang pembangunan belum ada standarisasi baku dan letaknya masih tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal sehingga belum semuanya terintegrasi dalam suatu sistem data pembangunan secara nasional maupun daerah. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya keterpaduan data dalam sebuah sistem data pembangunan daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data pembangunan yang valid dan *up to date*.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta sesuai amanat Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah mengembangkan program Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tulang Bawang melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD di Kabupaten melalui portal <http://portaldata.tulangbawangkab.go.id/> yang mudah di akses oleh masyarakat, perguruan tinggi dan stakeholder pembangunan. Program Pengembangan Data Statistik Sektoral dan Keterbukaan Informasi dilaksanakan melalui sinergitas kegiatan dengan Badan Pusat Statistik, OPD, instansi dan lembaga vertikal, BUMD dan lain-lain. Selain data numerik, dilakukan pula koordinasi dan pengelolaan data spasial.

N. Persandian

Penerapan urusan persandian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan keamanan informasi sudah menjadi kewajiban dan tuntutan di setiap instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin penting dalam peningkatan kualitas layanan terhadap pengamanan informasi yang merupakan salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakikat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Ancaman yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah alasan yang kuat sebagai dasar dilakukannya pengelolaan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis. Sebagai organisasi yang dinamis, unit teknis persandian baik yang berada di daerah maupun yang berada di pusat dituntut tanggap dan siap untuk melakukan reformasi

dalam rangka menyikapi segala perubahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Urusan persandian berperan melakukan upaya melindungi keamanan informasi milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan Daerah. Penyelenggaraan urusan persandian menyangkut pengamanan informasi publik; bukan hanya jaminan keamanan terhadap aspek kerahasiaan tetapi terhadap aspek keutuhan, keotentikan dan nir penyangkalan; pelayanan kepada pimpinan daerah dan perangkat daerah termasuk staf; pengamanan bukan hanya di kamar sandi; tetapi juga mendukung pengamanan TIK; Namun pengamanan informasi daerah belum bisa terjaga kerahasiaan dan pengamanan sesuai perundang-undangan pada tahun 2022 yang dilakukan melalui aplikasi Sertifikat Elektronik. Aplikasi Sertifikat Elektronik, semua informasi/konten belum dapat diamankan melalui Tulang Bawang Digital Signature karena belum di izin dari BSSN. Dan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Tulang Bawang belum menggunakan aplikasi tersebut. Adapaun jenis informasi yang wajib diamankan dalam Persandian Daerah Kabupaten Tulang Bawang yaitu:

- a. Jumlah informasi/konten yang diamankan melalui Email Sanapati BSSN via kasa Kementrian Dalam Negeri;
- b. Jumlah Radiogram, telegram;
- c. Jumlah pengamanan pelaksanaan kegiatan penting;
- d. Jumlah Perangkat daerah (PD) yang menggunakan fasilitas persandian.

Dari empat jenis informasi yang wajib diamankan dalam persandian daerah Kabupaten Tulang Bawang, hanya dua yang dilaksanakan

pada tahun 2022 yaitu Jumlah informasi/konten yang diamankan melalui Email Sanapati Kementrian Dalam Negeri dan Jumlah Radiogram, telegram. Sedangkan untuk Jumlah aset alat vital yang diamankan dan jumlah pengamanan pelaksanaan kegiatan penting di tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan karena alat untuk pengamanan dari BSSN Jakarta tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya SDM yang menguasai Persandian sehingga belum terselaksananya peminjaman alat dari BSSN Kemendagri, sehingga dua jenis informasi yang wajib diamankan sesuai peraturan perundang – undangan tidak dapat dilaksanakan.

O. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan daerah diarahkan pada pembinaan budaya daerah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tanpa meninggalkan ciri khas kebudayaan asli daerah (budaya Lampung).

Secara umum keberhasilan di bidang urusan kebudayaan ditandai dari apresiasi masyarakat kepada pemerintah daerah terhadap nilai-nilai seni budaya semakin meningkat. Meningkatnya apresiasi masyarakat pada pemerintah daerah terhadap seni budaya daerah dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan acara yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik dalam acara peringatan hari-hari besar maupun acara-acara adat. Kesenian dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang sangat banyak ragamnya, hal ini disebabkan penduduk Kabupaten Tulang Bawang berasal dari berbagai suku dan daerah yang masing-masing tetap mempertahankan dan melestarikan kesenian dan kebudayaan dari daerah asal, seperti wayang kulit dari daerah Jawa Tengah, Jaipong dari daerah Sunda, Reog dari Daerah Ponorogo, dan lain-lain sesuai asal daerah. Meskipun demikian banyak masyarakat pendatang yang mempelajari kesenian dan kebudayaan asli lampung, seperti tari-tarian khas lampung maupun gamelan/musik khas Lampung.

Demikian juga sebaliknya banyak penduduk asli lampung yang mempelajari kesenian dan kebudayaan dari daerah lain. Hal ini dapat dilihat pada saat pawai/karnaval seni dan budaya daerah yang diselenggarakan pada acara peringatan Hari Ulang Tahun RI ataupun Hari Jadi Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang.

P. Perpustakaan

Pemerintah daerah juga memfasilitasi penyebaran informasi hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Keberhasilan ini dicapai melalui upaya peningkatan SDM kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas informasi dengan menyajikan informasi yang akurat dan terbaru, serta berpartisipasi dalam pameran/expo. Peningkatan kualitas pendidikan harus diupayakan dengan berbagai hal, salah satunya melalui peningkatan budaya baca masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Pemerintah daerah juga memfasilitasi penyebaran informasi hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.

Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah meningkatnya kemampuan literasi masyarakat. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Tingkat literasi masyarakat dihitung dengan indikator persentase perpustakaan berstandar nasional, persentase pemanfaatan perpustakaan, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan,

dan rasio ketercukupan koleksi perpustakaan. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2023 dengan skor TGM 56,57. Tingkat Literasi Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang adalah 59,58. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 979 sedangkan jumlah koleksi judul buku perpustakaan yang tersedia berjumlah 8036 judul.

Q. Kearsipan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu urusan yang ditangani daerah adalah kearsipan. Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti pelaksanaan kegiatan instansi memiliki fungsi strategis dan dinamis. Strategis artinya bahwa informasi yang terekam dalam arsip tidak hanya memiliki nilai guna primer yang berguna bagi instansi pencipta sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, tetapi arsip tentu memiliki nilai guna sekunder yaitu nilai guna kebuktian dan informasional yang berguna untuk lembaga lain, orang, dan masyarakat luas. Nilai guna kebuktian suatu arsip karena terkait dengan keberadaan instansi, benda, tempat, dan orang. Sementara nilai guna informasional suatu arsip karena terkait dengan terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena ketersediaan arsip secara utuh, autentik dan terpercaya pada setiap Pemerintah Daerah akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik serta penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya.

Pada tahun 2023 urusan kearsipan mempunyai indikator kerja kunci output presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, pencapaian arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dan presentasi arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik. Urusan kearsipan indikator kerja kunci *outcome* hasil yang didapat adalah ketersediaan arsip dengan jumlah total 552 arsip dengan jumlah arsip yang telah dibuatkan daftar arsip adalah 250 mencapai 45,3 %, ketersediaan arsip aktif dengan jumlah total 750 arsip dengan jumlah arsip yang telah dibuatkan daftar arsip adalah 125 mencapai 16,7%, serta ketersediaan arsip statis dengan jumlah total 125 arsip statis dengan jumlah yang telah dibuatkan daftar arsip adalah 50 mencapai 40%.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Pembangunan Kelautan dan Perikanan berperan penting baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan kelautan dan perikanan adalah salah satu pendukung usaha ekonomi masyarakat di Tulang Bawang dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan produksi perikanan pada tahun 2022, baik budidaya maupun tangkap dilakukan dengan cara mengoptimalkan faktor-faktor produksi. Pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha secara kontinu dilakukan untuk memotivasi kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya sehingga dapat menghasilkan produksi perikanan yang berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Selain itu, didukung juga dengan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perikanan, implementasi teknologi dalam proses budidaya serta peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor potensial dalam struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang yang belum banyak dioptimalkan. Perikanan laut di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan kondisi yang semakin meningkat, kondisi tersebut mengindikasikan besarnya potensi sektor perikanan laut yang berpeluang besar untuk dioptimalkan. Potensi tersebut dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, saat ini produksi perikanan tangkap mencapai sebanyak 26.249,62 ton atau mengalami peningkatan sebanyak 538,06 ton jika dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 yang sebanyak 25.711,56 ton.

Perkembangan produksi perikanan budidaya meliputi budidaya tambak, kolam, sawah, keramba dan jaring apung. Komoditas perikanan yang merupakan ikan konsumsi bagi masyarakat lokal namun memiliki nilai ekonomis dan berpotensi untuk dibudidayakan adalah ikan Gabus, Udang Vaname, Lele, Bandeng dan Toman. Sedangkan ikan konsumsi yang sudah dibudidayakan di kolam-kolam, tambak, keramba jaring apung antara lain ikan patin, lele, gurame, bandeng dan nila. Peningkatan produksi maupun nilai produksi perikanan budidaya sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perikanan budidaya, serta dipengaruhi oleh harga pasar. Selain itu, didukung juga dengan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi budidaya ikan air tawar dengan prioritas pada komoditas unggulan yang mempunyai nilai lebih pada sistem produksi dan pemasaran.

Potensi Perikanan darat juga tak kalah banyaknya, seperti pada sungai, rawa dan kolam memiliki potensi untuk pengembangan perikanan. Komoditas perikanan yang merupakan ikan konsumsi bagi masyarakat lokal namun memiliki nilai ekonomis adalah ikan

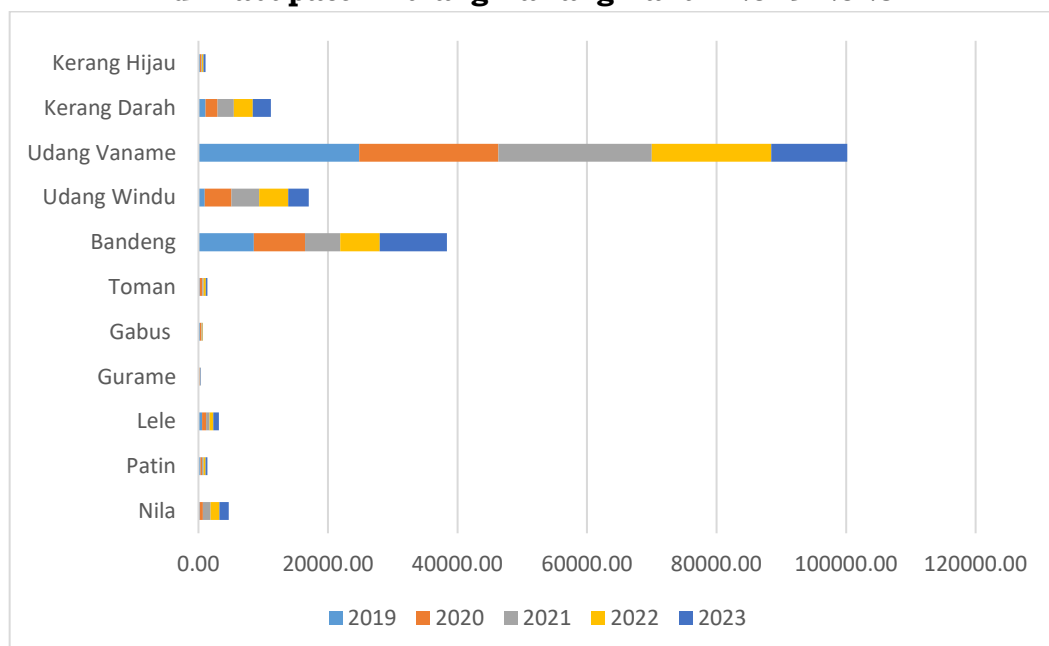
gabus, baung, udang galah, lele lokal, belida dan toman. Ikan-ikan tersebut juga berpotensi untuk dibudidayakan. Sedangkan ikan konsumsi yang sudah dibudidayakan di kolam-kolam, tambak, keramba jaring apung di sungai antara lain ikan patin, lele, gurame, nila, gabus dan toman.

Tabel 2.63 Jumlah Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

No	Jenis Ikan	Total Produksi (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Nila	198.75	502.70	1195.80	1324.50	1457.30
2	Patin	320.50	244.70	248.30	270.90	301.8
3	Lele	544.20	652.50	503.40	602.80	832.6
4	Gurame	111.40	61.50	44.20	45.50	73.4
5	Gabus	224.05	224.45	83.00	92.70	52.2
6	Toman	180.85	404.40	239.70	297.20	248.5
7	Bandeng	8553.55	7904.70	5442.80	6070.00	10400
8	Udang Windu	960.68	4143.50	4279.40	4458.50	3195.8
9	Udang Vaname	24828.26	21473.30	23686.50	18472.72	11725.5
10	Kerang Darah	1092.00	1838.60	2526.20	2930.00	2800
11	Kerang Hijau	215.69	215.10	148.30	184.00	347.9

Sumber: Dinas Perikanan

Gambar 2.40 Grafik Jumlah Perikanan Budidaya Berdasarkan Jenis di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perikanan

2) Pariwisata

Pariwisata memiliki peran yang penting dan memiliki dampak positif yang cukup tinggi terhadap pendapatan daerah, maka potensi dasar pariwisata yang dimiliki cenderung untuk terus ditingkatkan sehingga mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang besar. Dengan keindahan alam yang ada di Kabupaten Tulang Bawang menjadikan Indonesia wisata potensial yang dapat digali dan dikembangkan. Seiring dengan perkembangan jaman, ternyata arus globalisasi telah merombak tatanan politik pembangunan kepariwisataan, sehingga perlu adanya terobosan-terobosan di bidang kepariwisataan antara lain: pemberdayaan sumber daya manusia, sistem informasi, transportasi, pengembangan akomodasi pariwisata, infrastruktur penunjang kepariwisataan serta pengembangan terhadap fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Perkembangan potensi kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang saat ini memiliki 3 (tiga) jenis wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Jumlah objek wisata alam berjumlah 8 (delapan) objek, wisata budaya berjumlah 2 (dua) objek dan wisata sejarah berjumlah 4 (empat) objek.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 mencapai 34.713 orang. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut merupakan kurang terlaksananya dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata daerah antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas kampung wisata.

3) Pertanian

Sektor pertanian tetap diharapkan berkontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Tulang Bawang mengingat kontribusi peluang kerja di sektor ini masih besar di samping luasan lahan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang masih signifikan. Secara umum pelaksanaan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan kinerja yang terus meningkat sepanjang tahun seperti dalam produksi sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.64 Jumlah Produksi Tanaman Pangan
di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023**

No	Komoditas	Produksi (Ton/Tahun)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Padi	194.593,04	217.894,34	215.987,34	232.508,52
2.	Jagung	56.681	37.312	56.747	44.541

Sumber: Dinas Pertanian

Peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang ditunjang oleh adanya bantuan langsung benih unggul, bantuan langsung pupuk, perbaikan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian berupa JUT, Jalan Produksi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi, alat pengolah pupuk organik, pompa air dan pompa hidram, benih unggul, bantuan pupuk bersubsidi,antisipasi dan penanggulangan dini serangan hama penyakit tanaman, serta bantuan alat pra dan pasca panen, sehingga lebih, mengoptimalkan produktivitas dan indeks pertanaman (IP).

Sektor peternakan merupakan salah sektor unggulan di Kabupaten Tulang Bawang yang terus didorong untuk dikembangkan, sehingga Tulang Bawang mampu menjadi daerah penyedia ternak. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak, ketersediaan pakan, hingga

memberdayakan sumber daya manusia di bidang peternakan menjadi mandiri untuk menghadirkan produk. Perkembangan populasi ternak dari tahun 2019-2023 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.65 Populasi Ternak di Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2019-2023**

No	Jenis Ternak	Populasi (ekor)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sapi	22.148	22.683	27.219	29.194	32.113
2.	Kerbau	3.686	3.903	4.684	5.106	5.617
3.	Kambing	92.632	96.281	115.537	125.935	137.269
4.	Babi	2.410	2.472	2.843	2.143	2.730
5.	Ayam Buras	409.028	444.184	435.141	456.898	478.655
6.	Ayam Petelur	24.770	24.770	35.100	27.100	66.000
7.	Ayam Pedaging	210.833	208.542	218.969	213.469	213.800
8.	Bebek/Itik	260.257	61.285	22.908	23.595	20.728
9.	Entok	-	-	-	43.283	37.210

Sumber : Dinas Pertanian

Selain itu produksi hasil ternak di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 mampu menghasilkan 1.246,8 ton daging dan 48,73 ton telur atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan produksi hasil ternak pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 Kabupaten Tulang Bawang mampu menghasilkan 1.549,01 ton daging dan 30,66 ton telur.

Produksi tanaman perkebunan rata-rata mengalami kenaikan per tahun. Kenaikan total produksi tanaman perkebunan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: adanya dukungan prasarana dan sarana pertanian mendukung perkebunan seperti embung dan pompa air, adanya harga komoditi perkebunan yang meningkat sehingga meningkatkan minat petani dalam menanam komoditi perkebunan serta kelembagaan kelompok tani/gabungan kelompok tani (gapoktan) sebagai dampak positif bantuan sosial bagi kelompok

tani/gapoktan. Adapun produksi tanaman perkebunan pada tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.66 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019-2023
Kabupaten Tulang Bawang

No	Komoditas	Produksi (Ton/Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kelapa Sawit	46.430	46.800	47.150	62.140	63.697
2.	Karet	30.360	30.980	31.640	34.100	35.400
3.	Tebu	-	-		1.438	195.415
4.	Singkong	485.012	692.874	577.999	549.013	602.888

Sumber : Dinas Pertanian

Pembangunan pertanian juga menyangkut subsektor perkebunan dimana ruang lingkup pembangunan perkebunan meliputi kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, ekstensifikasi dan diversifikasi kebun, produksi, pengolahan dan pemasaran, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan perkebunan, pengembangan kelembagaan serta penerapan agribisnis perkebunan dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Agribisnis perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk yang dihasilkan, pengolahan dan pemasaran hasil yang memadai serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai. Penerapan agribisnis ini dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna serta tingkat kemampuan petani dan kelembagaan petaninya di dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis juga memadai. Di sisi lain efisiensi usaha tani akan dapat tercapai apabila produksi yang tinggi tersebut dapat diimbangi dengan biaya produksi yang sekecil mungkin dengan

peluang pasar yang baik serta dicapai tingkatan dengan harga yang wajar. Selain itu Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian memiliki Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, dengan menjaga luasan lahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang terjadi. Dengan berbagai keterbatasan terkait potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, maka langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktivitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk memenuhi permintaan pasar.

4) Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Adapun permasalahan utama yang perlu dicermati dalam konteks menghadapi persaingan global tersebut, bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dan komoditas dalam negeri di pasar domestik maupun internasional.

Peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain: memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana

pelestarian budaya setempat. Sampai dengan akhir tahun 2023 di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 59 pasar yang kondisinya sudah baik, terdiri dari 57 pasar desa, dan 2 pasar kabupaten.

Perkembangan jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.67 Perkembangan Sarana Perdagangan Tahun 2019-2023 di Kabupaten Tulang Bawang

No	Jenis Sarana Perdagangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pasar Kampung	57	57	57	57	57
2.	Pasar Lokal/Kabupaten	2	2	2	2	2
3.	Usaha Perdagangan Milik Pemda	39	63	64	64	64
4.	Toko Modern					
	Minimarket cabang/waralaba nasional	2	3	3	3	3
	Toko modern lokal	37	60	60	61	61
	Pusat perbelanjaan	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perdagangan

Ditengah perkembangan jaman saat ini telah banyak bermunculan pasar modern, bahkan di era kemajuan teknologi dan informasi, proses transaksi secara online banyak terjadi di dunia maya. Pasar Modern telah dibangun dengan tata ruang dagang dan pelayanan serta kenyamanan belanja yang lebih terjamin. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah, untuk terus melaksanakan perbaikan dan pembangunan, baik infrastruktur, maupun dalam serta memberdayakan komunitas pasar rakyat di masa mendatang. Pasar rakyat diharapkan mempunyai daya saing sebagai upaya mendorong pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Beberapa upaya dilakukan dalam rangka mengembangkan pasar rakyat di Kabupaten Tulang Bawang, diantaranya relokasi,

rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesan; pelatihan pedagang pasar, pelatihan pengendalian kesehatan, keamanan dan kenyamanan lingkungan dipasar; serta promosi pasar rakyat. Beberapa upaya tersebut dilakukan dengan harapan dapat menciptakan pasar yang sehat, aman, nyaman dan berdaya saing.

5) Perindustrian

Proses pembangunan sering kali dikaitkan dengan proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat, bukan merupakan kegiatan yang mandiri atau hanya sekedar mencapai fisik saja.

Oleh karena itu, pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Untuk mendukung pembangunan industri Dinas Koperasi dan UKM menerapkan kebijakan sebagai berikut:

- Pengembangan industri kecil dan menengah melalui pembinaan dan pelatihan bagi industri kecil dan industri rumah tangga;
- Pengembangan sarana penunjang sentra-sentra industri potensial;
- Fasilitasi pemasaran produksi kerajinan unggul daerah.

Jumlah usaha industri pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 terdapat jumlah usaha industri 943 unit, sementara itu pada tahun 2022 naik menjadi 1.573 unit dan 1.810 unit pada tahun 2023.

Jumlah usaha industri dan jumlah industri kecil dan rumah tangga pada tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun 2022.

**Tabel 2.68 Jumlah Industri Kecil Tahun 2019-2023
di Kabupaten Tulang Bawang**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Industri Kecil	161	191	943	1.573	1.810

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selain itu, jumlah tenaga kerja pada sektor industri kecil dan industri besar menengah di Kabupaten Tulang Bawang juga mengalami peningkatan dari 11.160 orang pada tahun 2021 menjadi 12.360 orang pada tahun 2022 (naik 1.200 orang atau 9,7%), dan 12.715 orang pada tahun 2023 (naik 355 orang atau 2,7%).

6) Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Penyelenggaraan transmigrasi direncanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.

Urusan transmigrasi dilakukan dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan penduduk antar wilayah, serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing kawasan transmigrasi.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, baik yang berdekatan, domestik ataupun internasional. Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, sumber daya manusia dan fasilitas wilayah atau infrastruktur. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Kondisi Umum Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing meliputi berbagai potensi unggulan yang didukung dengan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai. Adapun potensi unggulan di Kabupaten Tulang Bawang didominasi oleh sektor pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan).

A. Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Dengan memiliki potensi wilayah yang cukup luas, pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dalam rangka memantapkan/meningkatkan swasembada pangan, ditempuh melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi dengan kegiatan meliputi kegiatan pembibitan, penanaman/budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Secara statistik, potensi pengembangan perkebunan di Tulang

Bawang sangat menjanjikan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan bagi pengembangan perkebunan di Tulang Bawang, ditempuh melalui budidaya tanaman perkebunan untuk industri perkebunan dan pengembangan usaha investasi perkebunan dengan cara Pola Perusahaan Besar Swasta (PBS), Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) serta Pola Kemitraan (kemitraan melalui KUD dalam berbagai usaha dengan perkebunan besar).

Berbagai produk perkebunan yang potensial dan sedang dikembangkan di Tulang Bawang antara lain: Karet, Singkong Kelapa Sawit dan Tebu dengan hasil produksi perkebunan, diperkirakan lebih kurang 897.400 ton pada tahun 2023.

Karenanya dengan besarnya potensi sektor perkebunan, maka saat ini di Kabupaten Tulang Bawang juga sedang dikembangkan pemanfaatan sumberdaya perkebunan. Wilayah pengembangan komoditi unggulan tanaman pangan dan perkebunan tersebar di daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Padi, Pusat pertumbuhan dan produksi meliputi Kecamatan Rawapitu, Rawajitu Selatan, Menggala, Menggala Timur, Gedung Aji Baru, Penawar Tama, Gedung Aji.
- 2) Jagung, Pusat pertumbuhan dan produksi meliputi Kecamatan Menggala, Menggala Timur, Gedung Meneng, Dente Teladas, Banjar Baru, Rawajitu Selatan, Gedung Aji Baru.
- 3) Ubi Kayu, Pusat pertumbuhan dan produksi meliputi Kecamatan Menggala, Menggala Timur, Gedung Meneng, Dente Teladas, Banjar Baru, Banjar Agung, Banjar Margo, Penawar Tama, Gedung Aji Baru, Penawar Aji, Gedung Aji, Meraksa Aji.
- 4) Karet, Pusat Pertumbuhan dan Produksi meliputi Kecamatan Banjar Baru, Banjar Agung, Banjar Margo, Penawar Tama, Gedung Aji Baru, Gedung Meneng, Gedung Aji, Meraksa Aji.

- 5) Sawit, Pusat pertumbuhan dan produksi meliputi Kecamatan Banjar Baru, Banjar Agung, Banjar Margo, Penawar Tama, gedung Aji Baru, Rawapitu, Gedung Aji, Meraksa Aji.

Program yang dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut antara lain:

- a). Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani
- b). Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Budidaya Pertanian.
- c). Peningkatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian.
- d). Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian seperti Bibit, Pupuk, Pestisida, Jalan, Irigasi, Traktor dan Alsintan lainnya.
- e). Peningkatan Kemampuan Manajemen Usaha Agribisnis Pertanian.

B. Potensi Peternakan

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang cukup luas, terdiri dari dataran dan perairan (rawa, sungai dan lain-lain) dengan topografi yang relatif beragam memberikan potensi yang besar untuk pengembangan pertanian, baik tanaman pangan dan perkebunan maupun peternakan. Komoditas peternakan yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang antara lain ternak sapi potong, kerbau, kambing, babi, ayam dan itik.

Budidaya ternak memerlukan input berupa lahan, untuk habitat ternak dan tanaman (pakan ternak) serta air untuk minum ternak dan asupan bagi tanaman (hijauan makanan ternak). Sehingga, dengan potensi lahan pertanian mencapai kurang lebih seluas 149.420 Ha dan lahan perkebunan 73.430 Ha memberikan peluang yang cukup besar untuk pengembangan berupa

penanaman Hijauan Makanan Ternak (HMT) pada sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Tulang Bawang.

Kabupaten Tulang Bawang mempunyai potensi sumber pakan ternak yang cukup besar, baik dari Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT) berupa rumput dan *legume*, limbah pertanian, limbah perkebunan tebu maupun perkebunan kelapa sawit. Dengan potensi ketersediaan pakan yang cukup berlimpah, Kabupaten Tulang Bawang mempunyai kapasitas yang besar untuk pengembangan ternak ruminansia.

Potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Tulang Bawang di dominasi ternak sapi, kambing, ayam buras dan ayam pedaging. Populasi ternak sapi sebanyak 32.113 ekor, populasi kambing sebanyak 137.269 ekor, populasi ayam buras sebanyak 478.655 ekor dan ayam pedaging sebanyak 213.800 ekor.

Untuk potensi pemasaran, di Kabupaten Tulang Bawang memiliki banyak keuntungan diantaranya dari aspek geografis, Kabupaten Tulang Bawang dilalui oleh jalur lintas timur yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan provinsi lainnya sehingga akan mendukung kelancaran akses pemasaran ternak di Kabupaten Tulang Bawang.

Program yang dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut antara lain:

- a). Peningkatan Kemampuan dan Bantuan Teknologi Pengolahan Pakan Ternak.
- b). Peningkatan Populasi Ternak dan Penumbuhan Pembibitan Ternak Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan.
- c). Pengembangan Kawasan Pembibitan Ternak dengan bantuan Bibit Ternak.

- d). Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Usaha Agribisnis Peternakan.
- e). Peningkatan Luasan Hijauan Makanan ternak.
- f). Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan melalui Poskeswan dan Pengobatan Ternak Massal.

C. Potensi Perikanan

Wilayah Tulang Bawang sangat potensial untuk pengembangan sektor perikanan. Sejak zaman dahulu, nenek moyang daerah ini telah dikenal sebagai penghasil ikan dengan jumlah yang cukup besar. Pengembangan sektor perikanan di Tulang Bawang tersebar di seluruh kecamatan di daerah ini.

Di sektor perikanan, dengan memiliki luas wilayah perairan yang terdiri dari laut, sungai dan rawa yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan dari berbagai komoditas perikanan berupa ikan, kerang, udang, kepiting, rajungan dan biota laut lainnya, ditafsirkan dapat menghasilkan produksi ikan sebesar 31.433,1 ton per tahun 2023.

Sedangkan luas lahan Kabupaten Tulang Bawang yang sudah dimanfaatkan seluas 25.728,5 Ha dari potensi lahan seluas 68.146 Ha. Jumlah pembudidaya ikan di Tulang Bawang sebanyak 12.987 orang, yang terdaftar Kusuka sebanyak 8.270 orang dan jumlah pokdakan sebanyak 237 orang.

Sedangkan guna meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam memasarkan hasil produksi perikanan, telah dilakukan pembinaan dan pengembangan terhadap beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu diantaranya di Kuala Teladas Kecamatan Dente Teladas.

Program yang dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut antara lain:

- a). Pengembangan Budidaya Perikanan Darat melalui Bantuan Benih Ikan, Pakan Ikan dan Revitalisasi Balai Benih Ikan serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.
- b). Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap melalui Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap.
- c). Revitalisasi Kawasan Budidaya Tambak.
- d). Optimalisasi Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- e). Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan.
- f). Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan serta Manajemen Agribisnis Perikanan.

D. Potensi Industri, UMKM dan Koperasi

Potensi industri, UMKM dan Koperasi antara lain:

- 1) Potensi Produk Kerajinan Tangan Khas Tulang Bawang (Kain Maduaro).

Program yang dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut antara lain:

- a). Upaya Pensertifikasian Hak Paten Dengan Mendaftarkan Kain Sulam Maduaro Ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Kementerian Hukum dan HAM;
- b). Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- c). Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d). Pengembangan Sistem Pendukung bagi UMKM;
- e). Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
- f). Pembinaan Pasar dan Promosi Produk UMKM Kerajinan Khas Daerah.

- 2) Potensi Produk Industri UMKM, seperti Produk Agroindustri (Ikan Asin, Ikan Asap, Terasi, Keripik Udang, Keripik Ikan, Kerupuk dan Makanan olahan lainnya).

Program yang dilakukan untuk mengembangkan potensi tersebut antara lain:

- a). Pembinaan dan Bantuan Teknologi Produksi bagi UMKM dan Koperasi;
- b). Fasilitasi Pengembangan Permodalan UMKM dan Koperasi;
- c). Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Produk UMKM;
- d). Pembinaan Pasar dan Promosi Produk UMKM Kerajinan Khas Daerah.

E. Potensi Pertambangan (Pasir)

Program yang dilakukan untuk mengembangkan potensi pertambangan antara lain yaitu:

- a). Pemetaan Potensi Pertambangan;
- b). Pembinaan dan Peneriban Usaha Pertambangan;
- c). Pembinaan Reklamasi Pasca Usaha Pertambangan;
- d). Pembinaan Kualitas SDM dan Manajemen Usaha Pertambangan.

2.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan trend positif, dimana terjadi peningkatan setiap tahunnya. Kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam memobilisasi seluruh sektor produktif yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

Gambaran perkembangan ekonomi makro Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) yang merupakan akumulasi dari nilai tambah (*Value Added*) yang timbul akibat adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah. PDRB tersebut menggambarkan potensi sekaligus kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu proses produksi.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah pada satu periode tertentu adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan riil seluruh lapangan usaha secara agregat pada tahun yang bersangkutan. Tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan merupakan pertumbuhan riil PDRB atau biasa disebut dengan Pertumbuhan Ekonomi.

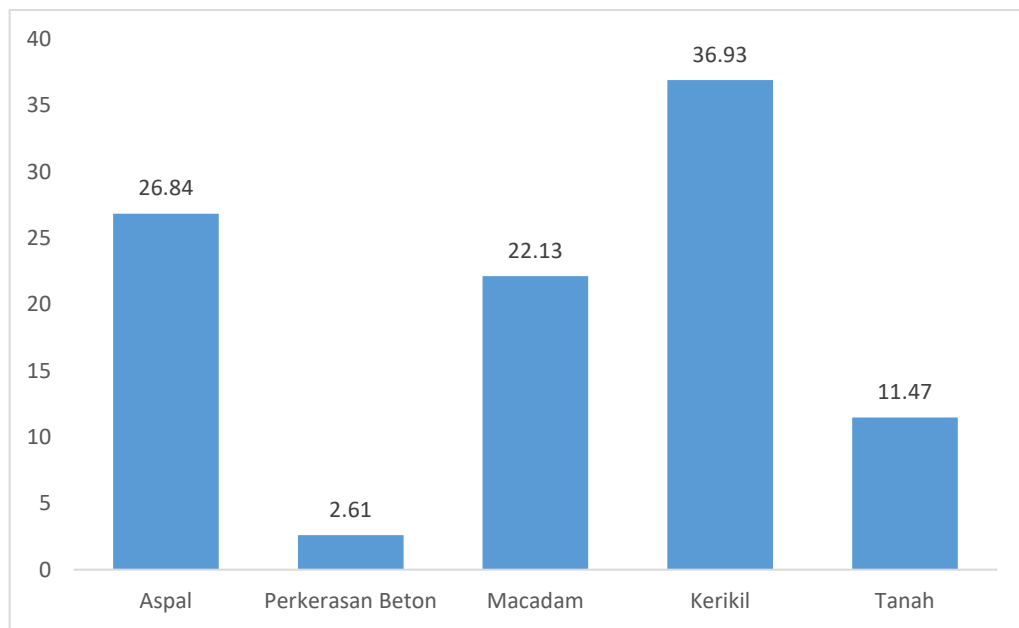
2.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan ekonomi dan merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur sangat berperan dalam membuka isolasi wilayah, meningkatkan aktivitas perekonomian daerah serta merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan di bidang ekonomi.

Jalan sebagai sarana transportasi memiliki peran penting khususnya dalam transportasi darat. Peningkatan infrastruktur jalan menjadi sangat penting dalam menjaga urat nadi perekonomian daerah khususnya Kabupaten Tulang Bawang. Dititik ini, ketersediaan infrastruktur bernilai penting karena berkorelasi dengan waktu tempuh dan ongkos distribusi yang menentukan kemajuan daerah. Sebagian besar jalan di Kabupaten Tulang Bawang sudah berupa jalan aspal dan kerikil, walaupun kondisinya beragam (baik, sedang, rusak, dan rusak berat). Secara statistik panjang jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang

berdasarkan jenis permukaan jalan yaitu 26,84 persen merupakan permukaan jalan aspal, 2,61 persen merupakan permukaan jalan perkerasan beton, 22,13 persen merupakan permukaan jalan macadam, 36,93 persen merupakan permukaan jalan kerikil dan 11,47 persen merupakan permukaan jalan tanah.

Gambar 2.41 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 (persen)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4.4. Fokus Iklim Investasi

Untuk meningkatkan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan stabilitas investasi di Kabupaten Tulang Bawang, pemerintah daerah mempermudah pengurusan perizinan dan memperpendek waktu proses pengurusan perijinan dimana pada tahun 2015 rata-rata lama proses perizinan kurang lebih 14 hari kerja dan pada tahun 2022 lama proses perizinan kurang lebih rata-rata 2 hari kerja.

Selain itu untuk menjaga kestabilan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, diimbangi pula dengan menjaga kestabilan keamanan dan ketertiban, mengingat

letak Kabupaten Tulang Bawang sangat strategis dilewati Jalan Lintas Timur Sumatera, dimana semua mobilitas ekonomi dari Pulau Sumatera ke Jawa hampir sebagian besar melewati Kabupaten Tulang Bawang. Sehingga dapat dikatakan Tulang Bawang merupakan jalur transit yang sangat strategis namun juga menjadi rawan instabilitas keamanan dan ketertiban.

2.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia

Dalam bagian ini, kita akan coba telaah permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tulang Bawang dari sisi Manusia dengan analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran tunggal dan sederhana yang memuat tiga aspek yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang menurut UNDP dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk hidup layak.

Permasalahan pembangunan tidak bisa terlepas dari manusia atau penduduk, karena penduduk itu adalah sebuah kekayaan yang nyata bagi suatu daerah. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan yaitu tercapainya penguasaan atas sumberdaya guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan agar dapat meningkatkan panjang usia hidup dan sehat meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan ketrampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Trend IPM Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Tulang Bawang semakin membaik dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di Kabupaten Tulang Bawang.

2.4.6. Indeks Inovasi Daerah

Pengukuran indeks inovasi daerah (IID) Kabupaten Tulang Bawang melalui aplikasi IGA (Inovation Government Award) pada tahun 2022 menempati peringkat 52 dengan nilai sebesar 56,63 meningkat pada tahun 2023 peringkat 34 dengan nilai sebesar 61,08.

Berdasarkan variable ukur Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan pada seluruh variabel ukur di tahun 2023, namun terhadap variable kecanggihan produk dan institusi masih dibawah rata-rata keseluruhan nilai variable ukur. Dari hasil pengukuran Inovation Government Award Tahun 2023, perlu peningkatan kualitas inovasi daerah melalui:

1. Institusi berupa jumlah pendapatan perkapita, peningkatan PAD dan penurunan angka kemiskinan.
2. Kecanggihan produk berupa online sistem, kecepatan inovasi dan replikasi.

2.4.7. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap

kepemimpinan kepala daerah. Pada tahun 2022, Kabupaten Tulang Bawang Total Skor Variabel Kinerja Pemerintah Daerah diperoleh dari penjumlahan Total Skor Dimensi Kinerja Pemerintah Daerah dengan Total Skor Dimensi penerimaan Penghargaan, sehingga diperoleh Total Skor Variabel Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang 39,56 (kategori Rendah).

2.4.8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pada Tahun 2023 Kabupaten Tulang Bawang mendapatkan skor IDSD sebesar 3,02 meningkat dibandingkan skor IDSD pada tahun 2022 sebesar 2,54.

2.4.9. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Pada tahun 2023 Kabupaten Tulang Bawang melalui Balitbangda Kabupaten Tulang Bawang telah melaksanakan mandatory Kemendagri dimana Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dari tahun 2018 s.d. 2022 dan hasilnya masuk kedalam kategori perbaikan sesuai tabel berikut:

**Tabel 2.69 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Tahun 2018-2022 di Kabupaten Tulang Bawang**

Tahun	Skor IPKD	Kategori
2018	67,4490	Perlu Perbaikan
2019	61,8025	Perlu Perbaikan
2020	62,6756	Perlu Perbaikan
2021	59,6449	Perlu Perbaikan
2022	56,69	Perlu Perbaikan

Sumber : Balitbang Kab. Tulang Bawang

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 - 2025

2.5.1. Hasil Capaian Pembangunan

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan. Capaian kinerja makro di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2005 - 2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005 - 2022**

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian Pada Tahun Berjalan (2022)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	67,76	69,53	2,61	Pada tahun 2011 terjadi perubahan metode perhitungan, sehingga peningkatan IPM relatif kecil
2.	Angka Kemiskinan	persen	15,03	8,42	43,98	
3.	Angka Pengangguran	persen	-	3,52	-	Data tahun 2005 tidak tersedia
4.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,86	3,92	-19,34	
5.	Pendapatan Perkapita		-	-	-	Data tidak tersedia
6.	Ketimpangan Pendapatan		-	0,287	-	Data tahun 2005 tidak tersedia
6.	PDRB Per Kapita	juta rupiah		60,29		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang, 2023

2.5.2. Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005 – 2025

Berdasarkan kesimpulan evaluasi hasil RPJPD di atas, maka berikut disampaikan beberapa rekomendasi:

1. Dalam rangka keterpaduan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, maka evaluasi terhadap hasil RPJPD ini agar ditindaklanjuti untuk penyusunan RPJPD periode berikutnya;
2. Agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam penyusunan RPJPD periode berikutnya;
3. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja arah kebijakan RPJPD yang masih bersifat kualitatif menjadi indikator kinerja yang kuantitatif dan terukur;
4. Konsistensi arah kebijakan RPJPD dengan RPJMD tetap perlu dijaga pada tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan perencanaan yang terpadu;
5. Dilihat dari indikator makro pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum optimal dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang masih perlu meningkatkan upaya untuk dapat menetapkan target capaiannya pada RPJPD periode berikutnya.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Proyeksi Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 mencapai 433.568 jiwa. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Lampung, jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang adalah kesembilan terbanyak di Provinsi Lampung.

Banyaknya penduduk di suatu wilayah dapat memberikan konsekuensi positif maupun negatif terhadap kesejahteraan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik menjadi sumber daya manusia yang produktif. Selain itu, jumlah penduduk yang besar juga menjadi potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat mengoptimalkan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan pekerjaan yang berlimpah. Sebaliknya, apabila jumlah penduduk yang besar tidak dikembangkan secara optimal, maka dapat menimbulkan konsekuensi negatif dan menjadi beban pembangunan yang besar seperti berkurangnya ruang, kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, sumber daya alam semakin menipis, meningkatnya pencemaran atau kerusakan lingkungan dan meningkatnya permasalahan sosial.

**Tabel 2.71 Proyeksi Jumlah Penduduk
Kabupaten Tulang Bawang**

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TAHUN 2023 (JIWA)	PROYEKSI PENDUDUK (JIWA)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Banjar Agung	44,978	47,243	49,685	51,864	53,794	55,404
2	Banjar Margo	42,007	44,122	46,403	48,439	50,241	51,744
3	Banjar Baru	15,834	16,631	17,491	18,258	18,938	19,504
4	Gedung Aji	14,927	15,679	16,489	17,212	17,853	18,387
5	Penawar Aji	21,368	22,444	23,604	24,640	25,556	26,321
6	Meraksa Aji	16,126	16,938	17,814	18,595	19,287	19,864
7	Menggala	52,082	54,705	57,532	60,056	62,290	64,154

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TAHUN 2023 (JIWA)	PROYEKSI PENDUDUK (JIWA)				
			2025	2030	2035	2040	2045
8	Penawartama	32,818	34,471	36,252	37,843	39,250	40,425
9	Rawajitu Selatan	31,933	33,541	35,275	36,822	38,192	39,335
10	Gedung Meneng	31,585	33,175	34,890	36,421	37,776	38,906
11	Rawajitu Timur	15,143	15,906	16,728	17,461	18,111	18,653
12	Rawa Pitu	18,595	19,531	20,541	21,442	22,240	22,905
13	Gedung Aji Baru	25,632	26,923	28,314	29,556	30,656	31,573
14	Dente Teladas	54,849	57,611	60,589	63,247	65,600	67,563
15	Menggala Timur	15,691	16,481	17,333	18,093	18,766	19,328
	JUMLAH	433,568	455,400	478,940	499,950	518,549	534,067

Sumber: Data Diolah (BPS)

Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang tahun 2025 diproyeksikan 455.400 jiwa dan mencapai 534.067 jiwa pada tahun 2045. Besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang menggambarkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang memiliki potensi besar pada jumlah tenaga kerja dan sumber daya manusia (SDM). Selain itu, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri pada penciptaan lapangan pekerjaan, produktivitas dan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Tabel 2.72 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Tulang Bawang

JENIS KELAMIN	PENDUDUK TAHUN 2023 (JIWA)	PROYEKSI PENDUDUK (JIWA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
LAKI-LAKI	224,272	234,200	244,830	254,060	262,030	268,434
PEREMPUAN	209,296	221,200	234,110	245,890	256,519	265,633
RASIO	1.07	1.06	1.05	1.03	1.02	1.01

Sumber: Data Diolah (BPS)

Sumber daya manusia yang produktif merupakan pendorong utama pembangunan. Dengan angka ketergantungan di bawah 50 persen sampai 15 tahun ke depan, maka Kabupaten Tulang Bawang memiliki kesempatan mengoptimalkan bonus demografi. Bonus demografi semakin memiliki peran penting dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi apabila terus ditingkatkan produktivitasnya.

Tabel 2.73 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Tulang Bawang

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK TAHUN 2023 (JIWA)	PROYEKSI PENDUDUK (JIWA)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 TAHUN	118,928	116,270	113,670	112,520	111,513	111,322
15-64 TAHUN	291,965	312,070	329,930	340,660	347,469	351,993
> 65 TAHUN	23,109	27,060	35,350	46,790	59,567	70,752
ANGKA KETERGANTUNGAN	0.49	0.46	0.45	0.47	0.49	0.52

Sumber: Data Diolah (BPS)

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan di dalam pelayanan publik, dimana apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana meliputi rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan dan pendidikan.

1. Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Permasalahan yang dihadapi dalam hal perumahan masih tingginya angka defisit rumah (*backlog*), kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum teratasi tuntas, dari sisi kemitraan peran serta dan keswadayaan masyarakat masih rendah, terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya kunci termasuk didalamnya informasi mengenai pembiayaan perumahan.

Selain hal tersebut juga disebabkan daya beli masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat

berpenghasilan menengah (MBM) masih lemah. Sedangkan permasalahan di lingkungan perumahan umum yaitu: genangan air atau banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, rumah sudah terbangun namun prasarana pendukung lingkungannya belum optimal, sehingga PSU tidak terpadu antar sistem.

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada maka perlu adanya komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan perumahan, mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan rumah layak huni, penguatan peran kelembagaan perumahan, penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan air bersih dan sanitasi dan peningkatan koordinasi dengan provinsi maupun pemerintah pusat dalam penyelesaian perumahan.

**Tabel 2.74 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kabupaten Tulang Bawang**

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
JUMLAH PENDUDUK	433,568	455,400	478,940	499,950	518,549	534,067
PROYEKSI KEBUTUHAN RUMAH	89,034	91,080	95,788	99,990	102,826	106,006

Sumber: Data Diolah (Dinas Perkim)

2. Kebutuhan Air Minum

Air adalah unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan dapat dipastikan tanpa pengembangan sumber daya air secara konsisten peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati sampai saat ini. Oleh karena itu pengembangan dan pengolahan sumber daya air merupakan dasar peradaban manusia. Salah satu faktor penting penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk kebutuhan air minum. Air

minum yang layak sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, kualitas air minum yang layak ditetapkan harus memenuhi persyaratan fisik, persyaratan kimiawi, persyaratan mikrobiologis. Proyeksi kebutuhan air minum = % proyeksi pelayanan x jumlah pemakaian air (liter/detik) x jumlah penduduk (jiwa).

**Tabel 2.75 Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Kabupaten Tulang Bawang**

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM				
		2025	2030	2035	2040	2045
JUMLAH PENDUDUK	433,568	455,400	478,940	499,950	518,549	534,067
PROYEKSI PROSENTASE PELAYANAN	45	55	75	85	95	100
PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM (liter/detik)	195,106	250,470	359,205	424,958	492,622	534,067

Sumber: Data Diolah (Dinas PU)

3. Kebutuhan Listrik

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan sebagai sumber daya ekonomis yang paling utama yang dibutuhkan dalam berbagai unsur kegiatan. Dalam beberapa waktu yang akan datang kebutuhan listrik akan semakin meningkat seiring dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk, jumlah investasi, perkembangan teknologi termasuk didalamnya perkembangan dunia pendidikan, kesehatan, dunia usaha dan lain-lain.

Pelayanan jaringan listrik oleh PLN di wilayah Kabupaten Tulang Bawang saat ini masih terbatas. Sehingga harus menggunakan mesin disel/genset pribadi atau secara komunal. Hal ini menyebabkan tidak semua warga mampu memenuhi kebutuhan listrik. Listrik non PLN berasal dari mesin disel/genset, umumnya dikelola secara

komunal dan beroperasi setiap harinya dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.

**Tabel 2.76 Proyeksi Kebutuhan Listrik
Kabupaten Tulang Bawang**

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN LISTRIK				
		2025	2030	2035	2040	2045
JUMLAH PENDUDUK	433,568	455,400	478,940	499,950	518,549	534,067
JUMLAH RUMAH	89,034	91,080	95,788	99,990	102,826	106,006
PROYEKSI KEBUTUHAN LISTRIK (kVa)	194,337	204,930	215,523	224,978	232,066	238,513

Sumber: Data Diolah (Sekretariat Daerah Bagian SDA)

4. Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Menurut Damanhuri (2018), timbulan sampah adalah jumlah sampah yang dihasilkan dan dihitung dalam satuan berat atau satuan volume. Jumlah timbulan sampah yang dihasilkan berbeda setiap tempat dan bervariasi dari hari ke hari, bergantung pada jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat kesejahteraan masyarakat, pola konsumsi masyarakat, cara hidup dan mobilitas penduduk.

Banyaknya jumlah timbulan sampah yang ada di TPS mengindikasikan jika masyarakat belum menerapkan kegiatan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) secara baik. Masyarakat masih membuang sampah langsung tanpa dilakukannya pengelolaan terlebih dahulu, sehingga sampah menumpuk di TPS. Kemudian, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Tulang Bawang sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada waktu siang hari di Kabupaten Tulang Bawang yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah penduduk pada waktu malam hari.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan beberapa upaya pendekatan kepada masyarakat terkait

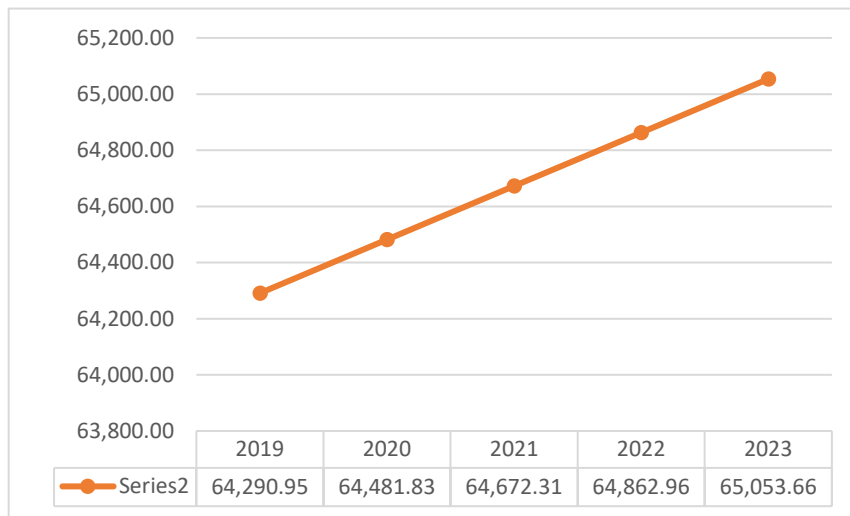
penanganan sampah diantaranya melakukan pelatihan kepada sebagian masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang, sehingga diharapkan nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. TPS-TPS yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, saat ini telah dikurangi karena keberadaannya banyak menimbulkan masalah, antara lain sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap (menyengat), serta menjadi salah satu sumber penyakit karena lokasinya yang terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Timbulan sampah domestik di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 rata-rata mencapai 65.053,66 ton/hari, dimana sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, dan sisanya berasal dari pasar dan limbah industri. Sampah domestik selanjutnya dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan kontainer sampah yang telah disediakan di wilayah masing-masing, selanjutnya sampah dipilah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui proses 3R (reduce, reuse, recycle).

Tabel 2.77 Timbulan Sampah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/hari)	64,290.95	64,481.83	64,672.31	64,862.96	65,053.66

Sumber: Data Diolah (Dinas Lingkungan Hidup)

**Gambar 2.42 Grafik Timbulan Sampah Kabupaten Tulang
Bawang Tahun 2019-2023**



Sumber: Data Diolah (Dinas Lingkungan Hidup)

Sampah dari TPS (tidak dapat diproses 3R) kemudian diangkut oleh petugas pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup ke TPA menggunakan dump truck, arm roll dan motor sampah (bentor), di TPA sampah di ratakan dan ditimbun menggunakan alat berat (wheel loader dan excavator).

**Tabel 2.78 Sarana dan Prasarana Persampahan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019-2023**

No	Sarana dan Prasarana Persampahan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dump truck/arm roll (unit)	3	3	3	3	3
2	Mobil pick up (unit)	2	2	2	2	2
3	Kontainer sampah (unit)	8	8	8	8	8
4	Motor sampah (unit)	2	2	2	2	2

Sumber: Data Diolah (Dinas Lingkungan Hidup)

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan dibutuhkan sejumlah sarana dan prasarana, berikut ini sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 yaitu dump truck sebanyak 3 unit, mobil pick up 2 unit, kontainer sampah 8 unit dan motor sampah 2 unit.

**Tabel 2.79 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Tulang Bawang**

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
		2025	2030	2035	2040	2045
JUMLAH PENDUDUK	433,568	455,400	478,940	499,950	518,549	534,067
PROYEKSI TIMBULAN SAMPAH (ton/hari)	65,053	65,435	66,397	67,373	68,363	69,368
PROYEKSI JUMLAH KEBUTUHAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST)	1	1	1	2	2	2

Sumber: Data Diolah (Dinas Lingkungan Hidup)

5. Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan puskesmas merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Harapannya pada tahun yang akan datang rasio ini dapat semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.80 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Tulang Bawang**

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN				
		2025	2030	2035	2040	2045
JUMLAH PENDUDUK	433,568	455,400	478,940	499,950	518,549	534,067
PROYEKSI FASILITAS KESEHATAN						
RUMAH SAKIT	4	0	0	1	0	1
PUSKESMAS	20	0	0	0	0	0

Sumber: Data Diolah (Dinas Kesehatan)

6. Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Kualitas suatu daerah sangat bergantung pada kualitas dari sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu parameter di dalam mengukur indeks pembangunan manusia dalam suatu bangsa dan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif.

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu sarana dan prasarana yang cukup penting dalam sebuah perencanaan kawasan. Hal ini mengingat bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap elemen masyarakat, sehingga perlunya mementingkan kebutuhan luas lahan akan sarana pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

**Tabel 2.81 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang**

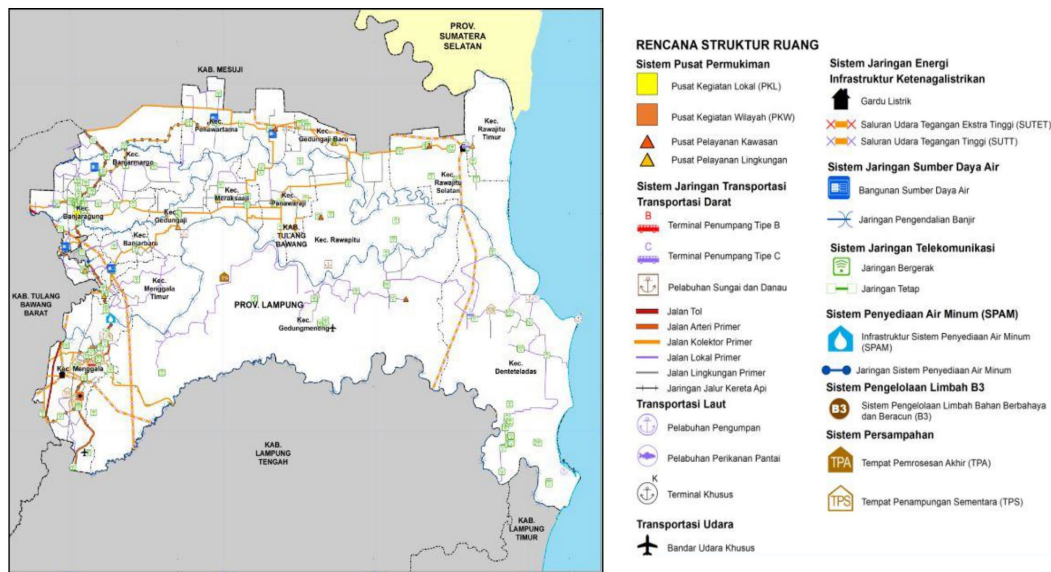
URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS PENDIDIKAN				
		2025	2030	2035	2040	2045
JUMLAH PENDUDUK	433,568	455,400	478,940	499,950	518,549	534,067
PROYEKSI FASILITAS PENDIDIKAN						
TK	158	0	2	2	2	2
SD/MI	252	0	2	2	2	2
SMP/MTS	96	0	2	2	2	2
SMA/MA/SMK	24	0	1	1	1	1

Sumber: Data Diolah (Dinas Pendidikan)

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

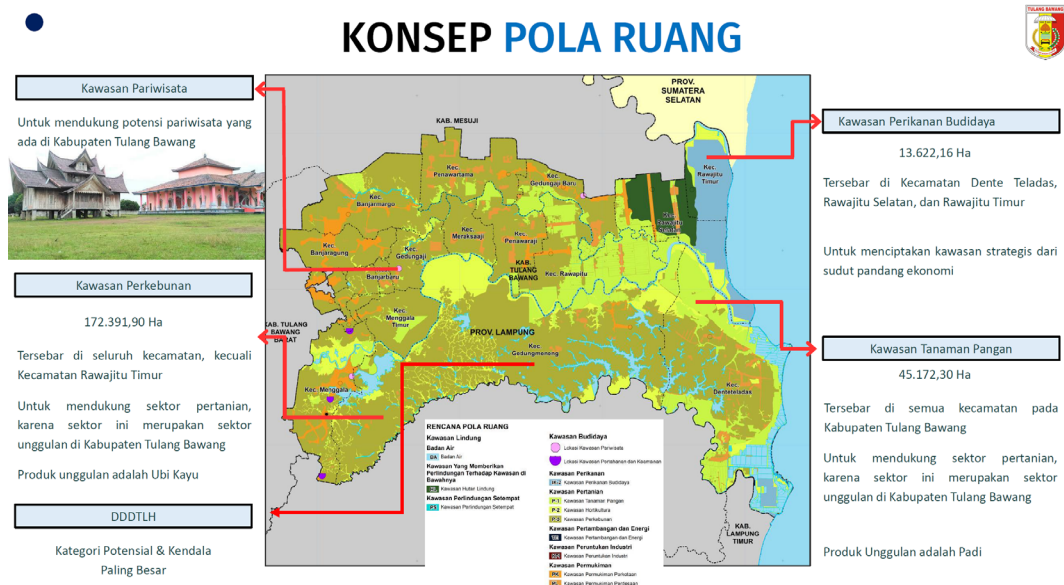
Amanat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 bahwa Penataan ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Lampung Berjaya berbasis pengembangan ekonomi yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Tulang Bawang, merujuk pada kebijakan RTRW bagian Struktur Ruang dan kebijakan Pola Ruang.

Gambar 2.43 Peta Rencana Struktur Ruang



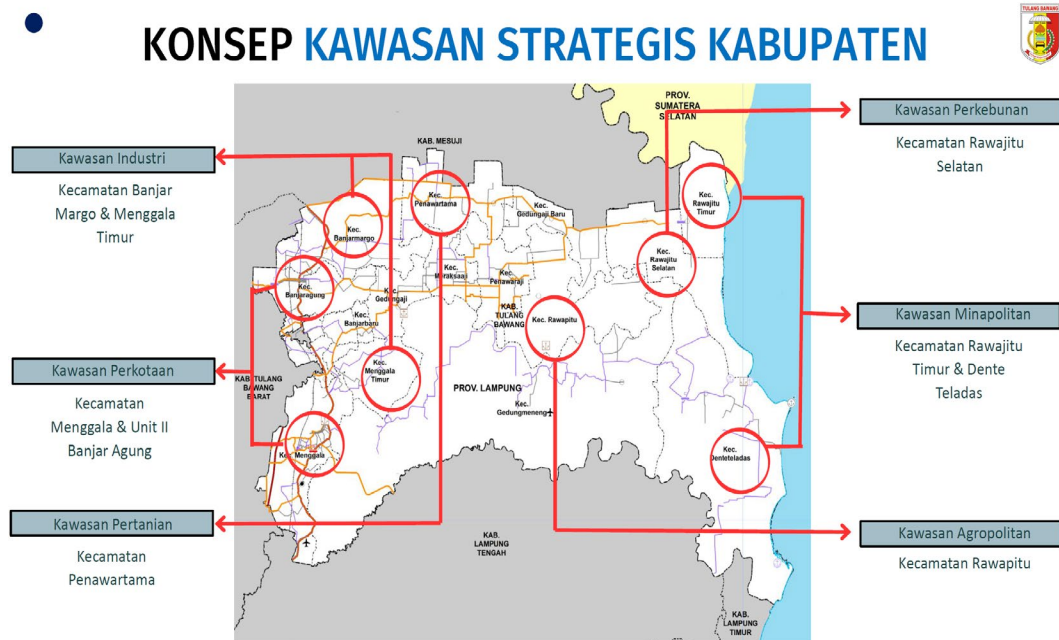
Sumber : RTRW Kab. Tulang Bawang

Gambar 2.44 Peta Rencana Pola Ruang



Sumber : RTRW Kab. Tulang Bawang

Gambar 2.45 Peta Rencana Kawasan Strategis



Sumber : RTRW Kab. Tulang Bawang

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Tulang Bawang yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.82 Arahan Pengembangan Wilayah

No	Kabupaten	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan berdasarkan Hirarki dan Pola Ruang	Kebutuhan Sarana Prasarana berdasarkan Struktur Ruang
1	Kab. Tulang Bawang	PKL Perkotaan Unit II Banjar Agung	Fokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan simpul	• Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B Menggala • Pembangunan Pelabuhan Menggala-Gedung Aji, Tulang Bawang • Pengembangan Pelabuhan

No	Kabupaten	Fungsi Ruang	Arahan Pengembangan berdasarkan Hirarki dan Pola Ruang	Kebutuhan Sarana Prasarana berdasarkan Struktur Ruang
				Pengumpan Regional Menggala • Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dente Teladas, Teladas, Sungai burung • SUTET 275 KV Gumawang-Lampung I • Gardu Induk • SPAM Regional Kawasan Ekonomi Mesuji-Tulang Bawang

Sumber: RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045

Penataan Ruang di Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan lima (5) strategi penataan ruang, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan produk unggulan pertanian untuk menunjang pengembangan agribisnis Kabupaten Tulang Bawang dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan komoditas kelapa sawit, karet, tebu, ubi kayu dan komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis di wilayah tengah dan barat kabupaten;
 - b. Mengembangkan perikanan budidaya di wilayah timur kabupaten;
 - c. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;

- d. Memperluas lahan pertanian tanaman pangan;
 - e. Mengembangkan jaringan irigasi;
 - f. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan agropolitan; dan
 - g. Mengembangkan kawasan industri berbasis perikanan.
2. Strategi peningkatan peran dan fungsi perkotaan secara berhirarki di Kabupaten Tulang Bawang dengan langkah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan peran perkotaan sesuai hirarki masing-masing;
 - b. Mengembangkan sarana wilayah di kawasan perkotaan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing perkotaan; dan
 - c. Mendorong interaksi antar wilayah dengan mengembangkan spesifikasi masing-masing perkotaan.
3. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terpadu dan merata di Kabupaten Tulang Bawang dengan langkah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan akses antar wilayah dan kawasan perkotaan;
 - b. Mengembangkan prasarana transportasi sesuai hirarki masing-masing;
 - c. Mengembangkan sistem transportasi antar moda;
 - d. Mengembangkan dan membangun pembangkit listrik serta memperluas sistem jaringan sampai ke pelosok;
 - e. Mengembangkan dan membangun prasarana telekomunikasi serta memperluas jangkauan pelayanan;
 - f. Mengembangkan dan membangun sistem prasarana lainnya secara terpadu; dan
 - g. Menyediakan prasarana penunjang penanggulangan bencana disertai sistem peringatan dini.

4. Strategi pemeliharaan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kegiatan di dalamnya di Kabupaten Tulang Bawang dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan luas dan fungsi kawasan lindung;
 - b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun;
 - c. Mengendalikan dampak pembuangan limbah;
 - d. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - e. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang ada dan akan berkembang; dan
 - f. Merehabilitasi lahan kritis.
5. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara di Kabupaten Tulang Bawang dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah kabupaten;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan keamanan.

Berikut merupakan kebijakan kewilayahan berdasarkan RTRW Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 – 2032, yaitu:

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

Pusat Kegiatan Wilayah berada di Perkotaan Menggala yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat koleksi dan

distribusi, pusat kegiatan usaha produksi, pusat pendidikan, perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan kesehatan.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Unit II Banjar Agung di Kecamatan Banjar Agung yang berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan pusat perdagangan dan jasa, dan pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan.

c. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp);

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) berada di Perkotaan Teladas di Kecamatan Dente Teladas diarahkan perkembangannya sebagai kawasan industri, kawasan minapolitan, pusat koleksi dan distribusi perikanan serta perdagangan dan jasa.

d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);

- Perkotaan Batang Hari di Kecamatan Rawa Pitu yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, koleksi dan distribusi pertanian dan kawasan agropolitan;
- Perkotaan Medasari di Kecamatan Rawajitu Selatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, koleksi dan distribusi pertanian dan perdagangan dan jasa;
- Perkotaan Bumi Dipasena Mulya di Kecamatan Rawajitu Timur yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, kawasan tambak strategis, kawasan minapolitan, industri dan pergudangan, koleksi dan distribusi perikanan;
- Perkotaan Gedung Aji di Kecamatan Gedung Aji yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, koleksi dan distribusi pertanian dan pariwisata;

- Perkotaan Karya Bhakti di Kecamatan Meraksa Aji yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
- Perkotaan Bogatama di Kecamatan Penawar Tama yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
- Perkotaan Sidomukti di Kecamatan Gedung Aji Baru yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
- Perkotaan Gedung Meneng di Kecamatan Gedung Meneng yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
- Perkotaan Gedung Rejo Sakti di Kecamatan Penawar Aji yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
- Perkotaan Agung Dalem di Kecamatan Banjar Margo yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan;
- Perkotaan Kahuripan Jaya di Kecamatan Banjar Baru yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan kesehatan; dan
- Perkotaan Lebu Dalem di Kecamatan Menggala Timur yang berfungsi sebagai pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

- Perdesaan Pasiran Jaya di Kecamatan Dente Teladas yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pertanian, perikanan dan perdagangan dan jasa;
- Perdesaan Panca Karsa Purna Jaya di Kecamatan Banjar Baru yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan; dan

- Perdesaan Sungai Luar di Kecamatan Manggala Timur yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pariwisata, pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan.

Guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari peningkatan perkembangan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan jasa; perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup; perwujudan pembangunan yang merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah; perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

BAB III

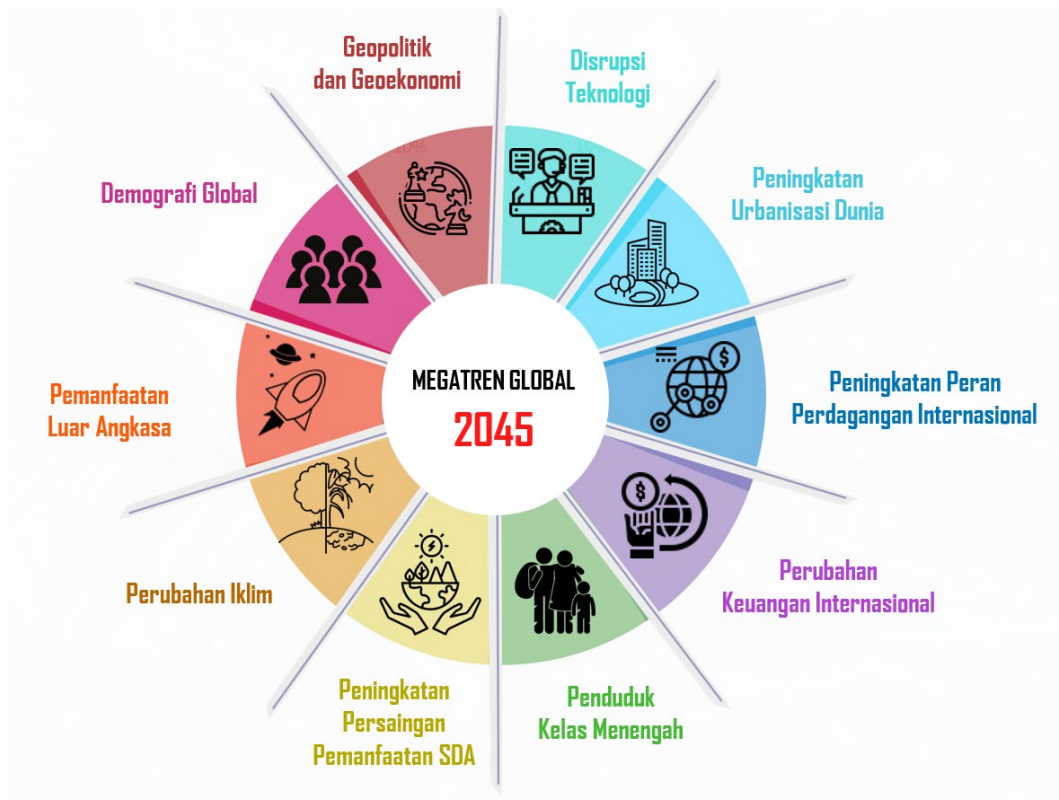
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tulang Bawang khususnya untuk jangka waktu tahun 2025-2045. Komponen pembentuk isu-isu strategis di Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan (*sustainability*) pembangunan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan juga dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan.

3.1. Megatren Global

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (*new normal*).

Gambar 3.1 Megatren Global



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Terdapat sepuluh megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren global memiliki dua sisi yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, akan tetapi juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya:

1. Perkembangan demografi global;
2. Geopolitik dan geoekonomi;
3. Perkembangan teknologi;
4. Peningkatan urbanisasi dunia;
5. Konstelasi perdagangan global;
6. Tata Kelola keuangan global;
7. Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*);

8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam;
9. Perubahan iklim;
10. Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

3.2. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, akan tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa yang akan datang. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran visi Indonesia Emas 2045 meliputi aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan ke depan yaitu:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat;
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN);
3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai;
4. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah;
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut;
7. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi;
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal;
9. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkesinambungan;

10. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas diseluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi;
11. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau;
12. Perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas;
13. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas;
14. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi;
15. Akses dan kualitas yang belum merata di sektor Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial;
16. Kualitas Pendidikan masih rendah;
17. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah;
18. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah;
19. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif;
20. Proses bisnis dan tata Kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif;
21. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D;
22. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik;
23. Belum meratanya kualitas pelayanan publik;

24. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat;
25. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar;
26. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal;
27. Keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan;
28. Sistem hukum belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan;
29. Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan;
30. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan;
31. Perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan;
32. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan kedalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan Masyarakat;
33. Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
34. Ketimpangan antar Jawa dan Luar Jawa masih cukup tinggi;
35. Pembangunan infrastruktur masih jauh dibawah kebutuhannya;
36. Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang belum optimal;
37. Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara

- perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang;
38. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

3.3. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Provinsi Lampung

Beberapa isu dan tantangan pembangunan Provinsi Lampung ke depan diantaranya:

1. Jumlah penduduk Lampung Tahun 2045 diproyeksikan 11,076 juta jiwa

Besarnya jumlah penduduk menggambarkan bahwa Lampung memiliki potensi yang cukup besar terutama pada jumlah tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) dan potensi pasar domestik bagi perekonomian. Dari sisi yang lain, besarnya jumlah penduduk juga menjadi tantangan tersendiri terutama penciptaan lapangan kerja, produktivitas, serta pembangunan kualitas SDM yang lebih sehat, terdidik dan berdaya saing.

2. Letak geografis Lampung menjadi peluang sekaligus tantangan
3. Ekonomi biru dan pengembangan potensi sumber daya laut dan pesisir

Provinsi Lampung memiliki potensi kelautan dan sumber daya pesisir (termasuk pulau-pulau kecil) yang tinggi dan diperkaya dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar, akan tetapi kondisi umumnya masih belum optimal.

4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) untuk mendukung kemandirian energi
5. Lampung wilayah rawan gempa, tsunami dan gunung berapi
6. Produktivitas komoditas unggulan relatif belum berkembang
7. Peran industri dalam perekonomian daerah masih stagnan
8. Produktivitas sektor industri (Nilai TFP) masih rendah
9. Belum optimalnya ekonomi digital, ekonomi syariah dan pariwisata sebagai pendorong ekonomi daerah
10. Ekonomi sirkular

Keterbatasan sumber daya sudah menjadi keniscayaan, sedangkan keinginan manusia sifatnya tidak terbatas. Untuk itu pemanfaatan sumber daya sudah seharusnya lebih efisien sehingga residu dari proses produksi dapat diminimalisir bahkan dikatakan nihil.

11. Pemanfaatan peran IPTEK dan inovasil belum optimal
12. Kualitas sumber daya manusia
13. Kemiskinan
14. Keluarga dan gender
15. Stabilitas transtibmas dalam kemajemukan
16. Pelestarian nilai religi, budaya dan nasionalisme sebagai modal sosial Pembangunan
17. Kepemudaan
18. Perubahan iklim dan perdagangan karbon
19. Tata Kelola Pemerintahan – ASN berintegritas
20. Tata Kelola satu data satu peta

3.4. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Ketidaksesuaian pembangunan dengan kondisi riil yang dibuat saat perencanaan timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan kondisi daerah yang telah dijabarkan pada Bab II dokumen ini, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang antara lain:

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan pokok bidang Pendidikan yaitu: (1) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (2) Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan; (3) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- a. Rendahnya rata-rata lama sekolah ($RLS = 7,56$)
- b. Angka partisipasi sekolah tingkat SMA rendah
- c. Lulusan SMP/ sederajat yang tidak melanjutkan ke tingkat SMA/ sederajat cukup tinggi
- d. Angka putus sekolah tingkat SMA tinggi
- e. Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar
- f. Kualitas sarana pendidikan belum merata
- g. Rasio ketersediaan sekolah tingkat SMP/ sederajat mengalami penurunan

- h. Tenaga kependidikan PAUD belum terstandarisasi
- i. Adanya penurunan ketersediaan guru SD/ sederajat

Tabel 3.1 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Rendahnya rata-rata lama sekolah	- Keterbatasan ekonomi - Penduduk usia 16-18 tahun lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA/ sederajat
		Angka partisipasi sekolah tingkat SMA rendah	
		Lulusan SMP/ sederajat yang tidak melanjutkan ke tingkat SMA/ sederajat cukup tinggi	
		Angka putus sekolah tingkat SMA tinggi	
2	Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Sarana dan prasarana pendidikan belum memenuhi standar	- Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi - Masih banyak sekolah yang terakreditasi C
		Kualitas sarana pendidikan belum merata	Belum meratanya kelembagaan pendidikan antara sekolah negeri dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			sekolah swasta Masih banyak masyarakat yang lebih memilih sekolah negeri
		Rasio ketersediaan sekolah tingkat SMP/ sederajat mengalami penurunan	Peningkatan jumlah penduduk usia sekolah tidak diiringi dengan peningkatan penyediaan sarana pendidikan
3	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik	Tenaga kependidikan PAUD belum terstandarisasi	
		Adanya penurunan ketersediaan guru SD/ sederajat	- Rendahnya kesejahteraan guru honorer - Jumlah pensiunan tidak seimbang dengan jumlah pengangkatan guru

Sumber: Hasil Analisis

2. Bidang Kesehatan

Permasalahan pokok bidang Kesehatan yaitu: (1) Angka Kematian Ibu (AKI); (2) Angka Kematian Bayi (AKB); (3) Prevalensi Stunting

dan (4) Angka Tuberkulosis (TBC). Adapun masalah dari masalah pokok tersebut antara lain:

- a. Masih adanya kematian ibu melahirkan karena beberapa sebab seperti pendarahan, ibu hamil beresiko tinggi (Hipertensi, Tinggi kadar gula, ibu hamil KEK) dan adanya pernikahan usia dini berpotensi risiko tinggi terhadap ibu hamil dan janinnya
- b. Masih adanya kematian bayi karena beberapa sebab seperti gangguan kongenital, Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan Asupan Gizi Ibu Hamil kurang
- c. Masih adanya balita stunting karena beberapa sebab seperti asupan gizi ibu hamil kurang, adanya penyakit infeksi dan pola asuh keluarga yang keliru
- d. Masih adanya penderita TBC karena beberapa sebab seperti perilaku penderita TBC belum menerapkan hidup bersih dan sehat yang menyebabkan penularan TBC semakin luas, Penderita TBC belum teratur dalam minum obat TBC selama 6 - 9 bulan, kurangnya pengawasan pendamping minum obat TBC (keluarga) kepada penderita TBC

Tabel 3.2 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kesehatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Masih adanya kematian ibu melahirkan karena beberapa sebab seperti perdarahan, ibu hamil beresiko tinggi (Hipertensi, Tinggi kadar gula, ibu hamil KEK) dan adanya pernikahan usia dini berpotensi risiko tinggi	Ibu hamil jarang/tidak pernah melakukan kontrol/pemeriksaan selama masa kehamilan, keterlambatan pengiriman pasien rujukan ibu hamil

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terhadap ibu hamil dan janinnya	beresiko tinggi ke pelayanan kesehatan rujukan (RS)
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Masih adanya kematian bayi karena beberapa sebab seperti gangguan kongenital, Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan Asupan Gizi Ibu Hamil kurang	Rendahnya pengetahuan ibu hamil, keterlambatan pengiriman pasien rujukan ibu hamil beresiko tinggi ke pelayanan kesehatan rujukan (RS)
3	Prevalensi Stunting	Masih adanya balita stunting karena beberapa sebab seperti asupan gizi ibu hamil kurang, adanya penyakit infeksi dan pola asuh keluarga yang keliru	Ibu hamil jarang/tidak pernah melakukan kontrol/pemeriksaan selama masa kehamilan, adanya penyakit infeksi pada ibu hamil
4	Angka Tuberkulosis (TBC)	Masih adanya penderita TBC karena beberapa sebab seperti perilaku penderita TBC belum menerapkan hidup bersih dan sehat yang menyebabkan penularan TBC semakin luas, Penderita TBC belum teratur dalam minum obat TBC selama 6 - 9 bulan, kurangnya pengawasan pendamping minum obat TBC (keluarga) kepada penderita TBC	Kepatuhan dalam menjalankan PHBS penderita TBC masih rendah, Penderita TBC enggan minum obat TBC bila sudah merasakan sakitnya berkurang

Sumber: Hasil Analisis

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pokok bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan dasar. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- a. Kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 27,26%
- b. Kondisi peningkatan jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 68,79%
- c. Cakupan air minum aman dan sanitasi layak belum optimal, rumah tangga berakses air minum aman sebesar 80,88%
- d. Kondisi gedung pemerintah belum berfungsi secara optimal
- e. Adanya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang

Tabel 3.3 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya cakupan dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar	Kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 27,26%	• Muatan kendaraan yang berlebih (<i>overloaded</i>) • Kurang baiknya sistem drainase jalan • Ketidaksesuaian standar pembangunan jalan • Infrastruktur jalan belum menjangkau ke seluruh wilayah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kabupaten • Ketersediaan jalan belum terintegrasi dengan bagian-bagian jalan • Lebar jalan belum memenuhi standar jalan kabupaten
		Kondisi peningkatan jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 68,79%	• Belum memadainya sarana pendukung untuk pemeliharaan irigasi • Belum memadainya pengembangan dan pengelolaan konservasi sumber daya air • Jaringan irigasi belum seluruhnya menjangkau seluruh areal pertanian beririgasi/sawah • Masih rendahnya jaringan irigasi yang terintegrasi dengan kelengkapan jaringan irigasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Saluran irigasi dan bangunan irigasi belum berfungsi dengan baik • Belum optimalnya konservasi sumber daya air
		Cakupan air minum aman dan sanitasi layak belum optimal, rumah tangga berakses air minum aman sebesar 80,88%	• Belum adanya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi • Sebagian penduduk masih menggunakan sumur-sumur • Pelayanan air minum yang bersih untuk penduduk perlu semakin diperhatikan mengingat padatnya permukiman dan buruknya sanitasi • Kuantitas air baku rendah • Lemahnya pengawasan dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pengendalian terhadap pemanfaatan air baku • Belum tercapainya layanan air minum 100% • Belum tercapainya layanan sanitasi 100%
		Kondisi gedung pemerintah belum berfungsi secara optimal	• Bangunan gedung pemerintahan dan publik belum memadai • Kawasan perbatasan belum terbangun <i>landmark</i> yang baik • Menurunnya kondisi baik bangunan gedung pemerintah • Belum optimalnya penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan • Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungannya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Belum tertatanya kawasan cagar budaya, pariwisata, sistem perkotaan dan kawasan strategis
		Adanya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang	• Belum selesainya pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten Tulang Bawang • Belum selesainya Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sebagaimana yang diamanatkan dalam perda RTRW • Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang • Terbatasnya peralatan dan teknologi penunjang untuk pengawasan dan pengendalian ruang

Sumber: Hasil Analisis

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pokok bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu: (1) Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar dan (2) Belum tertatanya kawasan kumuh. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- a. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni masih relatif tinggi
- b. Persentase penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman masih cukup tinggi
- c. Masih besarnya *backlog* perumahan
- d. Masih besarnya luas kawasan kumuh

Tabel 3.4 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan sesuai standar	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menempati rumah tidak layak huni masih relatif tinggi	• Harga rumah tidak terjangkau bagi kelompok MBR dan dibawah MBR • Pelayanan PSU belum optimal • Proses serah terima PSU belum optimal
		Persentase penduduk dengan rumah tinggal yang mengakses sarana sanitasi bersuspek aman masih cukup	• Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		tinggi	Sehat (PHBS) • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas sanitasi terbangun dan lingkungan • Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL sesuai standar • Sulitnya mencari lahan yang ideal untuk pembangunan sanitasi
		Masih besarnya <i>backlog</i> perumahan	• Keterbatasan dan mahal nya harga lahan • Belum optimalnya intervensi untuk penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan
2	Belum tertatanya kawasan	Masih besarnya	• Belum adanya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kumuh	luas kawasan kumuh	sinkronisasi dan integrasi program mengenai penataan dan pengendalian kawasan kumuh • Belum adanya basis mengenai deliniasi kawasan kumuh • Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya

Sumber: Hasil Analisis

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pokok bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat yaitu: (1) Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana; (2) Pelanggaran Perda dan Perkada yang masih tinggi; (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masih rendah dan (4) Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana kebakaran. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- a. Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana

- b. Sistem penyuluhan dan pengawasan tentang Perda dan Perkada belum berjalan optimal
- c. Kurang beraninya masyarakat dalam menegakkan hukum (menegur)
- d. Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran kurang optimal
- e. Belum tersedia APD alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menanggulangi kebakaran
- f. Kurangnya sarana prasarana pemadam kebakaran

Tabel 3.5 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana	Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana	• Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya daerah rawan bencana • Belum optimalnya regulasi mitigasi bencana • Belum efektifnya penyebaran informasi kebencanaan • Belum semua daerah di Kabupaten Tulang Bawang yang rawan bencana mempunyai rambu petunjuk jalur evakuasi
2	Pelanggaran Perda dan Perkada yang masih tinggi	Sistem penyuluhan dan pengawasan tentang Perda dan Perkada belum berjalan optimal	• Belum memadainya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan Perda dan Perkada

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Belum optimalnya integrasi perijinan antar Lembaga • Kurangnya jumlah Satpol PP
3	Peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masih rendah	Kurang beraninya masyarakat dalam menegakkan hukum (menegur)	• Belum memadainya sarana dan prasarana untuk patroli wilayah • Masih rendahnya tingkat kesadaran dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan • Kurangnya jumlah Satpol PP untuk pengawasan
4	Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran kurang optimal	• Kurangnya armada pemadam kebakaran
		Belum tersedia APD alat pelindung diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menanggulangi kebakaran	• Kurang maksimal dalam pelaksanaan tugas penyelamatan bencana kebakaran
		Kurangnya sarana prasarana pemadam kebakaran	• Belum ada kendaraan <i>rescue</i> penyelamatan

Sumber: Hasil Analisis

6. Bidang Sosial

Permasalahan pokok bidang sosial yaitu: (1) Rendahnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); (2) Belum memadainya sarana penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial dan (3) Meningkatnya permasalahan sosial. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- a. Jumlah PPKS/PMKS Kabupaten Tulang Bawang sebesar 16.244
- b. Persentase penerima bantuan bagi PPKS di Kabupaten Tulang Bawang masih sedikit
- c. Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap sarana dan prasarana masih rendah/sulit
- d. Meningkatnya biaya kebutuhan taraf hidup

Tabel 3.6 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS/PMKS Kabupaten Tulang Bawang sebesar 16.244	• Meningkatnya jumlah PPKS
		Persentase penerima bantuan bagi PPKS di Kabupaten Tulang Bawang masih sedikit	• Tingginya tingkat kemiskinan
2	Belum memadainya sarana penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap sarana dan prasarana masih rendah/sulit	• Belum adanya regulasi yang mendukung ketersediaan sarpras untuk penyandang disabilitas • Rendahnya pengetahuan atau kesadaran untuk menyediakan akses terhadap penyandang disabilitas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya ketersediaan pendamping/pekerja sosial
3	Meningkatnya permasalahan sosial	Meningkatnya biaya kebutuhan taraf hidup	- Kemiskinan - Masih rendahnya pemberdayaan pemuda

Sumber: Hasil Analisis

7. Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan pokok bidang tenaga kerja yaitu: belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- Menurunnya daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN
- Adanya *missmatch* tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia
- Rendahnya *entrepreneurship*

Tabel 3.7 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Tenaga Kerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	Menurunnya daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN	Rendahnya kualitas tenaga kerja
		Adanya <i>missmatch</i> tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia	Belum efektifnya sertifikasi tenaga kerja
		Rendahnya <i>entrepreneurship</i>	Kurangnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kemampuan masyarakat untuk berwirausaha

Sumber: Hasil Analisis

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: (1) Tingginya kasus KDRT dan *human trafficking* dan (2) Meningkatnya tingkat kekerasan terhadap anak. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- a. Belum optimalnya pelaporan kekerasan
- b. Banyaknya penyalur tenaga kerja tidak resmi
- c. Adanya keterbatasan ekonomi
- d. Adanya kekerasan fisik dan psikis
- e. Adanya kekerasan seksual
- f. Adanya penelantaran

Tabel 3.8 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya kasus KDRT dan <i>human trafficking</i>	Belum optimalnya pelaporan kekerasan	Belum optimalnya sosialisasi mengenai pentingnya melaporkan kekerasan (karakteristik masyarakat yang cenderung malu untuk melaporkan kekerasan)
		Banyaknya penyalur tenaga kerja tidak resmi	Mahalnya biaya operasional untuk menggunakan penyalur kerja resmi serta rumitnya regulasi yang ada pada agen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Meningkatnya tingkat kekerasan terhadap Anak		resmi dan kurangnya tingkat pendidikan SDM
		Adanya keterbatasan ekonomi	Lapangan kerja yang tersedia sedikit, kurangnya tingkat pendidikan masyarakat
		Adanya kekerasan fisik dan psikis	Orang tua yang masih menganggap remeh dalam mendidik dan mengawasi anak
		Adanya kekerasan seksual	Timbulnya hasrat seksual secara alamiah yang tidak diiringi dengan pengendalian diri, kurangnya pemahaman terkait hukum dan sanksi yang dikenakan bagi pelaku kekerasan
		Adanya penelantaran	Perceraian orang tua, perlakuan salah yang diterima oleh anak, ekonomi keluarga yang bermasalah serta pendidikan orang tua yang rendah

Sumber: Hasil Analisis

9. Bidang Pangan

Permasalahan pokok bidang ketahanan pangan yaitu: (1) Aspek penyediaan pangan berupa terjadi penurunan kapasitas produksi atau semakin terbatasnya tingkat produksi; (2) Aspek distribusi pangan berupa belum optimalnya jalur distribusi pangan dan (3) Aspek konsumsi pangan berupa belum terpenuhinya kebutuhan/kecukupan pangan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- a. Terjadinya konversi lahan

- b. Menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan
- c. Terbatasnya stok atau tidak pastinya penyediaan air untuk produksi
- d. Keamanan jalur distribusi belum optimal
- e. Kelembagaan pemasaran belum terorganisir
- f. Pengelolaan sumber pangan lokal belum optimal
- g. Belum terpenuhinya kecukupan konsumsi energi

Tabel 3.9 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Aspek penyediaan pangan berupa terjadi penurunan kapasitas produksi atau semakin terbatasnya tingkat produksi	Terjadinya konversi lahan	• Belum adanya regulasi terkait lahan pertanian berkelanjutan
		Menurunnya kualitas kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan	• Pemakaian pestisida dan zat aditif berlebihan • Kapasitas pelaku usaha tani belum optimal
		Terbatasnya stok atau tidak pastinya penyediaan air untuk produksi	• Ketidakpastian iklim dan belum optimalnya kelembagaan petani tanaman pangan
2	Aspek distribusi pangan berupa belum optimalnya jalur distribusi pangan	Keamanan jalur distribusi belum optimal	• Belum optimalnya komitmen diantara lembaga-lembaga dan para pemangku kepentingan
		Kelembagaan pemasaran belum terorganisir	
3	Aspek konsumsi	Pengelolaan sumber	• Rendahnya kesadaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pangan berupa belum terpenuhinya kebutuhan/kecukupan pangan	pangan lokal belum optimal Belum terpenuhinya kecukupan konsumsi energi	masyarakat akan pentingnya pangan segar, sehat, aman dan halal

Sumber: Hasil Analisis

10. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok bidang Lingkungan Hidup yaitu: (1) Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (2) Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah dan (3) Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut yaitu:

- a. Pengelolaan limbah belum optimal
- b. Pengelolaan lingkungan pada industri belum optimal
- c. Instalasi pengelolaan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah
- d. Belum optimalnya cakupan daerah pengelolaan sampah
- e. Belum optimalnya pengolahan sampah 3R
- f. Pemeliharaan ruang terbuka hijau masih belum optimal
- g. Ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau

Tabel 3.10 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Lingkungan Hidup

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Lemahnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengelolaan limbah belum optimal	• Kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah • Kurangnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kesadaran masyarakat untuk mengolah limbah
		Pengelolaan lingkungan pada industri belum optimal	• Belum memadainya pengaturan industri dalam penanganan limbah • Lemahnya penegakkan hukum untuk pengendalian pencemaran
		Instalasi pengelolaan limbah di rumah tangga dan industri masih rendah	• Adanya keterbatasan lahan untuk menyediakan IPAL • Belum efektifnya regulasi yang mewajibkan penyediaan IPAL domestik
2	Belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah	Belum optimalnya cakupan daerah pengelolaan sampah	• Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah • Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah
		Belum optimalnya pengolahan sampah 3R	• Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah 3R • Partisipasi masyarakat masih

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			belum optimal
3	Belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau	Pemeliharaan ruang terbuka hijau masih belum optimal	• Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk ruang terbuka hijau • Masih kurangnya kesadaran masyarakat
		Ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau	• Belum efektifnya regulasi tentang kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau • Keterbatasan lahan untuk penyediaan ruang terbuka hijau

Sumber: Hasil Analisis

11. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu: belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- Perubahan data kependudukan yang tidak *update* atau terbaru
- Pelayanan publik yang diberikan belum optimal

Tabel 3.11 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pelayanan	Perubahan data kependudukan	• Banyak masyarakat yang tidak melaporkan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	yang tidak <i>update</i> atau terbaru	peristiwa penting terkait kependudukan seperti kematian dan perpindahan penduduk
		Pelayanan publik yang diberikan belum optimal	• Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang memadai dan terbaru

Sumber: Hasil Analisis

12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu: (1) Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat; (2) Belum optimalnya kemandirian desa dan (3) Masih minimnya peran serta BUMD dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi desa dan peningkatan PAD. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- Tidak ada lapangan kerja di desa
- Rendahnya kualitas perencanaan pada tingkat desa
- Rendahnya SDM untuk mengelola SDA

Tabel 3.12 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat	Tidak ada lapangan kerja di desa	• Rendahnya tingkat pendidikan
2	Belum optimalnya kemandirian desa	Rendahnya kualitas perencanaan pada tingkat desa	• Rendahnya komitmen pemerintah desa dalam peningkatan sumber daya aparatur desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Masih minimnya peran serta BUMD dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi desa dan peningkatan PAD	Rendahnya SDM untuk mengelola SDA	• Kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa • Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar

Sumber: Hasil Analisis

13. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pokok bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu: (1) Pengendalian penduduk belum optimal; (2) pembinaan kampung KB dan (3) Rumah Data Kependudukan (RDK). Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Masih tingginya angka peserta KB yang DO (3%) - seharusnya di bawah 5 %
- b. Tingginya sebaran pernikahan anak (<20 tahun)
- c. Belum optimalnya program kampung KB di Kabupaten Tulang Bawang
- d. Belum maksimalnya capaian pembentukan Rumah Data Kependudukan dari target satu RDK di setiap Kampung KB

**Tabel 3.13 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengendalian penduduk belum optimal	Masih tingginya angka peserta KB yang DO (3%) - seharusnya di bawah 5 %	• Keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi belum terus menerus • Adanya preferensi untuk menggunakan jenis KB tertentu • Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan kontrasepsi KB MKJP
		Tingginya sebaran pernikahan anak (<20 tahun)	• Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang usia nikah ideal • Adanya dorongan kebutuhan ekonomi
2	Pembinaan Kampung KB	Belum optimalnya program kampung KB di Kabupaten Tulang Bawang	• Kurangnya peran lintas sektor terkait terhadap intervensi pembangunan dan pengembangan SDM di kampung KB • Kurangnya pembinaan yang dilakukan OPD terkait sesuai peran dan tugas sesuai SK • Minimnya dukungan anggaran • Capaian kepersertaan ber KB yang masih rendah menimbulkan kompleksitas isu kependudukan dan kesehatan
3	Rumah Data Kependudukan (RDK)	Belum maksimalnya capaian pembentukan Rumah Data Kependudukan	• Belum adanya kesadaran akan penting dan strategisnya RDK sebagai acuan dasar pengambilan kebijakan bagi Kampung/Desa • Kurangnya penyebaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dari target satu RDK di setiap Kampung KB	informasi/ sosialisasi tentang RDK • Belum adanya dukungan anggaran baik dari pusat ataupun daerah

Sumber: Hasil Analisis

14. Bidang Perhubungan

Permasalahan pokok bidang perhubungan yaitu belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- Belum memadai ketersediaan lampu penerangan jalan
- Belum memadai rambu-rambu lalu lintas

Tabel 3.14 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas	Belum Memadai ketersediaan lampu penerangan jalan	• Memungkinkan kecelakaan lalu lintas dimalam hari dikarenakan kurangnya jarak pandang pengemudi
		Belum memadai rambu-rambu lalu lintas	• Kurangnya pencahayaan dimalam hari sehingga memungkinkan terjadinya kriminalitas di jalanan

Sumber: Hasil Analisis

15. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu: masih rendahnya Indeks SPBE. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Pemenuhan variabel pada *domain* kebijakan internal SPBE masih belum optimal
- b. Pemenuhan variabel pada *domain* tata kelola SPBE masih belum optimal

Tabel 3.15 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya Indeks SPBE	Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal	• Perlu peningkatan tata kelola dan ekosistem <i>E-Government</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
		Pemenuhan variabel pada <i>domain</i> tata kelola SPBE masih belum optimal	• Perlu peningkatan pembangunan/penyediaan <i>fiber optic</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan • Kurangnya layanan kapasitas <i>bandwidth</i> dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan • Kurangnya sarana dan prasarana data <i>center</i> yang memenuhi standar dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan

Sumber: Hasil Analisis

16. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pokok bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu: (1) Belum optimalnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi produktif; dan (2) Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan
- b. Masih banyak koperasi yang kualitas/kinerjanya rendah (tidak sehat)
- c. Masih minimnya produk-produk yang terstandarisasi
- d. Kecilnya cakupan pemasaran produk
- e. Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk yang dihasilkan

Tabel 3.16 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya peran koperasi sebagai lembaga ekonomi produktif	Jumlah koperasi aktif mengalami penurunan	• Rendahnya preferensi masyarakat untuk menggunakan koperasi (lebih memilih bank) • Banyak bermunculan kompetitor yang mengatasnamakan koperasi (bank keliling) • Kurangnya pemahaman anggota mengenai koperasi
		Masih banyak	• Belum optimalnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		koperasi yang kualitas/kinerjanya rendah (tidak sehat)	manajerial dan kelembagaan pengurus koperasi • Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan bagi koperasi, agar koperasi menjadi aktif • Belum beragamnya aktivitas koperasi (biasanya hanya memiliki satu aktivitas yaitu simpan pinjam)
2	Rendahnya kapasitas UKM sebagai penggerak ekonomi kemasyarakatan	Masih minimnya produk-produk yang terstandarisasi	• Adanya <i>overlapping</i> kewenangan untuk standarisasi
		Kecilnya cakupan pemasaran produk	• Lemahnya kemampuan pelaku usaha untuk mengakses pasar • Masih minimnya produksi sehingga tidak mampu menangkap <i>demand</i> pasar
		Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk yang dihasilkan	• Kurangnya keterampilan dan keahlian • Rendahnya pendidikan dan kreativitas

Sumber: Hasil Analisis

17. Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pokok bidang perdagangan yaitu: (1) Belum optimalnya daya tarik investasi; dan (2) Melambatnya pertumbuhan penanaman modal. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Belum maksimalnya penggalan potensi investasi
- b. Perkembangan regulasi investasi dan/atau penanaman modal yang dinamis (sering berubah) dan multisektoral terkait penanaman modal sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha

Tabel 3.17 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Penanaman Modal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya daya tarik investasi	Belum maksimalnya penggalan potensi investasi	• Belum terpetakannya produk unggulan yang spesifik dan kompetitif • Belum adanya tindak lanjut dan implementasi hasil kajian potensi investasi • Perlunya revisi rencana induk pengembangan industri daerah • Belum optimalnya pelaksanaan promosi penanaman modal
2	Melambatnya pertumbuhan	Perkembangan regulasi investasi	• Belum ada tersedia perda pemberian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	penanaman modal	dan/atau penanaman modal yang dinamis (sering berubah) dan multisektoral terkait penanaman modal sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha	fasilitas/insentif penanaman modal • Belum tersedianya kajian/peta potensi berdasarkan sektor maupun wilayah

Sumber: Hasil Analisis

18. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pokok bidang kepemudaan dan olahraga yaitu (1) Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti olahraga berprestasi dan (2) Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Belum optimalnya peran organisasi olahraga
- b. Belum optimalnya peran organisasi dan wadah kepemudaan

Tabel 3.18 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti olahraga berprestasi	Belum optimalnya peran organisasi olahraga	
2	Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Belum optimalnya peran organisasi dan wadah kepemudaan	• Belum adanya manajerial untuk mengurus peran dan fungsi organisasi

Sumber: Hasil Analisis

19. Bidang Statistik

Permasalahan pokok bidang statistik yaitu belum optimalnya penyediaan data statistik yang akurat dan bersinergis. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data

Tabel 3.19 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Statistik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyediaan data statistik yang akurat dan bersinergis	Belum optimalnya pengelolaan integrasi data statistik dalam rangka satu data	• Kurang siapnya data yang akan disampaikan • Adanya kendala/ hambatan dalam melakukan pembagian data (<i>sharing data</i>)

Sumber: Hasil Analisis

20. Bidang Perpustakaan

Permasalahan pokok bidang perpustakaan yaitu rendahnya minat baca masyarakat. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Belum terbangunnya budaya baca di keluarga
- b. Masih minimnya sarana prasarana untuk membaca

Tabel 3.20 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perpustakaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya minat baca masyarakat	Belum terbangunnya budaya baca di keluarga	• <i>Globalisasi</i> dan <i>Modernisasi</i> • Tidak semua keluarga memiliki akses terhadap buku

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih minimnya sarana prasarana untuk membaca	• Masih minimnya titik-titik untuk mengakses perpustakaan online • Belum meratanya sebaran perpustakaan

Sumber: Hasil Analisis

21. Bidang Kearsipan

Permasalahan pokok bidang kearsipan yaitu belum tertatanya pengelolaan arsip di masyarakat. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan arsip.

Tabel 3.21 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Kearsipan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tertatanya pengelolaan arsip di masyarakat	Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan arsip	• Belum optimalnya sosialisasi terkait pentingnya pengamanan arsip

Sumber: Hasil Analisis

22. Bidang Perikanan

Permasalahan pokok bidang perikanan yaitu: peningkatan produksi, pengelolaan hasil perikanan dan pengawasan sumberdaya perikanan belum optimal. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- Belum terampilnya kompetensi pelaku usaha di bidang perikanan
- Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan (budidaya, tangkap dan pengolahan)

- c. Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk hasil perikanan
- d. Masih ditemukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara terlarang/ *illegal fishing*

Tabel 3.22 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Peningkatan produksi, pengelolaan hasil perikanan dan pengawasan sumberdaya perikanan belum optimal	Belum terampilnya kompetensi pelaku usaha di bidang perikanan	• Adanya keterbatasan sarana pelatihan • Belum optimalnya penggunaan teknologi untuk rekayasa produksi
		Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan (budidaya, tangkap dan pengolahan)	• Degradasi lingkungan mempengaruhi usaha perikanan budidaya dan tangkap • Keterbatasan taraf ekonomi pelaku usaha perikanan
		Kurangnya inovasi dalam pengembangan produk hasil perikanan	• Rendahnya keahlian dan keterampilan tenaga kerja perikanan
		Masih ditemukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara terlarang/ <i>illegal fishing</i>	• Terbatasnya kewenangan pengawasan perikanan di tingkat Kabupaten

Sumber: Hasil Analisis

23. Bidang Pariwisata

Permasalahan pokok bidang pariwisata yaitu: destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Masih minimnya aksesibilitas dan akomodasi penunjang pariwisata
- b. Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan budaya secara terpadu
- c. Wisatawan masih cukup rendah
- d. Kurangnya koordinasi dan integrasi pengelolaan pariwisata oleh berbagai *stakeholder*

Tabel 3.23 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pariwisata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Destinasi wisata belum dikembangkan secara optimal	Masih minimnya aksesibilitas dan akomodasi penunjang pariwisata	• Terbatasnya ketersediaan angkutan umum yang melalui DTW • Kurang bersaingnya harga akomodasi
		Belum optimalnya pemasaran pariwisata dan budaya secara terpadu	• Belum berkembangnya biro perjalanan pariwisata
		Wisatawan masih cukup rendah	• Belum beragamnya atraksi wisata
		Kurangnya koordinasi dan integrasi pengelolaan pariwisata oleh	• Banyak pihak yang bersifat segmental dan partial dalam merencanakan dan mengembangkan DTW • Kurangnya sosialisasi dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		berbagai <i>stakeholder</i>	komitmen <i>stakeholder</i> dalam merealisasikan program pengembangan DTW

Sumber: Hasil Analisis

24. Bidang Pertanian

Permasalahan pokok bidang pertanian yaitu: (1) Produktivitas pertanian masih rendah; (2) Masih rendahnya kualitas produksi pertanian dan (3) Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Penurunan guna lahan pertanian
- b. Berkurangnya jumlah petani
- c. Belum memadainya infrastruktur penunjang pertanian
- d. Rendahnya kapasitas budidaya pertanian
- e. Pemenuhan bibit/benih pertanian unggul belum merata
- f. Tingginya ancaman hama dan penyakit
- g. Rantai pemasaran produk hasil pertanian masih panjang

Tabel 3.24 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Produktivitas pertanian masih rendah	Penurunan guna lahan pertanian	• Rendahnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang • Tingginya laju pertumbuhan penduduk • Dijualnya lahan pertanian oleh para petani
		Berkurangnya jumlah petani	• Rendahnya taraf hidup petani

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			- Berkurangnya daya serap tenaga kerja sektor pertanian - Tidak adanya regenerasi petani
		Belum memadainya infrastruktur penunjang pertanian	- Belum optimalnya fungsi jalan produksi serta jalan usaha tani - Terbatasnya sumber air untuk dimanfaatkan pertanian
2	Masih rendahnya kualitas produksi pertanian	Rendahnya kapasitas budidaya pertanian	- Rendahnya pendidikan dan keahlian SDM di bidang pertanian - Kurang tenaga penyuluh - Terjadinya anomali (iklim, cuaca, dll)
		Pemenuhan bibit/ benih pertanian unggul belum merata	- Kurangnya informasi mengenai benih - Preferensi petani untuk memilih benih biasa bukan benih unggul
		Tingginya ancaman hama dan penyakit	Sistem budidaya masih tradisional dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi produksi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			• Rendahnya pemahaman masyarakat tentang serangan hama dan penyakit • Adanya ketidaksesuaian guna lahan
3	Belum optimalnya pemasaran produk hasil pertanian	Rantai pemasaran produk hasil pertanian masih panjang	• Adanya ketergantungan petani pada pengumpul • Komoditas yang ditanam rentan terhadap fluktuasi harga • Lemahnya regulasi yang mengatur harga

Sumber: Hasil Analisis

25. Bidang Perdagangan

Permasalahan pokok bidang perdagangan yaitu: (1) Masih terbatasnya pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor dan (2) Rendahnya PDRB sektor perdagangan. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah
- b. Belum adanya perluasan negara tujuan pemasaran produk ekspor
- c. Lemahnya pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan impor

- d. Kurang dikenalnya produk IKM dan lemahnya hubungan kerjasama dengan pihak lain
- e. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya alat ukur yang memenuhi standar
- f. Belum optimalnya fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian

Tabel 3.25 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perdagangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih terbatasnya pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor	Minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah	• Tidak berjalannya pendampingan dari pelaku usaha • Belum adanya wadah kelembagaan badan usaha untuk ekspor
		Belum adanya perluasan negara tujuan pemasaran produk ekspor	• Belum optimalnya regulasi untuk membuka peluang pasar dan ekspor baru • Adanya kesulitan dalam memenuhi spesifikasi dari negara-negara tujuan ekspor
2	Rendahnya PDRB sektor perdagangan	Lemahnya pengetahuan pelaku usaha akan prosedur ekspor dan impor	• Kurangnya sosialisasi perundangan di bidang <i>eksport</i> dan <i>import</i>
		Kurang dikenalnya produk IKM dan lemahnya hubungan kerjasama dengan pihak lain	• Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya alat ukur yang memenuhi standar	Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki
		Belum optimalnya fungsi dan peranan pasar dalam meningkatkan perekonomian	Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah

Sumber: Hasil Analisis

26. Bidang Perindustrian

Permasalahan pokok bidang perindustrian yaitu: (1) Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro dan (2) Rendahnya PDRB sektor industri. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- a. Akses pemasaran produk IKM masih terpaku pada pemasaran domestik
- b. Belum menerapkan standarisasi produk, pendaftaran HKI, dan sistem mutu
- c. Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja di bidang industri
- d. Masih rendahnya produktifitas dan mutu produk IKM
- e. Masih lemahnya kerjasama IKM dengan pihak ketiga
- f. Masih rendahnya SDM dan kurangnya IKM yang mempunyai legalitas usaha

Tabel 3.26 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perindustrian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya daya saing produk industri kecil dan mikro	Akses pemasaran produk IKM masih terpaku pada pemasaran domestik	• Kurangnya promosi dan jejaring produk UKM • Adanya keterbatasan IKM untuk memenuhi permintaan pasar global • Belum ada lembaga yang mewadahi pengembangan IKM dan produk turunannya
		Belum menerapkan standarisasi produk, pendaftaran HKI, dan sistem mutu	• Masih adanya tumpang tindih kewenangan untuk sertifikasi • Kurangnya dukungan dari pelaku IKM untuk melakukan sertifikasi
		Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja di bidang industri	• Terbatasnya kemampuan dan keterampilan pelaku industri • Belum optimalnya peran lembaga pendidikan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang mendukung sektor industri
2	Rendahnya PDRB sektor Industri	Masih rendahnya produktifitas dan mutu produk IKM	• Masih rendahnya produktifitas IKM • Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM
		Masih lemahnya kerjasama IKM dengan pihak ketiga	• Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM
		Masih rendahnya	• Masih rendahnya pendidikan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		SDM dan kurangnya IKM yang mempunyai legalitas usaha	dan ketrampilan pelaku usaha Masih banyak usaha IKM yang belum berizin

Sumber: Hasil Analisis

27. Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan

Permasalahan pokok bidang penunjang urusan pemerintahan yaitu: belum optimalnya kesinambungan pembangunan daerah. Adapun masalah dari masalah pokok tersebut adalah:

- Komitmen dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah belum optimal

Tabel 3.27 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kesinambungan pembangunan daerah	Komitmen dan sinergisitas dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah belum optimal	- Arah pembangunan daerah berpotensi selalu berubah mengikuti perubahan konstelasi politik - Perencanaan dan penganggaran program pembangunan dalam RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS yang telah disepakati belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan - Adanya perubahan-perubahan regulasi dari pusat sehingga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			program maupun kegiatan yang dilaksanakan belum optimal

Sumber: Hasil Analisis

3.5. Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis perlu diantisipasi, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis ditunjukkan dari kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis dapat juga dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal Pembangunan yang signifikan. Penetapan isu strategis Pembangunan jangka panjang di Kabupaten Tulang Bawang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Penetapan isu strategis jangka panjang Kabupaten Tulang Bawang diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya:

1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang
2. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang

3. Isu strategis kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - a. Kebijakan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang yang antara lain bersumber dari RPJPD, KLHS dan RTRW Kabupaten Tulang Bawang
 - b. Isu strategis yang diangkat dari hasil fakta dan analisis terhadap gambaran umum dan kondisi daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal sebelumnya serta mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut:

1. Sektor pendidikan belum terbangun optimal

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah tersedianya cukup sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara

pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Peningkatan SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun).

Angka Rata-rata lama sekolah penduduk Tulang Bawang meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 7,57. Angka 7,57 menunjukkan bahwa penduduk usia lebih dari 15 tahun memiliki rata-rata belum lulus SMP/MTs atau sederajat (7,00 dalam tahun). Kecenderungan penduduk di atas antara lain yang tidak sedang menjalankan pendidikan di sekolah formal yakni di SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan sederajatnya. Penduduk tersebut lebih cenderung bekerja dengan ijazah terendahnya (misalnya SD), tidak melanjutkan pendidikan formal pada usianya dan tidak melanjutkan pendidikan melalui pendidikan non formal (Paket B atau C).

Angka Partisipasi Kasar (APK) berdasarkan tingkatan sekolah yaitu Tingkat SD pada Tahun 2019 sebesar 113,14 menurun pada Tahun 2023 menjadi 110,05. Tingkat SMP/MTS pada Tahun 2019 sebesar 97,19 menurun pada Tahun 2023 menjadi 93,47.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Tulang Bawang mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2023, peningkatan di semua jenjang pendidikan yaitu SD pada Tahun 2019 sebesar 99,58% menjadi sebesar 99,78% pada Tahun 2023 dan SMP/MTs pada Tahun 2019 sebesar 78,53% menjadi sebesar 81,39% pada Tahun 2023. Hal ini disebabkan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan pada usia sekolah dan banyaknya bantuan dari pemerintah dibidang pendidikan, sehingga meningkatkan APM pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) selama kurun waktu 2021-2023 mengalami angka yang fluktuatif. APS kelompok umur 3-6 tahun pada tahun 2021 sebesar 72,24% meningkat pada tahun 2023 menjadi 72,42%. APS pada kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2021 sebesar 99,59% meningkat pada tahun 2023 menjadi 99,78%. Sementara itu pada kelompok umur 13-15 tahun, angka APS pada tahun 2021 sebesar 95,52% meningkat pada tahun 2023 menjadi 96,56%. Hal ini disebabkan disamping meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan juga karena semakin sadarnya orang tua akan pentingnya pendidikan.

Angka Putus Sekolah pada Tahun 2023 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,2% atau sama dengan tahun 2022 yang sebesar 0,2%. Tingkat SMP/MTs mengalami peningkatan dari sebesar 0,5% pada tahun 2022 menjadi 0,75% pada tahun 2023.

Disisi lain, ketersediaan fasilitas sarana prasarana dasar pendidikan juga masih perlu peningkatan demi menunjang pengalaman belajar siswa dan motivasi untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi.

2. Pelayanan kesehatan belum optimal

Kualitas hidup masyarakat tidak saja ditentukan oleh tingkat pendapatan dan pendidikan yang dicapai oleh masyarakat, tetapi juga kualitas kesehatan masyarakat turut menentukan kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup menunjung umur rata-rata yang akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Dalam analisis demografi angka harapan hidup merupakan salah satu ukuran mortalitas yang penting, karena merupakan satu bagian yang saling mendukung secara berbanding terbalik dengan angka kematian bayi yang merupakan probabilitas seorang bayi

meninggal sebelum mencapai tepat umur satu tahun. AHH di Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan, pada 2019 AHH penduduk Tulang Bawang mencapai 69,88 tahun dan pada tahun 2023 menjadi 70,31 tahun. Hal ini menggambarkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini menggambarkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 2023 di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 3 kasus kematian bayi. Angka Kematian Bayi tersebut berhubungan erat dengan kenaikan Ibu Hamil dengan usia lebih dari 40 tahun, kehamilan lebih dari 5 kali, dan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Tulang Bawang dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan pada tahun 2023 angka kematian ibu di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 0 kasus atau 0 per 100.000 kelahiran hidup dari 8.685 kelahiran hidup, jika dibandingkan tahun 2022 angka kematian ibu di Kabupaten Tulang Bawang sebesar 69,17 per 100.000 kelahiran hidup atau sebanyak 6 kasus dari 8.674 kelahiran hidup. Capaian AKI Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 sangat baik, hal ini dapat diartikan bahwa Kabupaten Tulang Bawang berhasil dalam penanganan AKI melalui program-program yang telah dilaksanakan dalam upaya penurunan AKI. Kemudian stunting merupakan salah satu program nasional. Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang tiga tahun terakhir, terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 10,2 pada tahun 2022 menjadi sebesar 9,8 pada tahun 2023. Atas capaian tersebut Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang memperoleh penghargaan sebagai daerah dengan keberhasilan penurunan angka stunting terendah di Provinsi Lampung.

3. Belum tuntasnya persoalan kesenjangan perekonomian masyarakat Kabupaten Tulang Bawang

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna), sehingga nilai Gini Ratio berkisar antara 0–1. Indikator ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu wilayah. Gini Ratio Kabupaten Tulang Bawang tahun 2019 tercatat 0,322. Selanjutnya tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,279, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,292. Pada tahun 2022 indikator ini mengalami penurunan menjadi 0,287. Pada tahun 2023, menurun menjadi 0,284. Dengan hasil tersebut masih diperlukan upaya-upaya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat Tulang Bawang.

4. Pengentasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami penurunan secara signifikan menjadi 8,04.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang 2019-2023 selalu berada di bawah Provinsi Lampung, akan tetapi tetap harus ada evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan untuk melihat seberapa efektif program yang ada selama ini sudah tepat sasaran dalam mengatasi kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran justru akan memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas pendapatan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (P1) dan keparahan dari kemiskinan (P2).

5. Produktivitas sektor pertanian belum optimal

Sektor pertanian tetap diharapkan berkontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Tulang Bawang mengingat kontribusi peluang kerja di sektor ini masih besar di samping luasan lahan pertanian di Kabupaten Tulang Bawang masih signifikan. Peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tulang Bawang ditunjang oleh adanya bantuan langsung benih unggul, bantuan langsung pupuk, perbaikan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian berupa JUT, JITUT, embung, alat pengolah pupuk organik, pompa air dan pompa hidram, benih unggul, bantuan pupuk bersubsidi, antisipasi dan penanggulangan dini serangan hama penyakit tanaman, serta bantuan alat pra dan pasca panen, sehingga lebih, mengoptimalkan produktivitas.

Pembangunan pertanian juga menyangkut subsektor perkebunan dimana ruang lingkup pembangunan perkebunan meliputi kegiatan-kegiatan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, ekstensifikasi dan diversifikasi kebun, produksi, pengolahan dan pemasaran, peningkatan peran serta dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan perkebunan, pengembangan kelembagaan serta penerapan agribisnis perkebunan dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Agribisnis perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan, akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk yang dihasilkan, pengolahan dan pemasaran hasil yang memadai serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai. Penerapan agribisnis ini dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh

petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna serta tingkat kemampuan petani dan kelembagaan petaninya di dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis juga memadai. Di sisi lain efisiensi usaha tani akan dapat tercapai apabila produksi yang tinggi tersebut dapat diimbangi dengan biaya produksi yang sekecil mungkin dengan peluang pasar yang baik serta dicapai tingkatan dengan harga yang wajar.

6. Produktivitas sektor perikanan belum optimal

Sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor potensial dalam struktur perekonomian Kabupaten Tulang Bawang yang belum banyak dioptimalkan. Perikanan laut di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan kondisi yang semakin meningkat, kondisi tersebut mengindikasikan besarnya potensi sektor perikanan laut yang berpeluang besar untuk dioptimalkan. Potensi tersebut dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, saat ini produksi perikanan tangkap mencapai sebanyak 26.249,62 ton atau mengalami peningkatan sebanyak 538,06 ton jika dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 yang sebanyak 25.711,56 ton.

Peningkatan produksi maupun nilai produksi perikanan budidaya sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap perikanan budidaya, serta dipengaruhi oleh harga pasar. Selain itu, didukung juga dengan pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan rehabilitasi budidaya ikan air tawar dengan prioritas pada komoditas unggulan yang mempunyai nilai lebih pada sistem produksi dan pemasaran. Potensi Perikanan darat juga tak kalah banyaknya, seperti pada sungai, rawa dan kolam memiliki potensi untuk pengembangan perikanan.

7. Pariwisata belum terbangun dengan optimal

Dalam industri pariwisata, ikon wisata menjadi sangat penting karena akan menjadi petunjuk awal bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah dan pada akhirnya dapat menarik minat wisatawan dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan adalah melalui pembangunan tugu dan taman seperti Tugu Garuda, Tugu Ikan Jelabat, Tugu Udang, Tugu Simpang Penawar, Taman Merah Putih dan Taman Kerukunan.

Perkembangan potensi kepariwisataan di Kabupaten Tulang Bawang dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang saat ini memiliki 3 (tiga) jenis wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Jumlah objek wisata alam berjumlah 8 (delapan) objek, wisata budaya berjumlah 2 (dua) objek dan wisata sejarah berjumlah 4 (empat) objek.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2023 mencapai 34.713 orang. Pencapaian jumlah kunjungan wisatawan tersebut merupakan kurang terlaksananya dari pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata daerah antara lain melalui peningkatan daya tarik obyek wisata, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, peningkatan kemitraan dan jejaring pariwisata serta optimalisasi dan pemberdayaan kapasitas kampung wisata.

8. Kondisi lingkungan hidup yang belum optimal

Secara prioritas nasional, pembangunan urusan lingkungan hidup dititikberatkan pada lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan pada konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko

bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Adanya alih fungsi lahan dapat mengancam lahan pertanian, pangan berkelanjutan dan menyebabkan kerusakan habitat dan fungsi lahan basah. Sejalan dengan itu maka perlu upaya pengembangan lahan kritis menjadi lahan produktif melalui rehabilitasi lahan dan reboisasi, serta mendorong praktik budidaya pertanian yang baik dan berkelanjutan. Salah satu tolak ukur untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup digunakan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), sehingga diperoleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 sebesar 61,50 (sedang). Kondisi ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang semakin dalam kondisi yang baik dan terus berupaya mengurangi aktivitas yang menyebabkan berkurangnya kualitas lingkungan hidup. Untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai IKLH selama 20 tahun ke depan, diperlukan beberapa upaya tambahan, yaitu:

- Melindungi dan merehabilitasi hutan, sungai, dan ekosistem alami, yang bertujuan untuk menjaga fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta mengurangi dampak perubahan iklim.
- Menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan mengawasi ketat terhadap pabrik dan industri yang dapat mencemari lingkungan.
- Mendorong penggunaan transportasi umum, sepeda, dan mobil listrik serta mendorong penggunaan energi terbarukan.

- Menguatkan hukum dan peraturan lingkungan yang ketat serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan.
- Memperbanyak penetapan Ruang Terbuka Hijau (RTH), melindungi dan merehabilitasi daerah yang berfungsi sebagai RTH.
- Melakukan pengelolaan sampah yang baik, yaitu dengan mengurangi produksi sampah, memilah sampah, mendaur ulang sampah, serta memanfaatkan sampah sebagai sumber energi.

9. Belum maksimalnya pengembangan infrastruktur berkualitas dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tulang Bawang

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Jalan sebagai sarana transportasi memiliki peran penting khususnya dalam transportasi darat. Peningkatan infrastruktur jalan menjadi sangat penting dalam menjaga urat nadi perekonomian daerah khususnya Kabupaten Tulang Bawang. Dititik ini, ketersediaan infrastruktur bernilai penting karena berkolerasi dengan waktu tempuh dan ongkos distribusi yang menentukan kemajuan daerah. Sebagian besar jalan di Kabupaten Tulang Bawang sudah berupa jalan aspal dan kerikil, walaupun

kondisinya beragam (baik, sedang, rusak, dan rusak berat). Persentase panjang jaringan jalan dalam mantap di Kabupaten Tulang Bawang cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi masih perlu upaya serius untuk meningkatkan jalan mantap di Kabupaten Tulang Bawang dengan kondisi jalan mantap pada tahun 2023 sebesar 234,62 km² dari total panjang jalan kabupaten sebesar 786,08 km² masih jauh dari kata sempurna.

Rumah tidak layak huni juga masih terdapat di beberapa wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2023 terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 1768 rumah. Permasalahan yang dihadapi dalam hal perumahan masih tingginya angka defisit rumah (*backlog*), kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum teratasi tuntas, dari sisi kemitraan peran serta dan keswadayaan masyarakat masih rendah, terbatasnya akses masyarakat terhadap sumberdaya kunci termasuk didalamnya informasi mengenai pembiayaan perumahan.

Selain hal tersebut juga disebabkan daya beli masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) masih lemah. Sedangkan permasalahan di lingkungan perumahan umum yaitu: genangan air atau banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, rumah sudah terbangun namun prasarana pendukung lingkungannya belum optimal, sehingga PSU tidak terpadu antar sistem.

10. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Beberapa hal penyebab belum efektifnya kinerja pemerintah dapat dilihat dari beberapa kondisi yang masih ada. Diantaranya belum optimalnya kualitas perencanaan. Hal ini diakibatkan oleh

beberapa faktor penyebab, diantaranya adanya perubahan-perubahan regulasi dari pusat sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang optimal, masih belum terpenuhinya kuantitas maupun kualitas SDM perencana pada semua OPD.

Selain itu belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik menyebabkan kualitas pelayanan publik yang belum optimal dan maksimal. Sedangkan peningkatan pendapatan daerah terus diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi beberapa sumber pendapatan seperti pajak dan retribusi serta hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah. Sehingga dibutuhkan strategi-strategi alternatif untuk menggali potensi-potensi baru pendapatan daerah dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah, meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan BUMD serta meningkatkan investasi daerah, perlu untuk dikedepankan melalui upaya-upaya yang inovatif.

Reformasi birokrasi Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang dicerminkan melalui nilai dan peringkat indeks reformasi birokrasi. Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2019 hanya sebesar 44,25 dan selama dua tahun yaitu tahun 2019 hingga 2020 predikat indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tulang Bawang adalah C. Kemudian pada tahun 2021 hingga 2022, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Tulang Bawang meningkat dengan predikat CC dan pada tahun 2023, indeks reformasi birokrasi turun menjadi 54,75 dengan predikat C. Namun, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang diharapkan dapat terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu

upaya dilakukan lewat transformasi berbasis digital agar dapat mempertahankan capaian indeks reformasi birokrasi.

Selain itu, pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Capaian IPP Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 IPP Kabupaten Tulang Bawang memperoleh nilai 3,08 (B-) dengan kategori Baik Dengan Catatan, tahun 2020 nilai IPP meningkat menjadi 3,94 (B) dengan kategori Baik, tahun 2021 nilai IPP kembali meningkat menjadi 4,41 (A-) dengan kategori Sangat Baik, pada tahun 2022 hingga tahun 2023 nilai IPP Kabupaten Tulang Bawang meningkat dengan nilai 4,6 (A) dengan kategori Pelayanan Prima.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Tinjauan Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045 adalah **“Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Negara Nusantara bermakna negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil. Berkelanjutan melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Gambar 4.1 Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi yaitu:

1. Pendapatan per Kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000 – 30.300 dan masuk ke

dalam ekonomi lima besar dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15 persen.

2. Kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan rasio gini sebesar 0,377-0,320 dan ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi 28,5 persen.
3. Peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) peringkat 15 besar dunia.
4. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) atau *Human Capital Index* (HCI) menjadi 0,73 pada tahun 2045.
5. Menurunnya Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari 3 (tiga) kerangka pikir transformasi yaitu **Tranformasi Indonesia**, **Landasan Transformasi** dan **Kerangka Implementasi Transformasi**. Kerangka pikir tranformasi tersebut diterjemahkan melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yaitu (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; (iii) Transformasi Tata Kelola; (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi; (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas; (vii) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; (viii) Kestinambungan Pembangunan.

Gambar 4.2 Transformasi dan Agenda Pembangunan Indonesia Emas 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.3 Tujuh Belas Arah (Tujuan) Pembangunan Indonesia Emas 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Selain itu, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 diperlukan pentahapan pembangunan dalam jangka panjang yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Pentahapan pembangunan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu (i) Tahap Pertama (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi; (ii) Tahap Kedua (2030-2034) Akselerasi Transformasi; (iii) Tahap Ketiga (2035-2039) Ekspansi Global; dan (iv) Tahap Keempat (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas.

Gambar 4.4 Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

4.2. Tinjauan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2045

Penyusunan RPJPD Lampung Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa visi yang dicanangkan harus memiliki kekuatan, menjadi spirit, mencerminkan sikap dan merupakan cita-cita seluruh komponen masyarakat Lampung untuk meningkatkan kualitas hidup dan eksistensi Provinsi Lampung di kancah regional, nasional hingga global dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Visi Lampung 2025-2045 adalah **“Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”**.

Untuk lebih mempertegas ukuran keberhasilan visi Lampung 2045, maka visi tersebut dilengkapi dengan 5 (lima) indikator tujuan yaitu:

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”								
No.	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target			
					Th. 2025-2029	Th. 2030-2034	Th. 2035-2039	Th. 2040-2045
1.	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	48,2	52,14 - 52,46	76,82-95,94	158,77-176,23	267,5-296,9	328,03 - 384,39
		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,55	4,90-5,30	5,31-6,0	5,90-6,41	6,22-7,0	5,52-6,97
		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	18,01	18,50 - 19,40	20,54-21,1	22,36-23,4	24,18-25,70	26-28
		Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	23,43	40	50	60	65,16*
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,11	10,00 - 9,50	9,49-8,50	8,00-6,00	5,00-3,00	2,50 - 2,00
		Indeks Gini (Indeks)	0,324	0,321 - 0,318	0,310-0,290	0,280-0,275	0,274-270	0,256 - 0,266
		Persentase Desa Mandiri (persen)	7,46	10,00	16,00-20,00	21,00-25,00	26,00-30,00	31,00-35,00
3.	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02 (2022)	3,02	3,1-3,25	3,26-3,30	3,30-3,75	3,76 - 4,00
		Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,15	2,17	2,25	2,33	2,42	2,50
4.	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Kualitas Sumber Daya Manusia - IPM (Indeks)	72,48	73,00	73,01-75,00	75,01-77,00	77,01-78,90	79,00 – 80,00
		- IMM (Indeks)	0,52 (2023)	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68 - 0,70
5.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	14,92	62,79	69,79	72,79	82,79	93,17
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	70,99	76,37	76,82	77,73	78,16

Untuk mewujudkan visi Lampung akan ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan yaitu 1) Transformasi Sosial; 2) Transformasi Ekonomi; 3) Transformasi Tata Kelola; 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah; 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7) Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan; 8) Kestinambungan Pembangunan.

Gambar 4.5 Kerangka Berfikir Visi dan Misi Lampung 2045



Sumber: RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045

Untuk mencapai visi Provinsi Lampung 2045 diperlukan pentahapan pembangunan yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu (i) Tahap Pertama (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan; (ii) Tahap Kedua (2030-2034) Percepatan Transformasi Pembangunan; (iii) Tahap Ketiga (2035-2039) Eksistensi Daerah Skala Nasional dan Skala Global; dan (iv) Tahap Keempat (2040-2045) Perwujudan Visi Pembangunan.

**Gambar 4.6 Pentahapan Pembangunan RPJPD Provinsi
Lampung 2025-2045**



Sumber: Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045

4.3. Visi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang 2025-2045

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka panjang daerah. Visi Kabupaten Tulang Bawang dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan

mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki dan mempedomani RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045, maka visi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045 adalah **“Tulang Bawang Berkarakter, Maju dan Berkelanjutan”**. Dengan adanya sinergi antar Pemerintah Daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakat diharapkan mampu melampaui laju pencapaian pembangunan di tingkat Provinsi Lampung maupun Nasional untuk mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang yang lebih Berkarakter, Maju dan Berkelanjutan. Oleh karena itu pernyataan visi diatas memiliki filosofi untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama 20 (dua puluh tahun) kedepan. Di dalam visi tersebut terdapat 3 (tiga) makna kata kunci yang terkandung yaitu:

Tabel 4.1 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Tulang Bawang Berkarakter, Maju dan Berkelanjutan	Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan (<i>people centered development</i>) atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Karakteristik masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa kebangsaan tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis berorientasi ilmu

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	Maju	Tulang Bawang maju merupakan manifestasi dari diksi “Perubahan”. Segala sumberdaya pemerintah dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Tulang Bawang. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat Tulang Bawang di segala bidang.
	Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan diatas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Tulang Bawang sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sumber: Hasil Analisis

Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang Berkarakter, Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi yaitu:

Tabel 4.2 Sasaran Visi Kabupaten Tulang Bawang

No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Pendapatan per Kapita dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	63,34	68,09-73,20	74,70-103,91	112,85-156,97	170,47-237,11	257,5-388,99
		Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,27	6,06-6,09	6,09-6,19	6,22-6,32	6,35-6,46	6,48-6,97
		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	24,41	24,65-24,90	24,90-25,91	26,17-27,23	27,50-28,62	28,90-30,37
		Indeks Ekonomi Biru (Indeks)	N/A	23,43	40	50	60	65,16
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	8,04	7,54-7,07	7,07-5,48	5,00-4,00	2,00-1,50	1,00-0,50
		Indeks Gini (Indeks)	0,284	0,278-0,272	0,272-0,249	0,243-0,222	0,217-0,199	0,195-0,174
		Persentase Desa Mandiri (persen)	2,72 (data IDM)	2,72 (data IDM 2023)	0,000-2,041	2,041-5,442	5,442-6,122	6,122-13,605
3	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02	3,05-3,08	3,08-3,21	3,24-3,37	3,40-3,54	3,58-3,76
		Kontribusi PDRB Kabupaten Tulang Bawang terhadap Provinsi (persen)	6,24	6,26-6,28	6,28-6,35	6,37-6,45	6,47-6,55	6,57-6,67
4	Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat	IPM (Indeks)	71,56	71,99	71,99-72,86	73,07-73,95	74,18-75,07	75,29-76,43
		IMM (Indeks)	0,52	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68-0,70
5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton CO ₂ e)	N/A	104.609	104.609 - 168.025	188.236 - 282,073	310.955 - 442.256	479.606 - 700.109
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,5	65,61	66,62	67,89	69,15	70,66

Sumber: Hasil Analisis

4.4. Misi Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang 2025-2045

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematis berupa pola perjalanan pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif, efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah harus mengacu pada permasalahan pokok dan isu strategis yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Proses perumusan misi pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu (i) **Transformasi Pembangunan Daerah**; (ii) **Landasan Transformasi**; dan (iii) **Kerangka Implementasi Transformasi**.

Gambar 4.7 Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Tulang Bawang



Sumber: Hasil Analisis

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tulang Bawang melalui 8 (delapan) misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Misi I: Transformasi Sosial

Misi ini bertujuan dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, masyarakat yang berdaya saing, tenaga kerja yang terampil serta pembangunan kepemudaan.

2. Misi II: Transformasi Ekonomi

Upaya pemerintah daerah untuk memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan produk menuju nilai yang lebih tinggi berbasis potensi daerah (seperti udang) serta keunggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh, kuat dan kokoh. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan adanya tenaga kerja yang produktif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatan teknologi ekonomi dengan basis industri dengan orientasi global. Produktivitas tenaga kerja yang masif disertai dengan banyaknya sumber pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggi.

3. Misi III: Transformasi Tata Kelola

Pelayanan publik yang efektif, optimal dan berkualitas diwujudkan melalui pendekatan *computer-based system* dan regulasi berbasis teknologi informatif sehingga pelayanan menjadi lebih akurat dan lebih cepat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi yang tidak hanya pada level kelembagaan, namun juga sampai kelevel sistem menjadi keniscayaan dalam perwujudan misi ini. Dengan demikian, diharapkan profesionalitas aparatur, pelayanan prima, transparansi dan melibatkan peran serta masyarakat dapat mewujudkan regulasi serta tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Misi IV: Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan taat hukum dalam harmoni kebhinekaan

Misi ini merepresentasikan upaya dalam penegakan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif. Disamping itu, keamanan dan ketertiban menjadi perhatian khusus. Diharapkan, dengan

dilaksanakannya misi ini, kesadaran hukum menjadi terbina serta terciptanya situasi aman, tertib dan terkendali.

5. Misi V: Ketahanan sosial budaya dan ekologi

Misi ini merupakan landasan dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Ketangguhan masyarakat, alam dan lingkungan Kabupaten Tulang Bawang dalam menghadapi perubahan serta guncangan. Ketangguhan tersebut merupakan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar terus terjaga secara berkelanjutan sehingga setiap masyarakat dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan. Ketahanan sosial budaya dan ekologi bertumpu pada keseimbangan antara kemampuan sumber daya alam dan lingkungan.

6. Misi VI: Pemerataan pembangunan infrastruktur

Misi ini merepresentasikan upaya dalam pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang dilakukan dengan memperkuat jaringan infrastruktur daerah yang handal dan memadai meliputi sarana transportasi jalan, jembatan, air bersih, pengairan, ketenagalistrikan, pelayanan pos dan telematika menuju *smart city*. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks peningkatan konektivitas dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dan penggerak ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

7. Misi VII: Sarana prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan

Upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan sarana prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Pembangunan sarana prasarana menjamin bahwa pembangunan tidak hanya

berkelanjutan akan tetapi memperhatikan dari perspektif lingkungan dalam jangka panjang baik melalui teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

8. Misi VIII: Kestinambungan pembangunan daerah

Pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti. Prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, akan tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan yaitu:

Tabel 4.3 Tujuh Belas Arah (Tujuan) Pembangunan

Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan
Transformasi Pembangunan Daerah	
Misi 1. Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk semua
	IE2. Pendidikan berkualitas yang merata
	IE3. Perlindungan sosial yang adaptif
Misi 2. Transformasi Ekonomi	IE4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
	IE5. Penerapan ekonomi hijau
	IE6. Transformasi digital
	IE7. Integrasi ekonomi domestik dan global

Misi	Arah (Tujuan) Pembangunan
	IE8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
Misi 3. Transformasi Tata Kelola	IE9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
Landasan Transformasi	
Misi 4. Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan taat hukum dalam harmoni kebhinekaan	IE10. Hukum berkeadilan, demokrasi substansial dan stabilitas trantibumlinmas daerah
	IE11. Stabilitas ekonomi makro daerah
	IE12. Daya saing daerah dan efektivitas kerjasama daerah
Misi 5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi	IE13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
	IE14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif
	IE15. Lingkungan hidup berkualitas
	IE16. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan
	IE17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
Kerangka Implementasi Transformasi	
Misi 6. Pemerataan pembangunan infrastruktur	
Misi 7. Sarana prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan	
Misi 8. Kesiambungan pembangunan daerah	

Sumber: Hasil Analisis

Selain itu, untuk mencapai visi Kabupaten Tulang Bawang 2045 diperlukan pentahapan pembangunan dalam jangka panjang yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Pentahapan pembangunan tersebut dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu yaitu (i) Tahap Pertama (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan; (ii) Tahap Kedua (2030-2034) Percepatan Transformasi Pembangunan; (iii) Tahap Ketiga (2035-2039) Eksistensi Daerah Skala Nasional dan Skala Global; dan (iv) Tahap Keempat (2040-2045) Perwujudan Visi Pembangunan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran selama periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan serta prioritas pembangunan yang akan dikerjakan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan dan dibagi kedalam 4 (empat) tahapan lima tahunan. Pada setiap tahapan diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Selain itu dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2045 diperlukan pentahapan dan prioritas yang dijadikan agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang didasarkan pada urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada setiap tahapan sehingga tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dirancang secara berkelanjutan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir periode RPJPD.

Pada tahap pertama (2025-2029) ditekankan pada **Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan**, tahap kedua (2030-2034) ditekankan pada **Percepatan Transformasi Pembangunan**, tahap ketiga (2035-2034) ditekankan pada **Eksistensi Daerah Skala Nasional dan Skala Global** serta tahap keempat (2040-2045) **Perwujudan Visi Pembangunan**.

**Gambar 5.1 Pentahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten
Tulang Bawang 2025-2045**



Sumber: Hasil Analisis

Selanjutnya, 4 (empat) tahapan pembangunan lima tahunan dalam RPJPD juga dijabarkan pada masing-masing misi Kabupaten Tulang Bawang.

1. Arah Kebijakan Misi ke-1: Transformasi Sosial

Tabel 5.1 Arah Kebijakan Misi ke- 1

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
Misi 1: Transformasi Sosial	Pemenuhan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial serta Sumber Daya Manusia (SDM)	Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan inklusif	Penguatan SDM yang berdaya saing, produktif dan inovatif	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing
IE 1.	• Perluasan	• Pemenuhan	• Percepatan	• Penuntasan

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
Kesehatan untuk semua	upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan • Peningkatan kualitas dan sarana prasarana pelayanan Kesehatan • Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan	kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/intensifikasi khusus tenaga Kesehatan • Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan • Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afiriasi 3TP	stunting dan pencegahan stunting • Peningkatan kesejahteraan tenaga Kesehatan • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat • Terwujudnya kesehatan untuk semua

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
	budaya • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan			
IE 2. Pendidikan berkualitas yang merata	• Peningkatan dan pemerataan akses Pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah • Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan	• Percepatan pemerataan penyediaan sarana prasarana pendidikan • Pemerataan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	• Pemantapan serta pemerataan sarana prasarana pendidikan dan kompetensi guru yang berkualitas	• Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata
IE 3. Perlindungan sosial yang adaptif	• Pemerataan pemberian bantuan sosial • Pemerataan pembangunan dan penuntasan kemiskinan • Pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi	• Percepatan penyediaan jaminan sosial • Percepatan pengembangan potensi ekonomi lokal dan memperluas lapangan pekerjaan • Perluasan akses rumah layak huni	• Penyediaan akses rumah layak huni • Penataan kawasan kumuh	• Terwujudnya perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat

Sumber: Hasil Analisis

2. Arah Kebijakan Misi ke-2: Transformasi Ekonomi

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Misi ke- 2

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
Misi 2: Transformasi Ekonomi	Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) serta penguatan potensi daerah dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan pasar regional dan nasional	Terwujudnya Kabupaten berpendapatan tinggi
IE 4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	Peningkatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk	Percepatan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk	Pemantapan produktivitas sektor unggulan yang inovatif	Terwujudnya produk unggulan daerah yang berdaya saing melalui pemanfaatan inovasi teknologi
IE 5. Penerapan ekonomi hijau	Peningkatan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif secara sosial	Percepatan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif secara sosial	Pemantapan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif secara sosial	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif secara sosial
IE 6. Tranformasi digital	Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat	Percepatan dan pemerataan akses layanan digital yang berkualitas dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat	Pemantapan akses layanan digital yang berkualitas dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya akses layanan digital yang berkualitas dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
		masyarakat		
IE 7. Integrasi ekonomi domestik dan global	Pengembangan komoditas unggulan dan ekosistem perekonomian berdaya saing yang terintegrasi dengan pasar nasional dan global	Percepatan dan pemerataan komoditas unggulan dan ekosistem perekonomian berdaya saing yang terintegrasi dengan pasar nasional dan global	Perluasan komoditas unggulan dan ekosistem perekonomian yang terintegrasi dengan pasar nasional dan global	Terciptanya komoditas unggulan dan perekonomian lokal yang berdaya saing yang terintegrasi dengan pasar nasional dan global
IE 8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata, inklusif dan berkelanjutan serta memperhatikan lingkungan	Percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata, inklusif dan berkelanjutan serta memperhatikan lingkungan	Pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis

3. Arah Kebijakan Misi ke-3: Transformasi Tata Kelola

Tabel 5.3 Arah Kebijakan Misi ke- 3

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
Misi 3: Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif,	SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi informatif dan masyarakat	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri	Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
	digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	sipil partisipatif		
IE 9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Peningkatan dan penyederhanaan regulasi melalui digitalisasi pelayanan publik	Percepatan digitalisasi pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif	Penguatan tata kelola pemerintah berbasis teknologi yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya regulasi dan tata kelola pemerintah yang berintegritas dan adaptif

Sumber: Hasil Analisis

4. Arah Kebijakan Misi ke-4: Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan taat hukum dalam harmoni kebhinekaan

Tabel 5.4 Arah Kebijakan Misi ke- 4

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
Misi 4: Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan taat hukum dalam harmoni kebhinekaan	Memperkuat lembaga penegakan hukum, keamanan dan ketertiban umum	Memantapkan lembaga penegakan hukum, keamanan dan ketertiban umum	Terciptanya lembaga penegakkan hukum yang adil dan kesadaran masyarakat taat hukum	Kabupaten yang aman, tertib dan terkendali
IE 10. Hukum berkeadilan, demokrasi substansial dan stabilitas trantibumlinmas daerah	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum	Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan dan perluasan partisipasi aktif masyarakat dalam	Penguatan penegakan hukum yang berkeadilan dan partisipasi aktif masyarakat dalam	Terwujudnya hukum berkeadilan, demokrasi substansial dan stabilitas trantibumlinmas daerah

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
		menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum	menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum	
IE 11. Stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan kebijakan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata dan berkelanjutan	Penguatan kebijakan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata dan berkelanjutan	Pemantapan kebijakan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata dan berkelanjutan	Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah
IE 12. Daya saing daerah	• Penyediaan pelatihan, sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja • Peningkatan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat	• Percepatan penyediaan pelatihan, sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja • Percepatan pembangunan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat	• Pemantapan kualitas, kompetensi dan kapasitas tenaga kerja yang berdaya saing • Pemantapan dan pemerataan pembangunan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat	• Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing • Terciptanya konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat

Sumber: Hasil Analisis

5. Arah Kebijakan Misi ke-5: Ketahanan sosial budaya dan ekologi

Tabel 5.5 Arah Kebijakan Misi ke- 5

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
Misi 5: Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, alam dan lingkungan dalam menghadapi perubahan	Terwujudnya keseimbangan antara kemampuan SDA dan lingkungan
IE. 13 Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Peningkatan kerukunan beragama dan nilai luhur kebudayaan lokal	Penguatan kerukunan beragama dan nilai luhur kebudayaan lokal	Pemantapan kerukunan beragama dan nilai luhur kebudayaan lokal	Terwujudnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju daerah
IE. 14 Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Peningkatan kualitas hidup serta peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Pemberdayaan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Pemantapan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
IE. 15 Lingkungan hidup berkualitas	Peningkatan regulasi dalam mengurangi dampak lingkungan	Percepatan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pemantapan penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas
IE. 16 Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	• Peningkatan konsumsi listrik per kapita • Peningkatan kapasitas air	• Percepatan penyediaan konsumsi listrik per kapita • Percepatan	• Pemantapan penyediaan konsumsi listrik per kapita • Pemantapan	Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan

Misi dan Arah (Tujuan) Pembangunan	Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
	baku • Peningkatan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan • Peningkatan kemandirian pangan	penyediaan kapasitas air baku • Percepatan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan • Percepatan kemandirian pangan	penyediaan kapasitas air baku • Pemantapan akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan • Pemantapan kemandirian pangan	
IE. 17 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kewaspadaan masyarakat terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam	Percepatan pembangunan sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana alam	Pemantapan pembangunan sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana alam	Terwujudnya kelembagaan dan kewaspadaan terhadap bencana dan perubahan iklim

Sumber: Hasil Analisis

6. Tahapan Misi ke-6: Pemerataan pembangunan infrastruktur

Tabel 5.6 Arah Kebijakan Misi ke- 6

Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
• Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata • Menyusun	• Percepatan pembangunan infrastruktur yang merata • Membuat	• Pemantapan infrastruktur yang terintegrasi dan	• Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata dan

rencana tata ruang yang terpadu untuk memastikan infrastruktur jalan mendukung pertumbuhan berkelanjutan • Mengembangkan koridor ekonomi di sepanjang ruas jalan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	kebijakan yang mendukung pembiayaan dalam rangka peningkatan dan percepatan infrastruktur jalan • Mempercepat pengembangan koridor ekonomi di sepanjang ruas jalan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	berkualitas • Memantapkan penyusunan rencana strategis dan terpadu untuk infrastruktur jalan • Memantapkan pengembangan koridor ekonomi di sepanjang ruas jalan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi	berkualitas • Terwujudnya infrastruktur jalan yang terpadu untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan • Terciptanya pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi sepanjang ruas jalan utama
---	---	---	--

Sumber: Hasil Analisis

7. Tahapan Misi ke-7: Sarana prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan

Tabel 5.7 Arah Kebijakan Misi ke- 7

Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
• Peningkatan pembangunan sarana prasarana dasar dan lingkungan • Membangun dan meningkatkan infrastruktur air bersih untuk	• Percepatan pembangunan sarana prasarana dasar dan lingkungan • Mengembangkan dan memperluas jaringan IPAL untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan air	• Pemantapan pembangunan sarana prasarana dasar dan lingkungan yang berkualitas dan ramah lingkungan • Meningkatkan kapasitas IPAL	• Terwujudnya sarana prasarana dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan • Memperluas jaringan distribusi air bersih ke wilayah yang

meningkatkan akses Masyarakat terhadap air yang aman			belum terlayani
--	--	--	-----------------

Sumber: Hasil Analisis

8. Tahapan Misi ke-8: Kesenambungan pembangunan daerah

Tabel 5.8 Arah Kebijakan Misi ke- 8

Tahap I (2025 – 2029)	Tahap II (2030 – 2034)	Tahap III (2035 – 2039)	Tahap IV (2040 – 2045)
• Penyempurnaan instrument kebijakan dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif • Percepatan pembangunan sistem Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan penganggaran • Keselarasan pembangunan pusat daerah secara konsisten	• Terbentuknya ekosistem sumber pendanaan pembangunan alternative dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, aman dan terpercaya. • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrument untuk mitigasi perencanaan pembangunan • Keselarasan pembangunan pusat daerah secara konsisten	• Sistem pengelolaan sumber pendanaan pembangunan alternative semakin handal untuk mendukung kemandirian fiskal • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrument untuk mitigasi perencanaan pembangunan • Keselarasan pembangunan pusat daerah secara konsisten	• Terwujudnya kemandirian fiskal daerah yang tinggi • Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrument untuk perencanaan pembangunan selanjutnya • Keselarasan pembangunan pusat daerah secara konsisten

Sumber: Hasil Analisis

5.2. Sasaran Pokok Daerah

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode pembangunan tahun ke 20 (dua puluh). Berdasarkan rumusan visi dan misi yang telah disusun sebelumnya, pembangunan Kabupaten Tulang Bawang lebih rinci melalui kertas kerja perumusan sasaran pokok sebagai berikut.

Tabel 5.9 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

No	Indikator Utama Pembangunan		Target					Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Misi 1: Transformasi Sosial								
IE1. Kesehatan untuk semua								
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	70,31	70,42	70,76	71,19	71,75	72,05	
2	Kesehatan Ibu dan Anak:							
a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	11,12	9,01	9,01-5,91	5,32-3,49	3,14-2,06	1,86-1,10	
b	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	9,58	9,0	8,7-7,2	6,1-5,3	4,8-4,1	3,10-2,80	
3	a. Cakupan penemuan	57,95	59	63-68	74-79	85-90	97-100	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target						Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	kasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>) (%)							
	b. Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	95,6	95,79	95,79-96,18	96,27-96,66	96,75-97,14	97,24-97,73	
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	95,35	96	96,7	97	97,5	98-100	
IE2. Pendidikan berkualitas yang merata								
5	Hasil pembelajaran:							
a	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk							
	i) Literasi Membaca	59,13	60,00	60,00-65,00	65,00-70,00	70,00-75,00	75,00 - 80,00	
	ii) Numerasi	38,89	40,00	40,00-45,00	45,00-50,00	50,00-55,00	55,00 - 60,00	
b	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15	7,57	7,75	8,21-8,62	9,45-9,87	10,36-10,92	11,56-13,64	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target						Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	tahun (tahun)							
c	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,29	12,98	13,6-13,7	13,8-14,05	14,2-14,4	14,60-15,90	
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	3,50	4.24	4,24-4,83	4,83-5,45	5,45-6,26	6,26-7,98	
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	26	27-28	29-31	35-40	45-50	65-60	
IE3. Perlindungan sosial yang adaptif								
8	Tingkat Kemiskinan (%)	8,04	7,54-7,07	7,07-5,48	5,14-3,98	3,73-2,89	2,71-1,97	
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	70	70	70	75-85	85-90	100	
10	Persentase Penyandang	N/A	22	30-35	36-46	47-52	53-55	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target						Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	Disabilitas Bekerja (%)							
Misi 2: Transformasi Ekonomi								
IE4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi								
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	24,41	24,65-24,90	24,90-25,91	26,17-27,23	27,50-28,62	28,90-30,37	
12	Pengembangan Pariwisata:							
a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,4	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	
b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)*	23	25	28	50	70	100	
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,5	0,5	0,5	0,7	0,9	1,06	
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:							
a	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	50,2	55	66,2	78,5	90,5	64,11	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target						Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
b	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	50,17	48,44	49,11	49,64	49,34	50,50	
c	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,30	0,65	1,1	1,9	2,8	3,60	
d	<i>Return on Aset (ROA) BUMD (%)*</i>	N/A	0,5	0,5	0,75	1	1,50	
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,46	3,25-3,20	3,20-3,04	2,98-2,56	2,41-1,97	1,80-1,50	
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53,86	54,17	54,01	55,01	55,45	56,01	
17	Tingkat penguasaan IPTEK							
a	Peringkat Index Inovasi Daerah (peringkat)	34	33	32	30	27	24	
IE5. Penerapan ekonomi hijau								
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:							
a	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton	N/A	104.609	104.609-168.025	188.236-282,073	310.955-442.256	479.606-700.109	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target						Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	CO2e)							
b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	N/A	36	37,80	40,40	42,80	44,20	
IE6. Transformasi digital								
19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	N/A	2,05-2,24	2,25-2,75	3,5-4,5	5,5-6,0	6,80-7,10	
IE7. Integrasi ekonomi domestik dan global								
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten*	N/A	2	1,5-2,0	2,5-2,75	3,00-3,25	3,50	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	34,84	35,05	36,41	36,32	36,41	35,96	
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,18	0,25	1,20	1,364	1,520	1,740	
IE8. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi								
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:							
a	Rumah Tangga dengan	34	40	46	58	69	80	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target						Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)							
b	Persentase Desa Mandiri (%)	2,72 (data IDM)	2,72 (data IDM 2023)	0,000-2,041	2,041-5,442	5,442-6,122	6,122-13,605	
Misi 3: Transformasi Tata Kelola								
IE9. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif								
24	Indeks Reformasi Hukum*	N/A	70	71-80	81-90	91-95	100	
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,55	2,70	2,85	3,15	3,45	3,75	
26	Indeks Pelayanan Publik	4,60	4,65	4,70	4,80	4,90	5,00	
27	Anti Korupsi:							
a	Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	69,22	70	74	78	82	85,92	
Misi 4: Kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan taat hukum dalam harmoni kebhinekaan								
IE10. Hukum berkeadilan, demokrasi substansial dan stabilitas trantibumlinmas daerah								
28	Tingkat Kriminalitas (Ratio)	N/A	122	115	105	98	85	
	a. Persentase Penegakan	N/A	70	78	85	93	100	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target						Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	Hukum Peraturan Daerah							
	b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	N/A	60	65	70	75	80	
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	N/A	71,7	75,7	80,7	85,7	89,08	
30	Indeks Demokrasi Indonesia	N/A	65-70	82-83	84-85	86-87	87,01-90,00 (tinggi)	
IE11. Stabilitas ekonomi makro daerah								
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,48	0,55	0,65	0,78	0,89	1,20	
32	Tingkat Inflasi (%)	2,93	3,53-2,45	2,45	2,02	1,76	1,30	
33	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,27	6,06-6,09	6,09-6,19	6,22-6,32	6,35-6,46	6,48-6,62	
34	Inklusi Keuangan (%)	37,50	39,9	42-48	54-60	66-72	76,67-81,67	
IE12. Daya saing daerah dan efektivitas kerjasama daerah								
35	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	N/A	75	76-78	79-81	82-86	90-95	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target						Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
36	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	50	65	75	85	85	92	
Misi 5: Ketahanan sosial budaya dan ekologi								
IE13. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju								
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	59,00	59,50-62,00	63,00-65,00	66,00-68,00	68,96-69,11	
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	62,20	65	63-65	68-69	70-71	72,24-76,62	
IE14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif								
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	59,28	59,76	59,76-60,72	60,96-61,94	62,19-63,19	63,44-64,72	
a	Indeks Perlindungan Anak	69,5	70	70-72	74-76	78-80	82-84	
b	Indeks Pembangunan Pemuda	N/A	49,53	60,53-65,00	65,53-70,00	70,53-75,00	75-78	
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,486	0,474	0,52-0,48	0,46-0,41	0,40-0,30	0,25-0,22	
IE15. Lingkungan hidup berkualitas								
41	Kualitas Lingkungan Hidup:							
a	Indeks kualitas lingkungan	61,5	65,61	66,62	67,89	69,15	70,66	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target						Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	hidup							
b	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	3,67	5	15	25	35	45	
c	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	63,96	65	66	69	75	83,42	
IE16. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan								
42	Ketahanan energi, air, dan pangan:							
a	Ketahanan Energi:							
	(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	270,20	350	350	450	600	800	
b	Ketahanan Pangan:							
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	11,22	14,79	8,44	8,1	7,6	6,4	
c	Ketahanan Air:							
	(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,64	1,7	2,6	4,9	7,2	9,3	
	(ii) Akses Rumah Tangga	12,19	25	25	41	57	70,32	

No	Indikator Utama Pembangunan	Target						Ket.
		Capaian 2023	Baseline 2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
	Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)							
IE17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim								
43	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	122,66	122	120,16-115,43	114,27-109,77	108,67-104,39	103,34-98,28	
44	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton CO2e)	N/A	104.609	104.609-168.025	188.236-282,073	310.955-442.256	479.606-700.109	

Sumber: Hasil Analisis

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2045. Kerangka pemikiran dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2045 didasarkan pada kecenderungan menjamin terlaksananya dan tercapainya keberhasilan pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2045 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2045 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan komitmen antara penyelenggaraan pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.

KAIDAH PELAKSANAAN

RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2025–2045 disusun dengan berpedoman RPJPN dan menjadi acuan oleh seluruh pemangku kepentingan pelaku pembangunan daerah, termasuk Lembaga-lembaga yang merepresentasikan cabang kekuasaan negara, pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan, diantaranya:

1. Visi dan misi RPJPD menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah. (Pasal 165 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
2. Sasaran pokok dalam RPJPD digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD. (Pasal 167 Ayat 6 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
3. Sasaran pokok RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. (Pasal 168 Ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
4. Sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. (Pasal 168 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
5. Sasaran dalam RPJMD yang ditetapkan harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. (Pasal 169 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
6. Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan. (Pasal 171 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);

7. Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD; termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah. (Pasal 176 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
8. Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota. (Pasal 181 Ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
9. Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dan nasional. (Pasal 208 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
10. Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Daerah provinsi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan evaluasi hasil RPJMD provinsi; dan melaporkannya kepada gubernur. (Pasal 249 dan 250 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
11. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik

Sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

PJ. BUPATI TULANG BAWANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller loop and a short horizontal stroke.

FERLI YULEDI